

Kata Pengantar
Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
(Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Menjadi Madrasah Bermutu Di Tengah Keterbatasan

Model Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Madrasah Bermutu



Menjadi Madrasah Bermutu Di Tengah Keterbatasan Model Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Madrasah Bermutu



Pokok masalah dalam buku ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah atau sekolah. Buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pengelolaan madrasah (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah dan (3) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan madrasah.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pengelolaan pada Madrasah meliputi (a) masyarakat ikut serta dalam perencanaan kegiatan pendidikan Madrasah melalui komite madrasah, khususnya dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja madrasah, (b) masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk kepribadian peserta didik, seperti kepramukaan, olahraga, kesenian, kegiatan keagamaan, (c) partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pendidikan diwakili oleh komite madrasah;

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar sarana dan prasarana, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan pada Madrasah temukan jawaban lengkapnya dalam buku ini. Selamat membaca.



Dr. H. Talabudin Umkabu, M.Pd., Putra asli Papua. Tepatnya dari Kampung Lilinta Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Penulis merupakan Dosen Tetap dan Wakil Rektor Tiga (III) Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua dari tahun 2018.



UIN - MALIKI PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile (0341) 573225
E-mail: uinmalikiypressredaksi@uin-malang.ac.id
Website: www.press.uin-malang.ac.id



KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
Guru Besar dan Rektor 1997-2012 UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

MENJADI MADRASAH BERMUTU DI TENGAH KETERBATASAN

*Model Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Madrasah Bermutu*

Dr. H. Talabudin Umkabu, M.Pd.



2020

Menjadi Madrasah Bermutu Di Tengah Keterbatasan, Model Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Madrasah Bermutu

Dr. H. Talabudin Umkabu, S.Ag., M.Pd.

Copyright @UIN Maliki Press, 2020

Penulis : Dr. H. Talabudin Umkabu, M.Pd.
Editor : Mohammad Karim
Layout isi : CV. Dian's Print
Desain cover : CV. Dian's Print
Ukuran : 16 x 23 cm. x + 199 hlm.
ISBN : 978-623-232-654-4
Cetakan I : 2020

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi
Buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari
Penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh:

UIN Maliki Press (Anggota IKAPI)

Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Telp/Faksimile: (0341) 573225

E-mail : uinmalikipressredaksi@uin-malang.ac.id

Website: <http://malikipress.uin.malang.ac.id>

PRAKATA PENULIS

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt, karena berkat taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diharapkan. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga, sahabatnya yang telah menyampaikan petunjuk bagi umat manusia dengan ajaran demi tegaknya keadilan dan perdamaian di muka bumi ini.

Awalnya, naskah buku ini berasal dari Disertasi Penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua (alm. Ahmad Umkabu dan almh. Khadijah Bugis) yang telah melahirkan dan mendidik sejak kecil, istri (Ratna Fakhita), dan anak-anak tercinta (Mufida Aziza Zahra Umkabu, Syifa Aridhatun Nisa Umkabu, Abiyan Syaif Abdullah Umkabu dan Khadeeja Zalfa Huriya Umkabu) yang memberi perhatian penuh dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang S3 saat ini.

Akhirnya, meskipun penulis berupaya seoptimal mungkin untuk mempersembahkan karya tulis terbaik, tetapi boleh jadi di dalamnya masih terdapat keterbatasan, hal itu disebabkan kekurangan penulis sebagai manusia biasa.

Penulis
Talabudin Umkabu

Kesadaran Mengutamakan Kualitas Dalam Pendidikan

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo

Guru Besar dan Rektor 1997-2012 UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Sejak dahulu orang menganggap bahwa pendidikan itu penting. Tentang pendidikan seperti apa yang dimaksudkan itu, belum menjadi perhatian. Bagi kebanyakan orang, berpendapat bahwa yang penting adalah sekolah, lulus, dan mendapatkan ijazah. Akhirnya banyak orang bersekolah, untuk memperoleh tanda lulus dan ijazah itu.

Memang sudah muncul pihak-pihak yang tidak saja sekedar menginginkan bersekolah, tetapi memilih sekolah yang dianggap lebih tepat. Pilihan itu misalnya, dikaitkan dengan status, yaitu di antara sekolah negeri dan swasta. Dipercayai bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah terjamin lebih baik. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Sekarang sudah banyak sekolah swasta yang berhasil mengungguli sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pilihan terhadap lembaga pendidikan kadang juga dikaitkan dengan jenis ilmu yang ditawarkan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi social keagamaan, atau menggunakan nama tokoh atau pemuka agama, lebih dipilih dibanding lainnya. Madrasah misalnya, atau madrasah yang ada di pesantren, sekolah Muhammadiyah, atau sekolah yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, atau pada akhir-akhir ini adalah UIN, lebih diminati dari yang lain.

Simbol-simbol dimaksud hingga saat ini masih dijadikan alasan untuk memilih lembaga pendidikan. Akan tetapi sebenarnya, sebagian masyarakat sudah mulai melihat kualitas hasil pendidikan yang dikaitkan dengan kemampuan menjawab tantangan masa depan. Pengetahuan agama, misalnya, masih dianggap penting dan harus dipenuhi. Akan tetapi, kemampuan di bidang lainnya juga harus diutamakan. Mereka mulai bertanya, ketika

sudah lulus dan memperoleh ijazah, lalu apa arti semua dokumen itu.

Terkait dengan isu kualitas pendidikan, pada akhir-akhir ini muncul tawaran sekolah atau lembaga pendidikan bermutu dengan menamakan diri sebagai sekolah unggulan, sekolah klas internasional, klas dunia, dan semacamnya. Tawaran itu tentu datang dari orang yang mampu menangkap aspirasi atau kebutuhan masyarakat, dan kemudian yang bersangkutan berusaha memenuhinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebutan sekolah atau lembaga pendidikan unggul dimaksud, juga benar-benar unggul. Jawabnya, tentu masih perlu diuji lagi dalam waktu lama.

Kesadaran masyarakat dalam mengutamakan mutu hasil pendidikan sebenarnya perlu diapresiasi oleh semua pihak, utamanya pemerintah. Manakala pemerintah masih berkuat pada pendekatan formaliltas, atau hal-hal yang bersifat simbolik, maka bangsa ini sampai kapan pun tidak akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tatkala persaingan benar-benar terbuka dan pasar sudah menjadi bebas, maka orang tidak terlalu perlu menanyakan IP, tanda lulus, atau ijazah. Mereka akan lebih menanyakan tentang kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki di balik ijazah atau tanda lulus itu.

Oleh karena terlalu diwarnai oleh suasana dan pikiran formal, maka pendidikan pun dijalankan secara formal pula. Terasa menjadi agak aneh, pendidikan juga diukur dan ditakar persis seperti mengukur dan menakar air yang dimasukkan ke dalam gelas. Seorang anak dengan mengikuti pelajaran selama waktu tertentu dianggap telah menguasai pengetahuan, terampil, dan kemudian diberi ijazah. Padahal mengisi gelas dengan air amat berbeda dengan mengisi otak manusia dengan ilmu atau pengetahuan. Gelas adalah benda mati dan diketahui tidak bocor. Sementara itu orang, selain kemampuan dan konsentrasinya berbeda-beda, juga sering lupa, atau justru

bocor. Selang beberapa waktu saja diisi, sebagian besar isi otak itu segera hilang, karena lupa.

Terkait dengan gambaran tersebut, saya pernah membaca buku yang saya anggap agak lucu. Buku itu menceritakan tentang seorang murid. Ia belajar serius, namun setelah dinyatakan lulus dan keluar dari sekolahnya, semua pelajarannya segera terlupakan. Berbekalkan ijazah itu, ia meneruskan pada jenjang berikutnya. Namun apa yang dialami di jenjang sekolah berikutnya itu sama persis dengan di sekolah sebelumnya, yaitu setelah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah, maka seluruh pengetahuannya hilang. Diceritakan pegalamannya di dalam buku itu secara utuh, hingga ia lulus sampai jenjang terakhir. Kesimpulannya, banyak sekolah yang sebenarnya hanya bagaikan tempat mencari tanda lulus dan ijazah.

Kisah dalam buku tersebut kiranya juga berlebihan. Tidak akan mungkin seseorang belajar di berbagai jenjang pendidikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa atau semua pengetahuan yang diperolehnya hilang dan tidak bersisa. Pasti tidak begitu. Dari berbagai jenjang pendidikan dan ditempuhnya dalam waktu lama, akan diperoleh pengetahuan, pengalaman, dan bahkan juga kematangan dan kedewasaan. Informasi atau ilmu yang diperolehnya selama di sekolah terlupakan, tetapi dampak dari ilmu yang pernah diterima itu tidak mudah hilang.

Pada saat sekarang ini, tatkala bangsa sedang berpikir keras menyiapkan generasi mendatang, maka yang perlu dipikirkan secara serius adalah bagaimana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas itu segera direspon, khususnya oleh mereka yang membidangi pendidikan. Bahwa pendidikan adalah penting, tetapi sebenarnya adalah pendidikan yang mampu menjawab persoalan nyata sekarang dan mendatang. Pendidikan yang hanya berorientasi pada formalitas, seperti hanya mementingkan lulus, ijazah, gelar, wisuda, dan semacamnya itu ke depan tidak akan terlalu relevan. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya sekedar

membolak-balik dokumen kurikulum, buku teks, ujian nasional, mengatur jumlah sks yang harus diambil, dan sejenisnya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, hal yang amat penting diingat dan seharusnya mendapatkan perhatian serius adalah menyangkut paradigma, filosofis, dan hakekat pendidikan itu sendiri. Bahwa di dalam setiap kegiatan, tidak terkecuali kegiatan pendidikan, seharusnya ada jiwa, ruh, atau nyawanya. Sekalipun dalam berbagai hal sudah memenuhi syarat, yakni delapan standart pendidikan terpenuhi, tetapi jika aspek penting dimaksud belum berhasil dihadirkan, maka kualitas yang diharapkan juga tidak akan bisa diraih. Letak kekuatan pendidikan itu sebenarnya berada di tempat itu.

Sekolah yang memiliki jiwa, nyawa atau ruh tersebut, bisa tampak dari keseluruhan aspek yang ada di lembaga pendidikan itu. Mungkin saja secara fisik sekolah itu tampak sederhana, bahkan tidak punya gedung dan peralatan yang cukup, hingga belajar mengajar harus menempati garasi misalnya, tetapi oleh karena di tempat itu terdapat cahaya, ruh, jiwa, dan nyawa, maka pada institusi itu ada semacam kekuatan hidup, maju dan berkembang. Keberadaan mereka tidak terpaksa, atau tidak sekedar memenuhi perintah atau tugas harus ada. Mereka ada oleh karena didorong oleh cita-cita, semangat, dan kemauan dari dalam untuk ada.

Lembaga pendidikan yang memiliki jiwa, ruh, atau nyawa itu tampak dari perilaku semua pihak, yaitu dari para gurunya, kepala sekolah, karyawan, dan para muridnya. Dari para guru misalnya, mereka merasa bangga dan mencintai sepenuhnya atas posisinya sebagai guru, dari mereka kelihatan kedalaman ilmunya, keikhlasannya, integritasnya, tanggung jawabnya, amanahnya, istiqomahnya, dan seterusnya. Demikian pula, kepala sekolahnya. Leadership dan manajerialnya selalu tampak, penuh bertanggung jawab, amanah, dan istiqomah. Akhirnya, pendidikan menjadi hidup, dan bukan sekedar ada. Itulah lembaga

pendidikan yang ditunggu dan diharapkan mampu menjawab persoalan ke depan.

Gambaran pendidikan sebagaimana secara singkat dikemukakan tersebut akan memunculkan ide-ide baru, kreasi baru, cara dan pendekatan baru dalam pendidikan dan pengajaran. Atas dasar kesenangan dan kecintaannya terhadap pendidikan, mereka akan secara terus menerus mencari hal baru, inovasi baru, prakarsa baru. Manakala semua itu berhasil dikembangkan, maka kiranya kesadaran terhadap tuntutan kualitas pendidikan bisa dipenuhi. Akan tetapi sebaliknya, jika semua hanya dilakukan dengan terpaksa, yaitu sekedar mengikuti aturan formal, target-target formal, dan laporan-laporan formal yang harus dibuat, maka hal itu tidak akan membuahkan sesuatu yang maksimal. Hasilnya akan bagaikan sampah, kelihatan menggunung, tetapi tidak ada gunanya.

Buku ini lahir dari keinginan bagaimana Madrasah menjadi lebih berkualitas. Agar supaya madrasah berkualitas, maka dapat dimulai dari semangat dan perilaku para pengelola, mulai dari para gurunya, kepala sekolah, karyawan, wali murid, komite dan para muridnya. Sebab, semangat dan perilaku mereka merupakan ruh atau jiwa madrasah. Jika ruh madrasah bermutu-miskipun dengan sarana terbatas, maka madrasah juga akan bermutu. Buku ini memfokuskan diri pada model partisipasi masyarakat madrasah dalam proses peningkatan mutu madrasah, studi kasus masyarakat Papua. Adanya Madrasah bermutu di tengah ketersediaan SDM dan sarana memadai merupakan hal lumrah. Tapi, keberadaan madrasah bermutu di tengah keterbatasan SDM dan sarana merupakan hal yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Selamat membaca. Wallahu a'lam.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	III
DAFTAR ISI	IX
BAB I MUTU MADRASAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT ...	1
BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MUTU MADRASAH...	17
A. Partisipasi Masyarakat	17
B. Pengembangan Mutu Madrasah	57
C. Mutu Pendidikan	62
D. Standar Nasional Pendidikan	72
E. Kerangka Konseptual	95
BAB III TAHAPAN MEMBANGUN MADRASAH BERMUTU DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	103
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pengelolaan Madrasah	103
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Madrasah	150
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Standar Pembiayaan Madrasah	163
BAB IV MODEL PARTIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN SEKOLAH BERMUTU	175
DAFTAR PUSTAKA	185
PROFIL PENULIS	195

BAB I

MUTU MADRASAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pendidikan merupakan investasi masa depan bagi seseorang atau suatu bangsa yang akan meraih suatu kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan pendidikan yang lebih baik maka suatu bangsa akan menuju suatu perubahan tatanan kehidupan yang rapi dan tertib untuk mencapai peradaban modern. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas atau bermutu. Artinya, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan suatu proses pendidikan yang bermutu yang merupakan kunci pokok bagi keberhasilan mutu pendidikan sebagai bentuk kelebihan dibanding manusia lainnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Zumar/39: 6.

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19)

Terjemahnya:

... Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.¹

Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa kata *يَعْلَمُونَ* pada ayat di atas, sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Jika makna ini dikaitkan dengan mutu pendidikan maka yang dimaksud adalah madrasah yang memiliki mutu baik akan berbeda dengan madrasah yang tidak memiliki mutu pendidikan.²

¹Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cipta Syamil Media, 2005), h. 459.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 12, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 197.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa komponen penyelenggaraan yang berkualitas mulai dari peraturan penyelenggaraan, sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana-prasarana serta sistem penilaian yang berkualitas. Tercapainya sumber daya yang berkualitas menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.³

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Dalam konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Langkah-langkah strategis dapat dicapai melalui berbagai kegiatan di dalam proses pendidikan. Apabila tidak ada patokan atau *yardstick* yang dijadikan pedoman sudah barang tentu akan terjadi kekacauan dalam pendidikan karena tidak mempunyai arah. Pernyataan mengenai perlunya standar pendidikan nasional menurut Tilaar adalah:

- a) standar pendidikan nasional merupakan tuntutan politik,
- b) standar pendidikan nasional merupakan tuntutan globalisasi,
- c) standar pendidikan nasional

³Anshori LAL, *Transformasi Pendidikan Islam* (Cet. I Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 55.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab II, pasal 3.

merupakan tuntutan dari kemajuan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa fungsi standar nasional pendidikan adalah, a) mengukur kualitas pendidikan, b) penataan masalah pendidikan, c) penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data dari evaluasi belajar nasional seperti ujian nasional.⁵

Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Artinya, standar pendidikan merupakan fondasi dalam membangun pendidikan Indonesia untuk mencapai mutu pendidikan Indonesia. Definisi standar nasional pendidikan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, bahwa: “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶

Dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa standar nasional pendidikan merupakan sarana untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi mutu pelayanan pendidikan. Lingkup standar pendidikan nasional meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Dengan adanya standar nasional tersebut

⁵H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 289.

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, pasal 1, ayat 1.

maka arah peningkatan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Dijelaskan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mencakup antara lain:

1. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional

agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.⁷

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, pengelolaan madrasah/sekolah di Indonesia diarahkan untuk mencapai standar minimal, seperti yang tertera dalam standar nasional pendidikan. Tidak dibahas dalam studi ini delapan standar nasional pendidikan tersebut secara keseluruhan, akan tetapi dibatasi pada tiga standar, yaitu: (1) standar sarana dan prasarana, (2) standar pengelolaan, (3) standar pembiayaan. Alasan yang mendasari kenapa ketiga standar tersebut dijadikan fokus kajian dalam penulisan disertasi ini karena:

Pertama; Madrasah/sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, berkepribadian yang mantap serta mandiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai pula.

Sebaliknya sarana dan prasarana yang kurang memadai akan berdampak pada keberlangsungan pengelolaan pendidikan yang tidak berkualitas. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan kegiatan pembelajaran akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana dan prasana

⁷Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, pasal 1, ayat 5-12.

pembelajaran, guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana, dan kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna.

Sedangkan warga madrasah, warga masyarakat, dan pemerintah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan.⁸ Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana dalam hal ini madrasah.

Kedua, problematika madrasah yang paling mendasar yaitu masalah manajemen pengelolaan. Madrasah dikatakan berkualitas, kata kuncinya terletak pada bagaimana upaya setiap warga madrasah dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas melalui pemberdayaan berbagai komponen penting yang terdapat di madrasah, yakni tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik, dan masyarakat di lingkungan sekitar madrasah baik yang tergabung dalam keanggotaan komite madrasah maupun masyarakat umum lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah dapat dilakukan dalam bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu madrasah, diantaranya: penggunaan jasa madrasah, pemberian kontribusi dana, bahan, dan tenaga, bantuan anak belajar di rumah, konsultasi masalah pendidikan anak, keterlibatan dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan pembahasan tentang kebijakan sekolah. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia

⁸Abdul Rahman Halim, "Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan", *Jurnal Lentera Pendidikan*, vol. 11 no. 1 (Juni 2018), h. 84. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/download/3765/3439. (Diakses 19 November 2018).

usaha, dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan partisipasi masyarakat ditentukan pula oleh kepala madrasah menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya menurut Salim bahwa:

*The main function of leadership lies in a special type of representation (group representation). A leader must represent his own group. Representing his group means that the leader represents the administrative function on an executive basis.*⁹

Fungsi utama kepemimpinan terletak pada jenis khusus dari perwakilan (*group representation*). Seorang pemimpin harus mewakili kelompoknya sendiri. Mewakili kelompoknya mengandung arti bahwa pemimpin mewakili fungsi administrasi secara eksekutif). Ini meliputi koordinasi dan integrasi berbagai aktivitas yang harus direalisasikan oleh kepala madrasah sehingga kepala madrasah harus memiliki kompetensi kepemimpinan dalam mengelola pendidikan.

Madrasah yang efektif adalah madrasah yang memiliki standar pengelolaan yang baik, transparan, responsif, dan akuntabel, serta mampu diberdayakan setiap komponen penting madrasah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka terwujudnya madrasah yang efektif. Kenyataan yang terjadi pada pendidikan madrasah adalah

⁹Nur Agus Salim, *The Relationship between the Principals' Leadership, Work Motivation, and Interpersonal Communication and the Performance of High School Math Teachers'*International Journal of Education

<http://Leadership.petra.ac.id/index.php/man/article/view/15601>.

Diakses, 13/9/2019.

masalah manajerial secara makro. Sebagai contohnya, sebagian besar madrasah yang ada, masih dikelola dengan manajemen “apa-adanya” (tradisional), misalnya tidak diterapkannya secara baik dan sistematis fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Madrasah (BOM), seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya agar sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu madrasah tersebut.

Agar proses suatu organisasi berjalan mantap maka perlu adanya suatu manajemen yang baik dan terarah. Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi karena manajemen melibatkan semua faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Madrasah merupakan organisasi formal dalam pendidikan yang harus diperhatikan bersama, baik dari segi tata kelola maupun kegiatan di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan yang berstatus negeri maupun swasta membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen yang bagus diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Ketiga, pembiayaan pendidikan bagi institusi pendidikan swasta, terkait dengan kebijakan pemerintah berupa pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Dinamika yang ada menggambarkan madrasah swasta mengalami kesulitan serius menyikapi kebijakan pemerintah itu, apalagi yang memiliki keterbatasan daya saing. Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.¹⁰ Biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan.

¹⁰Dadang Suhardan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 22.

Lebih lanjut, Suhardan dkk. menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah aktivitas pemenuhan tujuan permintaan kebutuhan manusia terdidik melalui belajar yang harus dibiayai. Pendidikan memproses manusia sehingga dapat menjadi manusia yang produktif.¹¹ Modal yang ditanam pendidikan berperan seperti dalam dunia industri. Dalam dunia pendidikan, *output* pendidikan bukan berupa komoditi tetapi mencetak atau mengembangkan manusia terampil yang berkemampuan untuk membangun dan mengembangkan dirinya lebih baik. Pendanaan madrasah sebagian besar mengandalkan pada masyarakat melalui orang tua murid, yayasan atau wakaf sehingga kebutuhan pengelolaan pendidikan secara maksimal tidak tercukupi. Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi.

Sebagai bentuk tanggungjawab implementasi otonomi pendidikan tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 54 menekankan pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, khususnya hak dan kewajiban masyarakat, Bab IV pasal 8-9 Undang-Undang Sisdiknas, (1) masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan (2) masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.¹² Dengan demikian partisipasi masyarakat adalah bagian integral dari sistem pendidikan, dengan keterlibatan masyarakat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan fasilitas ataupun bantuan lainnya diharapkan pengembangan pendidikan di madrasah dapat dikelola

¹¹Dadang Suhardan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h. 5.

¹²Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI. tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Depag RI., 2006), h. 11.

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut LAL, bahwa:

Keterlibatan masyarakat dilatarbelakangi dasar pemikiran bahwa kemajuan sebuah masyarakat ditentukan oleh kualifikasi dan potensi sumber daya manusia. Sumberdaya manusia yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan dengan baik dan profesional serta berkualitas unggul.¹³

Kehadiran madrasah dewasa ini tidak lepas dari peran serta dan partisipasi masyarakat yang ikut serta membangun pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan bermartabat. Namun dalam realitas perkembangannya, madrasah saat ini masih banyak mendapat sorotan negatif dari masyarakat dalam berbagai aspek, baik fisik bangunan sampai dengan kualitas lulusan yang dihasilkannya.¹⁴

Berbagai persoalan yang memiliki relevansi tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah sebagaimana yang telah disebutkan, menunjukkan adanya permasalahan kongkrit yang perlu mendapat perhatian untuk diteliti lebih lanjut di antaranya. 1) bahwa masyarakat pada umumnya masih memandang madrasah sebagai lembaga yang marginal dan memiliki kualitas lulusan yang jauh dari harapan, karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik gedung madrasah yang jauh dari harapan, fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, dan sistem pendidikan yang belum memenuhi standar pendidikan nasional. 2) partisipasi masyarakat terhadap madrasah masih sangat terbatas, sementara madrasah yang ada di kabupaten Keerom pada umumnya dikelola langsung oleh masyarakat. Permasalahan-

¹³Anshori LAL, *Tranformasi Pendidikan Islam*, h. 72.

¹⁴Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 224.

permasalahan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dalam studi ini. Hal inilah yang mendorong dan menginspirasi penulis untuk melakukan studi pada madrasah di Kab. Keerom Provinsi Papua.

Studi ini memiliki kajian yang berkaitan dan berhubungan dengan studi-studi sebelumnya. Meskipun demikian, karakteristik dan kajian studi ini belum dimiliki dan dikaji oleh studi-studi sebelumnya, khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah di daerah minoritas muslim di Kab. Keerom-Papua. Adapun studi-studi terdahulu tersebut adalah:

Pertama, Disertasi Hasyim Haddade yang berjudul: "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah: Studi Kasus pada Yayasan Keagamaan di Kabupaten Soppeng". Pada studinya dijelaskan bahwa: *Pertama*, persepsi masyarakat Soppeng bahwa madrasah masih perlu ditingkatkan dan diperdayakan. *Kedua*, beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang madrasah adalah faktor ideologis, teologis, sosiologis, akademis dan faktor ekonominya. *Ketiga*, bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah di kabupaten Soppeng diwadahi dalam empat bentuk lembaga partisipasi yaitu (1) partisipasi masyarakat dalam bentuk persatuan orang tua Murid dan Guru (POMG), (2) Partisipasi masyarakat luas (3) partisipasi masyarakat yang tergabung dalam komite madrasah dan dewan pendidikan, (4) partisipasi dalam bentuk organisasi alumni, *Keempat*, Upaya pengelolaan madrasah untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah adalah (1) memperkenalkan tipologi madrasah pada masyarakat, (2) mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk POMG, komite madrasah, dewan pendidikan, dan organisasi alumni. (3) Dengan melakukan pendekatan bahasa agama dan ideologis dan

pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu.¹⁵

Perbedaan studi Haddade dengan studi ini terdapat pada fokus studinya. Fokus studi Hasyim Haddade adalah persepsi masyarakat tentang madrasah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap madrasah, bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah, dan upaya pengelola madrasah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap madrasah di kabupaten Soppeng. Fokus studi yang dilakukan oleh penulis adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pengelolaan madrasah, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan madrasah di kabupaten Keerom Papua.

Kedua, Disertasi Abd. Rahman Halim dengan judul: "Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat (Studi terhadap Perspektif Pembinaan Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan)." Studi tersebut dilakukan pada tiga lembaga pendidikan yang ada di daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yaitu, As'adiyah di Sengkang Kabupaten Wajo, Darud Dakwah wal Irsyad Ambo Dalle (DDI-AD) di Mangkoso Kabupaten Barru, dan Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Kota Makassar. Temuan studi ini, menawarkan model kebijakan yang sesuai dengan arah pembinaan madrasah swasta ke depan, yaitu model manajemen peningkatan mutu madrasah berbasis kemandirian dan kemitraan yang partisipatif dengan upaya menggalang pihak lain untuk membangun kemitraan, agar muncul kebijakan yang partisipatif dengan semangat keberagaman dan kebersamaan menggerakkan potensi yang ada, menyelenggarakan pembinaan madrasah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dipaparkan dalam studi tersebut tentang pola pembinaan madrasah dan sejumlah kebijakan pemerintah yang menyertai pembinaan itu serta

¹⁵Hasyim Haddade, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah: Studi Kasus pada Yayasan Keagamaan di Kabupaten Soppeng", *Disertasi*. Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 2014.

studi yang mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam menunjang keberlangsungan madrasah.¹⁶

Perbedaan studi Abd. Rahman Halim dengan studi ini adalah: (1) Fokus studi Abd. Rahman Halim adalah partisipasi masyarakat yang terkait dengan pembangunan fisik (sarana dan parasarana) serta pemeliharannya, pengelolaan atau manajemen madrasah, bantuan rutin berupa dana, dan masyarakat yang memasukkan anaknya di madrasah. Fokus studi yang dilakukan oleh penulis adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pengelolaan madrasah, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan; dan (2) Setting lokasi studi yang dijadikan objek studi Abd. Rahman Halim yakni madrasah yang berada di tengah masyarakat mayoritas penganut agama Islam, sedangkan dalam studi ini madrasah yang dijadikan objek studi berada di tengah masyarakat mayoritas beragama Kristen.

Ketiga, Disertasi Aswasulasikin yang berjudul: "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendidikan di Sekolah Dasar: Studi Fenomenologi Masyarakat Desa Jerowaru Lombok Timur NTB". Pada studinya dijelaskan bahwa: *Pertama*, pendidikan di Desa Jerowaru mengalami perkembangan sejak kecamatan di Jerowaru dimekarkan sejak tahun 2001. Kondisi ini terbukti dengan dibangunnya sarana pendidikan baik SD atau madrasah (swasta) yang terbangun atas swadaya masyarakat. *Kedua*, masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. *Ketiga*, komite sekolah belum maksimal melaksanakan fungsi dan peranya sebagai *advisory agency, supporting agency, controlling agency*, dan *mediator agency*. Hal tersebut terjadi karena komite sekolah belum memahami perannya sebagai mitra kerja

¹⁶Abd Rahman Halim, "Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat (Studi terhadap Perspektif Pembinaan Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan)", *Disertasi*. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. *Keempat*, tuan guru sebagai tokoh agama dan masyarakat di Desa Jerowaru merupakan *center of solidarity* yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat, sehingga peran Tuan Guru dalam mengembangkan pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup sentral. Tuan guru membentuk yayasan yang menaungi madrasah sebagai sarana pendidikan di Desa Jerowaru. *Kelima*, partisipasi orang tua dalam pendidikan dipengaruhi oleh pemahaman orang tua tentang manfaat pendidikan dan kemampuannya memaknai partisipasi dalam pembangunan pendidikan.¹⁷

Perbedaan studi Aswasulasikin dengan studi ini terletak pada fokus studinya. Studi Aswasulasikin difokuskan pada partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Sedangkan studi ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pengelolaan madrasah, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Keempat, jurnal studi Muhammad Nasir, dkk. dengan judul: "*Effectiveness of Community Participation in Public Sector Schools of Khyber Pakhtunkhwa (2017)*." Pada studinya dijelaskan bahwa: efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah dapat ditingkatkan melalui: 1) keterlibatan pemerintah dalam sosialisasi pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah, dan 2) penyampaian tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah pada forum pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dengan masyarakat.¹⁸

¹⁷Aswasulasikin, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendidikan di Sekolah Dasar: Studi Fenomenologi Masyarakat Desa Jerowaru Lombok Timur NTB", *Disertasi*. Yogyakarta: UNY Yogyakarta, 2015.

¹⁸Muhammad Nasir, dkk., "Effectiveness of Community Participation in Public Sector Schools of Khyber Pakhtunkhwa", *Dialogue*, vol. 12 no. 4 (Oktober-Desember 2017), h. 433-440.

Kelima, jurnal studi Manas Ranjan Panigrahi dengan judul: “*School Effectiveness at Primary Levels of Education in Relation to Community Participation (2013)*”. Pada studinya dijelaskan bahwa: masyarakat harus menjadi bagian integral dari struktur organisasi sekolah yang diwujudkan dalam komite sekolah. Peran komite sekolah dalam pengembangan sekolah dapat ditingkatkan melalui pelibatan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan sekolah tentang keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, dan sebagainya.¹⁹

Keenam, jurnal studi Carmen Alvarez dengan judul: “*La Mejora de la Participación de la Comunidad en la Escuela Con Grupos Interactivos (2013)*”. Pada studinya dijelaskan bahwa: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat ditingkatkan melalui *interactive groups* (kelompok interaktif) yang diinisiasi oleh pihak sekolah dengan melibatkan orang tua siswa sebagai anggotanya. Kelompok tersebut mengimplementasikan program-program yang ditujukan pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan latar belakang anggota kelompoknya. Melalui kelompok interaktif, orang tua siswa memiliki rasa kepedulian dan kepemilikan terhadap sekolah.²⁰

Hasil kajian pustaka yang dilakukan tentang pokok masalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah di Kab. Keerom-Papua yang dilakukan penulis, belum ada yang secara spesifik melakukan pengkajian dengan fokus tersebut. Dengan demikian, studi tentang

¹⁹Manas Ranjan Panigrahi, “School Effectiveness at Primary Levels of Education in Relation to Community Participation”, *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, vol. 4 no. 2 (April 2013), h. 171-184. <http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/17.panigrahi.pdf>. (Diakses 28 November 2019).

²⁰Carmen Alvarez, “La Mejora de la Participación de la Comunidad en la Escuela Con Grupos Interactivos”, *Revista Complutense de Educación*, vol. 28 no. 3 (November 2017), h. 815-828. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n3.49857. (Diakses 28 November 2019).

partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah di Kab. Keerom-Papua secara komprehensif baru dilakukan melalui studi ini. Hasil kajian pustaka tersebut memberi keuntungan penulis sebagai berikut: *Pertama*, studi tersebut memiliki kontribusi untuk memperkaya pendekatan dalam meneliti partisipasi masyarakat terhadap madrasah, lebih-lebih fenomena partisipasi masyarakat terhadap madrasah. Beberapa referensi dan hasil studi yang telah disebutkan di atas menjadi acuan dasar dalam studi ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan dalam studi ini. *Kedua*, menghindari praktik plagiasi dalam penulisan karya ilmiah.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MUTU MADRASAH

A. *Partisipasi Masyarakat*

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Miarso mengatakan istilah “partisipasi adalah keterlibatan secara spontan baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan”.¹ Pengertian tersebut mengandung tiga gagasan yaitu keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab. Keterlibatan adalah keikutsertaan mental dan emosional yang tidak saja menunjukkan keterlibatan fisik tetapi juga keterlibatan secara mental. Kontribusi merupakan pemberian kesempatan untuk menyalurkan inspirasi dan kreativitas untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tanggung jawab merupakan keharusan seseorang untuk melakukan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tilaar, mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dinama diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.²

Menurut Puerbakawtja dalam Suryasubroto, partisipasi adalah sebuah gejala demograsi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan orang-orang yang ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka.

¹Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 706.

²H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 287.

Partisipasi dilakukan dalam bidang fisik maupun bidang material serta dalam bidang penentuan kebijaksanaan. Pengertian senada yang dikemukakan, oleh Rogers dalam Suryasubroto bahwa partisipasi sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana. Sementara itu, Davis dalam Suryasubroto mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut.³

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksana pendidikan.⁴ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena madrasah merupakan partner orang tua dalam mengantarkan cita-cita dan bentuk pribadi peserta didik sebagai agen perubahan. Artinya partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, ketrampilan dan jasa. Adapun masyarakat dalam studi ini adalah orang tua atau wali peserta didik, warga, tokoh masyarakat sekitar lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah Kab. Kerroom, dan pengusaha yang menjadi donatur di lembaga pendidikan tersebut. keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adapun partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah

³B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. II; Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), h 75.

⁴E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 167.

dicanangkan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah diperlukan agar madrasah dapat berfungsi dengan baik.

2. Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pendidikan

Berawal dari penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, di antaranya: pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini dapat memberi isyarat bahwa orang tua peserta didik dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk terlibat, yakni memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Keterlibatan yang tinggi dari orang tua peserta didik dan masyarakat dalam pendidikan di madrasah adalah ciri dari pengelolaan madrasah yang baik. Artinya sejauh mana masyarakat dapat diperdayakan dalam proses pendidikan di madrasah, dan merupakan indikator ketercapaian terhadap pengelolaan manajemen madrasah yang bersangkutan. Masyarakat, terutama para tokohnya, juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pendidikan anak. Lingkungan pertumbuhan dan perkembangan fisiologis, psikologis, religiusitas, dan sosial anak selain di rumah dan madrasah adalah di masyarakat. Allah berfirman dalam QS A<li 'Imra>n/3: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110)

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”⁵

Menurut Katsir dalam tafsirnya ayat ini bersifat umum mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2012), h. 80.

tingkatannya. Apabila ingin menjadi bagian dari umat yang terbaik, maka harus memenuhi syarat tersebut yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.⁶ Peran dan tanggung jawab menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar tidak hanya dipikul oleh guru, tetapi orang tua dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran anak salah satunya ditentukan oleh faktor determinannya, yakni pendidik yang diemban tugasnya oleh guru, orang tua, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk:

- a. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan;
- b. Terselenggaranya kerjasama yang menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan;
- c. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan;
- d. Meningkatkan kinerja madrasah, yang berarti pula meningkatkan produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses, dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.⁷

Keterlibatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat menyukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah diperlukan agar madrasah dapat berfungsi dengan baik.

⁶Tafsir Ibnu Katsir, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'ih, 2016), h. 147.

⁷Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, h. 709.

Madrasah merupakan bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat. Bahkan madrasah tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.⁸ Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan dengan mengembangkan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pemberdayaan sesuai dengan standar pendidikan nasional, dan pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Demikian juga dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumberdaya berkualitas. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite madrasah.

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite madrasah adalah lembaga yang terdiri dari unsur orang tua peserta didik, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif dari seorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi dalam menyumbangkan dana, gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi,

⁸Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 234.

menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan.

3. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya berkualitas. Tumbuhnya partisipasi aktif untuk mewujudkan pendidikan bermutu serta mandiri adalah wujud dari pengimplementasian otonomi pendidikan, pemerintah dalam hal ini adalah berfungsi sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah wujud dari dibentuknya komite madrasah.

Keberadaan dewan pendidikan dan komite madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan dipertegas dalam pasal 56 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) "Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah". Pasal 56 ayat (2) "Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis". Pasal 56 ayat (3). "Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperandalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan". Pasal 56 ayat (4) "Ketentuan mengenai pembentukan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat

(1) ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”⁹ Untuk memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2013 pasal 56 ayat (4) tersebut, pada Januari 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan pasal tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di antaranya turut membuat perencanaan sampai dengan melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di madrasah melalui organisasi komite madrasah dan dewan pendidikan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) tertanggal 25 November 2013, Nomor 90 Tahun 2013, pada pasal 46, disebutkan bahwa: (1) Komite Madrasah terdiri dari wakil orang tua peserta didik, tokoh agama/masyarakat dan tokoh pendidikan; dan (2) Komite Madrasah memberi pertimbangan dan masukan kepada pimpinan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan tentang beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, di antaranya:

- a. Pada pasal 6 disebutkan bahwa “setiap warga negara bertanggungjawab terhadap perkembangan penyelenggaraan pendidikan.”
- b. Pasal 8 disebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.”

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab XV, pasal 56.

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*, bab IX, pasal 46.

c. Pada pasal 9 disebutkan bahwa “masyarakat wajib memberi dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.”¹¹

Masyarakat mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi semakin besar.

4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, sewajarnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan.

Partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada dalam status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.¹² Sementara itu bidang kerja sama antara sekolah/ madrasah dengan masyarakat dibagi menjadi dua, yakni: bidang kerja sama dengan orang tua peserta didik dan bidang kerja sama sekolah/madrasah dengan masyarakat luas.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab IV, pasal 6, 8, dan 9.

¹²B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*, h. 77.

a. Bidang kerja sama madrasah dengan orang tua peserta didik.

1) Bidang Pengajaran

Kerja sama dalam bidang ini, dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan kemudahan belajar kepada peserta didik, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, orang tua harus membantu menjelaskan hal-hal yang belum diketahui peserta didik. Jika saja belum mengerti tugas yang dibebankan kepada anaknya orang tua bertanya kepada guru sehingga orang tua dapat membantu kelancaran belajar.¹³

2) Bidang pengembangan bakat

Peserta didik mungkin mempunyai bakat tertentu, semisal bakat seni, musik, teknik, dan sastra. Bakat tersebut perlu segerah diketahui sehingga melalui bidang studi yang sesuai dengan bakat peserta didik, guru dan orang tua peserta didik dapat bersama-sama membina dan mengembangkan bakat peserta didik tersebut.¹⁴

3) Bidang pendidikan mental

Peserta didik sering mengalami kesulitan belajar, penyebabnya bermacam-macam, misalnya kedua orang tua *broken home*, situasi yang kurang kondusif tersebut sangat mempengaruhi mental peserta didik di madrasah, menjadi pemurung, atau frustrasi.¹⁵ Oleh karena itu, kondisi seperti itu harus dihilangkan dan diusahakan agar tidak mengganggu perkembangan kepribadian peserta didik.

4) Bidang kebudayaan

Dalam madrasah peserta didik diberikan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik, tetapi di rumah iklimnya tidak mendukung, perkembangan bahasanya akan jelek. Oleh sebab itu, orang tua harus berusaha berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar situasi rumah dan madrasah

¹³E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Bandung: Deperteman Pendidikan Agama RI., 2003), h. 101.

¹⁴E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, h.101.

¹⁵E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, h. 102.

serasi. Begitu juga dalam pembinaan keberhasilan dan keindahan, hendaknya diusahakan agar peserta didik tampil serasi, berpakaian tidak harus mahal, tetapi yang penting bersih, kerja sama dalam bidang kebudayaan ini perlu lebih ditekankan pada penanaman rasa cinta terhadap budaya bangsanya.¹⁶

b. Bidang kerja sama madrasah dengan masyarakat luas

1) Bidang pendidikan olah raga

Kerja sama dalam bidang pendidikan olah raga juga merupakan hal yang sangat baik, karena manusia yang berkualitas yang dicita-citakan adalah sehat jasmani dan rohani. Pembinaan olah raga di madrasah setiap minggu hanya berlangsung beberapa jam saja sehingga waktu latihan sangat terbatas. Karena itu, hal tersebut harus dilengkapi oleh masyarakat.¹⁷

2) Bidang pendidikan kesenian

Pengembangan bakat seni peserta didik di madrasah waktunya sangat terbatas, oleh karena itu, adanya perkumpulan kesenian di masyarakat sangat membantu proses pembinaan bakat dan jiwa seni peserta didik, misalnya perkumpulan seni musik, tari, drama, lukis, dan pahat.¹⁸

3) Bidang pendidikan ketrampilan

Di madrasah peserta didik dituntut untuk memperoleh ketrampilan, misalnya komputer, bahasa Arab, bahasa Inggris, pertanian dan sebagainya. Pendidikan ketrampilan membutuhkan waktu yang lama sehingga jumlah jam di madrasah tidak mampu membuat trampil peserta didik. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerja

¹⁶B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*, h. 102-103.

¹⁷B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*, h. 64.

¹⁸ B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*, h. 64-65.

sama yang erat dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat.

Hubungan madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, serta menyalurkan kebutuhan partisipasi dalam pendidikan.

Adapun menurut Mukhtar dan Iskandar, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Finansial. Mengenai keuangan, dalam bentuk ini masyarakat di samping sumber keuangannya berasal dari pemerintah namun yang lebih diharapkan adalah swadaya masyarakat itu sendiri untuk memajukan proses belajar yang dikelola, dari masyarakat untuk masyarakat sehingga tujuan masyarakat belajar dapat dilaksanakan sesuai yang diinginkan.
- 2) Proteksi. Perlunya masyarakat belajar tidak bisa terlepas dari adanya perlindungan baik hukum maupun proses pelaksanaannya, hasil produk juga harus bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
- 3) Moral, yaitu masyarakat yang mampu membedakan tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban.
- 4) Akademis. Bentuk partisipasi ini bersifat ilmu pengetahuan yang dapat disumbangkan oleh masyarakat untuk pelaksanaan dari proses belajar dan tujuan yang diinginkan, sehingga madrasah yang diharapkan oleh masyarakat dapat bermutu.
- 5) Kurikulum. Kurikulum merupakan susunan rencana pelajaran atau perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dari kurikulum disusun dan dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat

dan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

- 6) Sumber belajar, adalah orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan, dalam hal ini bersumber dari masyarakat setempat di mana madrasah atau pendidikan dilaksanakan.
- 7) IT (Ilmu Teknologi). Untuk memenuhi tuntutan zaman. IT harus dapat menjadi partisipasi dalam pembentukan masyarakat belajar, karena dengan IT akan terlihat kemampuan pelaksanaan kegiatan madrasah masyarakat, meskipun kemampuan di bidang IT belum dapat sepenuhnya dilaksanakan namun IT dapat membantu melancarkan program kerja yang direncanakan masyarakat belajar. Kemajuan teknologi sebagai penyebab pengembangan pendidikan yang menghendaki masyarakat ikut terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri.
- 8) Kelembagaan, manajerial, Kepemimpinan yaitu bersifat lembaga yang dipimpin seorang manajer dengan tugas untuk membentuk program kerja masyarakat belajar yang diinginkan.¹⁹

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan atau proses pembangunan dalam hal ini pendidikan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi kerampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah di sebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata,

¹⁹Mukhtar dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 204-206.

misalnya uang, harta benda, tenaga dan ketrampilan, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

5. Program Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah

a. Perencanaan Program Partisipasi Masyarakat

Perencanaan menurut Kast dan Rosenzwing, dalam Salindeho adalah proses memutuskan di depan, apa yang akan dilakukan dan bagaimana. Ia meliputi penentuan keseluruhan misi, identifikasi hasil-hasil kunci, dan penetapan tujuan tertentu di samping pengembangan kebijaksanaan, program dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut.²⁰ Perencanaan berarti menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pilihan alternatif-alternatif keputusan.

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, bagaimana dan oleh siapa kegiatan tersebut dilakukan. Dengan kata lain perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan-tindakan (kebijakan) yang akan dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam proses perencanaan diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Dengan demikian perlu dipahami proses perencanaan yang berisi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tujuan perencanaan;
- 2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- 3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- 4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan

²⁰Salindeho, *Peranan Tindak Lanjut dalam Manajemen* (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 34.

- 5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.²¹

Dalam melakukan perencanaan terdapat beberapa syarat yang harus diketahui sebelumnya, yaitu:

- 1) Menentukan tujuan, yaitu sasaran spesifik dan terukur yang akan dicapai pada waktu yang akan datang.
- 2) Menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dengan menganalisis faktor terkait.
- 3) Waktu yang diperlukan untuk mewujudkannya, apakah dalam jangka panjang atau pendek.
- 4) Pengaturan pelaksanaan, yaitu bagaimana cara melaksanakan perencanaan tersebut.²²

Perencanaan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah guru sangat urgen, karena kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan. Yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan cara yang matang dari kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perlu ditentukan cara mana yang harus ditempuh dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Perencanaan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah perlu benar-benar dirumuskan agar sesuai dengan kebutuhan.

Perencanaan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah perlu melalui beberapa langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai dari suatu kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Langkah selanjutnya akan melakukan observasi dan studi terhadap informasi yang sudah dikumpulkan. Kemudian lakukan analisis dari berbagai informasi

²¹Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2015), h. 58.

²²Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, h. 65.

tersebut dan juga analisis terhadap hasil kerja masa lalu kalau tersedia. Dari hasil analisis tersebut di atas maka tentukan juga perencanaan alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 3) Identifikasi kondisi lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan, baik kondisi finansial maupun SDM, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari berbagai kondisi yang ada kemudian pelajari.
- 4) Buatlah hubungan di antara semua hal tersebut di atas dan sinergikanlah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan akan menjadi landasan operasional kerja.
- 5) Berdasarkan perbandingan terhadap alternatif yang dipilih, selanjutnya lakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Kalau memang sudah sesuai maka langkah berikutnya adalah melaksanakan perencanaan.²³

Dalam perencanaan ada beberapa sifat yang mencerminkan perencanaan yang baik jika memiliki sifat sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas;
- 2) Fleksibel, suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;
- 3) Stabilitas, setiap rencana tidak setiap kali mengalami perubahan, sehingga harus dijaga stabilitasnya;
- 4) Ada dalam pertimbangan; dan
- 5) Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.²⁴

Perencanaan yang baik melahirkan tindakan dalam memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menyusun dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam bentuk visualisasi dan formulasi dari

²³Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Perkantoran* (Cet. XVIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 76.

²⁴J. Smith, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 163.

kegiatan-kegiatan terarah yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut Hersey, perencanaan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.²⁵

Perencanaan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah sangat penting, karena program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah yang efisien tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan hasil dari perencanaan yang tepat.

Perencanaan program partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan acuan untuk melakukan tindakan sekaligus kerangka dasar untuk menunjukkan pencapaian serta informasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan Perencanaan program partisipasi masyarakat. Selanjutnya disusun strategi aksi melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan humas madrasah untuk mengatasi permasalahan dan juga untuk memelihara komunikasi dan relasi dengan publik-publik madrasah, khususnya publik strategis madrasah.

b. Pelaksanaan Program Partisipasi Masyarakat

Setelah perencanaan program Partisipasi Masyarakat, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi perencanaan program dan kegiatan. Biasanya tidak semua yang direncanakan akan bisa berjalan dengan baik. Perlu ada penyesuaian pada bagian atau komponen program dan kegiatan. Namun bukan berarti perencanaan tidak diperlukan, karena perencanaan memberi kita panduan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perencanaan sebaik apapun tidak akan bermakna bila tidak diimplementasikan atau dilaksanakan. Dalam melaksanakan rencana program partisipasi masyarakat yang

²⁵Paul Hersey, *Manajemen Perilaku Organisasi; Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Terjemahan* (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2017), h. 4.

penting yaitu rencana aksi dan pelaksanaan rencana aksi yang sudah ditetapkan. Selain itu diperlukan sumber daya yang dimiliki madrasah, seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Pelaksanaan rencana program partisipasi masyarakat berarti menjalankan berbagai tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan program partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana program akan diperlukan rencana aksi, keterlibatan pimpinan, komitmen terhadap implementasi rencana, alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana dan keterlibatan segenap warga organisasi. Komitmen kepala madrasah dan segenap warga madrasah dalam menjalankan rencana yang telah dibuat merupakan hal yang sangat diperlukan. Komitmen saja tidak memadai, tetapi harus juga didukung oleh ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program partisipasi masyarakat.

Adapun program Partisipasi Masyarakat dilakukan melalui Hubungan Madrasah dan Masyarakat (HUMAS) dan melalui komite madrasah. Berikut penjelasan secara rinci:

1) Melalui Hubungan Madrasah dan Masyarakat (HUMAS)

Hubungan madrasah dan masyarakat (HUMAS) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada point 10 yang berisi sebagai berikut : (a) madrasah/madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan; (b) warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik; (c) masyarakat pendukung madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik; (d) keterlibatan peran serta warga madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan; (e) setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan

dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan.²⁶

Hubungan masyarakat adalah bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan setiap organisasi atau lembaga untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi. Istilah Humas dikenal dengan *public relations*. Berikut ini beberapa definisi-definisi tentang Humas (*public relation*):

Menurut Nawawi, mengartikan: Humas sebagai rangkaian kegiatan organisasi/instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela.²⁷

Lebih lanjut Rex F. Harlow di dalam Rosady Ruslan memberikan definisi Humas atau Public Relations sebagai berikut: "Humas atau *Public Relations* adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama; melibatkan manajemen dalam persoalan atau permasalahan, membantu manajemen mampu menanggapi *opini public*; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif bertindak sebagai system peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan menggunakan studi serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama".²⁸

Menurut Rahmat mengemukakan bahwa: Hubungan masyarakat (Humas) atau *public relation* (PR) adalah sebuah

²⁶Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, h. 307.

²⁷Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Cet. XIII; Jakarta: PT. Gunung Agung, 2016), h. 73.

²⁸Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 16.

seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif lembaga. Sebagai sebuah profesi seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, pendidikan, meyakinkan, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi".²⁹

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kondisi yang baik dari luar dirinya. sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang yang masih ada kaitan dengannya, mulai dari saudara, anak yatim atau orang lain yang ada hubungannya. Jadi, manajemen humas pada lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan tentang komunikasi antara madrasah dengan masyarakat dengan tujuan menambah pengertian kepada masyarakat tentang proses, kebutuhan pendidikan, mendorong minat warga dan kerjasama untuk meningkatkan mutu madrasah dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Pada dasarnya menurut penulis berdasarkan definisi-definisi tentang Humas/*public relations* merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, perusahaan bahkan pemerintahan. Perannya sebagai wahana komunikasi ke dalam dan keluar. Kebutuhan dan kehadirannya tidak bias dicegah, karena Humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif.

Peran Humas di lembaga pendidikan yaitu:

- a) Membina hubungan harmonis kepada publik internal (dalam lingkungan lembaga pendidikan, seperti dosen/guru, tenaga administrasi dan peserta didik), dan hubungan kepada publik eksternal (di luar lembaga

²⁹Abdul Rahmat, *Manajemen Humas Sekolah* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 12.

pendidikan, seperti orang tua peserta didik, dan diluar lembaga pendidikan).

- b) Membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal (lembaga luar/instansi, masyarakat dan media massa) dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi hasil studi dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pihak madrasah.
- c) Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat.
- d) Berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat.
- e) Bersikap terampil dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan baik.³⁰

Hubungan madrasah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam rangka memperbaiki madrasah. Humas adalah sebuah proses penetapan kebijakan, pelayanan serta tindakan-tindakan nyata berupa kegiatan yang melibatkan orang banyak agar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki kepercayaan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.³¹

Sementara Kusumastuti mengatakan bahwa fungsi Humas meliputi:

- a) Menunjang kegiatan manajemen madrasah dan mencapai tujuan madrasah.
- b) Melayani publik dan memberikan nasehat kepada kepala madrasah untuk kepentingan umum.
- c) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari madrasah kepada publik dan menyalurkan opini publik pada madrasah.

³⁰Abdul Rahmat, *Manajemen Humas Sekolah*, h. 22.

³¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 50.

d) Membina hubungan secara harmonis antara madrasah dan publik, baik internal maupun eksternal.³²

Aktivitas Humas yaitu berusaha menyelenggarakan komunikasi timbal balik (*two-way communications*) antara perusahaan atau lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa atau sebagainya, demi kemajuan madrasah atau citra positif bagi lembaga yang bersangkutan.

Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para, guru, tenaga akademik, karyawan lembaga atau instansi yang bersangkutan. sebagai garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut, *internal public* meliputi:

- a) *Employee Relations*: Memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan guru dalam kepegawaian secara formal. Misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan sebagainya.
- b) *Human Relations*: Memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam madrasah secara informal, sebagai manusia (secara manusiawi). Pergaulan antara manusia, bukan sebagai hubungan manusia secara formal.
- c) *Labour Relations*: Memelihara hubungan antara kepala madrasah dengan komite serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah kesulitan-kesulitan yang timbul, karenanya turut melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.
- d) *Stockholder Relations, Industrial Relations*. Sesuai dengan sifat dan kebutuhan madrasah yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham.³³

³²Frida Kusumastuti, *Dasar-Dasar Humas* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 23.

Humas bertujuan antara lain untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak, (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan madrasah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh madrasah dalam menarik simpati masyarakat terhadap madrasah dan menjalin hubungan yang harmonis antara madrasah masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program madrasah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang madrasah yang bersangkutan.³⁴

Humas yang merupakan terjemahan bebas dari istilah Public Relations, keberadaan di lembaga pendidikan khususnya madrasah posisinya sangat penting karena menjadi tulang punggung dan menjadi penghubung saluran komunikasi antara madrasah dengan publik-publiknya, baik itu publik internal (guru, peserta didik dan karyawan), dan publik eksternal (orang tua peserta didik, masyarakat dan institusi luar).³⁵

Menurut Mulyasa, jika hubungan madrasah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan madrasah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang madrasah yang bersangkutan. Gambaran dan

³³B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*, h 75.

³⁴E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, h. 53.

³⁵Yosal Iriantara, *Manajemen Humas Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 35.

kondisi madrasah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua peserta didik, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran madrasah, open house, kunjungan ke madrasah, kunjungan ke rumah peserta didik, penjelasan oleh staff, peserta didik, radio dan televisi, serta laporan tahunan.³⁶

Karena proses humas itu bersifat siklikal, maka hasil evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kegiatan dan program itu kemudian menjadi masukan untuk menentukan tujuan program dan kegiatan kehumasan selanjutnya. Tahapan-tahapan seperti itu terus berlangsung selama organisasi masih ada. Perkembangan lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi juga akan mempengaruhi apa yang harus dilakukan melalui program dan kegiatan kehumasan.

Dalam pelaksanaan humas dibutuhkan media sebagai salah satu alat dan sarana humas untuk menyampaikan informasi, publikasi, dan promosi kepada publik internal dan publik eksternal suatu lembaga pendidikan. Pada umumnya ada 2 (dua) jenis media yang sering digunakan dalam kegiatan humas, yakni media internal dan media eksternal.

Media internal sasarannya ditujukan kepada peserta didik tenaga pengajar (dosen/guru), dan tenaga administrasi atau karyawan di lembaga pendidikan. Media eksternal sasarannya terdiri dari orang tua peserta didik, alumni, media industri atau usaha, instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat luas. Lebih jelasnya kedua jenis media ini akan diuraikan sebagai berikut:

a) Jenis media internal humas

Media internal sasarannya publik internal. Ada beberapa jenis media internal (ke dalam) yang sering digunakan para praktisi humas di lembaga pendidikan, antara lain:

³⁶E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, h. 51.

(1) Warta atau buletin

Warta atau buletin merupakan media cetak internal suatu lembaga pendidikan, umumnya berisi berita-berita tentang kegiatan yang dilaksanakan dan program yang akan dilaksanakan unit kerja di lingkungan lembaga pendidikan. Warta atau buletin ini diterbitkan secara berkala, ada yang bulanan dan mingguan. Warta atau buletin ini diberikan kepada tenaga pengajar dan karyawan, akan tetapi banyak juga lembaga pendidikan yang menerbitkan warta atau buletin ini dikirimkan kepada lembaga pendidikan lain.

(2) Papan informasi

Papan informasi adalah tempat menempelkan pengumuman, terkait pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan dan sosialisasi kebijakan pimpinan di lembaga pendidikan secara tertulis, seperti edaran dan sebagainya. Papan informasi bisa juga untuk menempelkan brosur atau leaflet tentang kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan, misalnya seminar atau lokakarya, penerimaan peserta didik baru dan sebagainya.

(3) Papan foto

Papan foto untuk menempelkan foto-foto kegiatan di lingkungan unit kerja lembaga pendidikan yang didokumentasikan staf humas. Papan foto hendaknya memiliki pintu dari kaca agar foto-foto tersebut tidak diambil, bentuknya bisa persegi panjang atau segi empat. Foto-foto yang dipajang sebaiknya diberi keterangan di bawah masing-masing foto agar lebih menarik dilihat. Orang yang melihat bisa mengetahui momen foto tersebut. Foto yang ditampilkan hendaknya masih aktual dan apabila sudah lebih dari dua minggu bisa diganti lagi foto baru.

(4) Spanduk dan baliho

Spanduk dan baliho merupakan media informasi internal yang ditempatkan di jalan masuk dan jalan-jalan yang strategis di lingkungan lembaga pendidikan, bisa juga di depan gedung. Spanduk bahannya terbuat dari kain atau bahan khusus yang panjang umumnya 8 sampai dengan 10 meter persegi panjang. Sedangkan baliho umumnya dibuat

dari bahan triplek atau bahan khusus dengan ukuran besar dan ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis agar bisa dibaca publik internal.

(5) Kotak saran

Dibuat untuk memperoleh dan menampung berbagai masukan dan saran dari para tenaga pengajar, peserta didik, dan karyawan tentang kebijakan lembaga pendidikan yang telah berjalan. Humas dapat menempatkan sejumlah kontrak saran di tempat-tempat tertentu yang berada di lingkungan lembaga pendidikan.

(6) Presentasi video dan slide

Perangkat audio visual dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mensosialisasikan program lembaga pendidikan kepada publik internal.

(7) Stasiun radio sendiri

Stasiun radio tepat sebagai media hubungan pimpinan dengan karyawan. Sangat strategis menyampaikan informasi tentang kebijakan lembaga, program yang akan dilaksanakan serta rubrik-rubrik siaran terkait dengan kegiatan dan membina hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan karyawan atau sesama karyawan. Perlu ada kerjasama antara humas dengan pengelola radio, supaya para staf humas bisa mengisi rubrik melalui media radio tersebut untuk lebih mengenalkan proses pendidikan, kegiatan madrasah dan kebijakan pimpinan.

(8) Kaset video dan LCD

Kaset video merupakan suatu media penyampaian pesan yang efektif, baik itu melalui rekaman terlebih dahulu maupun dalam bentuk siaran langsung. Kaset video ini merupakan hasil shooting oleh staf humas. Bisa juga hasil rekaman peristiwa dalam bentuk LCD beserta release tertulis.

(9) Komunikasi tatap muka

Komunikasi tatap muka merupakan media interpersonal antara pimpinan (pihak humas) dengan para karyawan, tenaga pengajar dan peserta didik. Misalnya ceramah, rapat bulanan, rapat koordinasi, dan sebagainya.

Komunikasi tatap muka merupakan media yang efektif, karena bisa terjadi interaksi dan *feed back* antara pimpinan dengan karyawannya.

(10) Klub sosial

Pada lembaga pendidikan yang mapan umumnya terdapat klub-klub sosial atau olahraga yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Secara berkala klub sosial semacam itu perlu mengadakan berbagai acara, termasuk mensponsori aneka kegiatan sosial, antara lain guna mempererat hubungan antara pihak pimpinan dengan para karyawan, guru, dan peserta didik.

b) Jenis media eksternal humas

Media eksternal sasarannya publik eksternal (ke luar). Guna menjangkau khalayak tertentu untuk mencapai tujuan humas. Ada kalanya penggunaan media massa pers, radio, televisi tidak sesuai, apalagi jika khalayak tersebut hanya terdiri dari beberapa kelompok kecil saja. Karena itu sangat dibutuhkan adanya media humas eksternal yang berfungsi memberikan informasi dan penyampaian komunikasi kepada pihak atau lembaga luar. Media komunikasi eksternal itu sendiri memiliki berbagai bentuk antara lain:

(1) Jurnal eksternal

Jurnal eksternal tidak harus diartikan semata-mata sebagai suatu bentuk terbitan tentang suatu lembaga pendidikan yang dibagikan kepada pihak-pihak luar. Pihak luar tidak akan tertarik dengan masalah-masalah yang dihadapi suatu organisasi. Apalagi dewasa ini pilihan bacaan sudah sedemikian banyak termasuk majalah-majalah prestisius.

(2) Media audio visual

Perangkat audio visual merupakan suatu media yang cakupannya terbatas yang dimiliki dan sepenuhnya dikendalikan pihak tertentu diarahkan kepada khalayak yang bersifat terbatas pula. Para praktisi humas dapat memanfaatkan CD untuk merekam dan mendokumentasikan berbagai peristiwa. Kalau dibuat dengan baik dan menarik, kaset video yang berisikan pesan-

pesan humas itu bisa pula dipertontonkan di gedung-gedung atau dipancarkan secara luas melalui stasiun-stasiun televisi umum.

(3) Pameran

Kegiatan pameran merupakan pelaksanaan fungsi humas melalui penyelenggaraan pameran atau ekshibisi. Pada umumnya, pameran dagang atau pameran yang terbuka untuk umum merupakan suatu media iklan.

(4) Seminar atau konferensi

Guna menunjang penggunaan berbagai macam media yang diuraikan, ada baiknya jika suatu lembaga pendidikan menyelenggarakan suatu pertemuan khusus untuk khalayak. Tujuan kegiatan ini menyampaikan presentasi ke orang-orang tertentu. Sebaiknya acara ini dibuat sesantai mungkin tanpa diembel-embeli dengan pesan penjualan atau pameran dagang.

(5) Sponsor

Sponsor adalah penyediaan dukungan finansial untuk suatu acara, subyek, kegiatan, lembaga atau individu yang dianggap memang pantas menerimanya. Penyediaan dana penunjang usaha humas, pada dasarnya merupakan bentuk modern dari *patronage* yang disajikan pihak yang makmur dan kuat.

(6) Media cetak

Media ini bersifat komersial, misalnya surat kabar harian, tabloid, majalah berita atau hiburan yang diterbitkan secara berkala mingguan atau bulanan, tersebar luas dan dibaca oleh masyarakat.

(7) Media elektronik

Media elektronik seperti stasiun radio dan televisi, baik milik pemerintah maupun swasta komersial dan radio swasta niaga lain yang mempunyai pendengar atau pemirsa dalam jumlah besar.

(8) *Special event* (kegiatan khusus dalam humas)

Adalah menyelenggarakan acara atau kegiatan khusus humas yang merupakan kiat menarik perhatian dari media pers dan publik terhadap perusahaan atau produk

tertentu yang ingin ditampilkan melalui aktivitas even spesial itu sendiri. Tujuan diselenggarakan *special event* antara lain: a) dapat memuaskan pihak lain yang terlibat atau terkait berperan serta dalam cara khusus tersebut, b) meningkatkan pengetahuan dan pengenalan, c) upaya pemenuhan selera dan menarik simpati atau empati, d) mampu menumbuhkan saling pengertian kedua belah pihak, dan e) menciptakan citra positif dari masyarakat atau publik sebagai target sasarannya.

(9) Media internet

Sekarang ini internet selalu digunakan lembaga pendidikan sebagai sarana informasi dan publikasi kepada masyarakat luas. Kelebihan warta di internet setiap minggu berita tentang peristiwa dan kejadian di lembaga pendidikan bisa diganti dengan yang lebih baru dan aktual.³⁷

Kegiatan humas yang sebenarnya senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Segala program humas baik itu program yang berjangka panjang maupun program yang berjangka pendek harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati sedemikian rupa sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata.³⁸

Humas merupakan fungsi manajemen, sehingga apa yang dilakukan melalui program/kegiatan kehumasan adalah untuk menunjang pencapaian tujuan madrasah dan perwujudan visi madrasah. Konsekuensi biaya yang dikeluarkan untuk program/kegiatan kehumasan merupakan bagian dari belanja madrasah untuk mencapai tujuannya, sehingga bukan biaya untuk mempublikasikan kegiatan. Tidak semua kegiatan kehumasan akan berkaitan dengan publikasi madrasah. Karena humas terfokus pada kegiatan menjalin komunikasi dan mengembangkan relasi

³⁷B. Suryasubroto, *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*, h. 85-86.

³⁸Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 75.

dengan publik-publik madrasah untuk mewujudkan program partisipasi masyarakat.

Humas merupakan sasaran untuk mencapai tujuan. Humas, misalnya membantu madrasah untuk mewujudkan tujuan-tujuan strategisnya. Dengan bantuan humas, madrasah lebih memungkinkan untuk mewujudkan visi dan misinya karena madrasah bisa berkomunikasi secara efektif untuk membangun relasi yang memberikan kemaslahatan pada madrasah dan publik-publiknya.

2) Melalui kegiatan komite madrasah

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa komite madrasah adalah sebaga lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dana memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.³⁹

Hasbullah mengutip Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2000, konsep mengenai komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra madrasah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.⁴⁰

Komite madrasah adalah wadah atau organisasi kerjasama orangtua peserta didik, tokoh masyarakat, kepala madrasah, dan guru yang tidak bersifat mencari keuntungan dan berperan dalam peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerjasama.

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab XV, pasal 56.

⁴⁰Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 70.

Secara umum, komite madrasah bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat khususnya orangtua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Komite madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing tetapi sebagai mitra yang harus saling bekerja sama. Dibentuknya komite madrasah pasti mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan komite madrasah adalah:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁴¹

Pada dasarnya posisi komite madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua peserta didik, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak madrasah sebagai institusi, kepala madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lain. Peran komite madrasah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

Tujuan komite madrasah adalah agar terdapat organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen, loyalitas, dan peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah. Meskipun komite madrasah yang ada di setiap satuan pendidikan memiliki tujuan awal yang sama, tetapi hal tersebut tidak menjadikan karakteristik komite madrasah di setiap madrasah sama, melainkan harus disesuaikan dengan budaya, kesepakatan, dan budaya masyarakat dimana komite madrasah tersebut berada. Oleh

⁴¹Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), h. 81.

karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa komite madrasah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di madrasah dengan melibatkan masyarakat. Keikutsertaannya bersifat kompleks, meliputi pendanaan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan manajemen madrasah.

Komite madrasah sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi masyarakat, memiliki peran yang penting. Peran komite madrasah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga kerja dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁴²

Apabila komite madrasah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa komite madrasah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran komite madrasah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pantjastuti menjelaskan fungsi komite madrasah sebenarnya merupakan penjabaran dari peran komite

⁴²Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, h. 93.

madrasah tersebut. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa peran komite madrasah antara lain:

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai; (a) kebijakan dan program pendidikan; (b) RAPBS; (c) kriteria tenaga kependidikan; dan (d) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 2) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- 3) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- 6) Melakukan kerja sama dengan masyarakat.⁴³

Dari penjelasan tentang peran dan tugas komite madrasah, dapat dikatakan bahwa komite madrasah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator atas yang dilakukan oleh madrasah. Keempat peran tersebut memiliki indikator kinerja yang berbeda, disesuaikan dengan bentuk peranan yang sedang dilakukan oleh komite madrasah.

Setiap organisasi pasti memerlukan suatu ketentuan yang mengatur tentang kepengurusan, keanggotaan, peran, dan fungsinya serta ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART termasuk komite madrasah. Secara umum kepengurusan komite madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi komite madrasah yang sudah dibentuk di tiap-tiap madrasah pada umumnya.

⁴³Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, h. 83.

Supaya tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, maka perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan kapan komite madrasah, dewan pendidikan, dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak. Besarnya peran orang tua dan masyarakat berpartisipasi melalui badan ini dalam mengelola madrasah implementasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan menurut selera orang-orang yang ada dalam badan tersebut.⁴⁴

Disebutkan di dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah, bahwa mekanisme kerja pengurus komite madrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus komite madrasah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD/ART.
- 2) Pengurus komite madrasah menyusun program kerja dengan focus utama untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
- 3) Apabila dalam masa jabatannya pengurus komite madrasah dinilai tidak produktif, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan atau mengganti dengan kepengurusan baru.
- 4) Pembiayaan diambil dari anggaran komite madrasah yang ditetapkan melalui musyawarah.⁴⁵

Pembentukan pengurus komite madrasah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Secara transparan, komite madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, proses sosialisasi, kriteria calon anggota, seleksi calon anggota, pemilihan, dan sosialisasi hasil pemilihan. Secara akuntabel, panitia

⁴⁴Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 240.

⁴⁵Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, h. 97.

pemilihan pengurus komite madrasah hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan dana kepanitiaan. Demokratis mempunyai makna bahwa dalam proses pemilihan pengurus komite madrasah dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pantjastuti mengutip Kepmendiknas 44 tahun 2002 disebutkan bahwa pengurus komite madrasah terdiri atas:

- 1) Perwakilan orangtua atau wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis;
- 2) Tokoh masyarakat;
- 3) Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- 4) Pejabat pemerintah setempat;
- 5) Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, dan asosiasi);
- 6) Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan;
- 7) Organisasi profesi tenaga guru.⁴⁶

Pantjastuti mengutip keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 menjelaskan tentang kepengurusan komite madrasah yang ada pada tiap satuan pendidikan. Jumlah pengurus komite sekurang-kurangnya Sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil. Untuk jabatan ketua komite madrasah, bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Sedangkan syarat-syarat, hak, dan kewajiban masa kepengurusan Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan komite madrasah.⁴⁷

⁴⁶Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, h. 102.

⁴⁷Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, h. 105.

Melalui struktur komite madrasah peran serta masyarakat memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan madrasah dicerminkan dalam peran serta masyarakat dalam hal-hal berikut: (a) membangun sikap kepemilikan madrasah, (b) merumuskan kebijakan madrasah, (c) membangun kesadaran mutu, (d) perhatian terhadap kehidupan akademik madrasah, (e) membangun tatakerja kelembagaan madrasah.⁴⁸

Dalam upayanya memenuhi layanan belajar yang memuaskan, maka aspirasi masyarakat melalui komite madrasah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja madrasah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan dan program-program prioritas madrasah. Dengan cara demikian, setiap madrasah akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang direfleksikan dalam rumusan visi, misi, program prioritas dan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan madrasah.

c. Pengawasan Program Partisipasi Masyarakat

Pengawasan atau *controlling* menurut Andair sebagaimana dikutip oleh John Salindeho diartikan dengan pengendalian yang memberi arti mencek dan mengarahkan tindakan begitu pekerjaan dimulai untuk menerapkan rencana.⁴⁹ Maksud dengan *controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nilai pengawasan sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat beberapa motivasi dalam kegiatan kepengawasan, sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Fajr (89): 14.

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (١٤)

⁴⁸Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi Konsep dan Aplikasi*, h. 51.

⁴⁹Salindeho, *Peranan Tindak Lanjut dalam Manajemen*, h. 34.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.⁵⁰

Menurut Katsir dalam tafsirnya ayat di atas mempertegas bahwa Allah senantiasa mengawasi hambanya, atas apa yang mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan usahanya.⁵¹ Pengawasan merupakan segenap bantuan yang ditujukan kepada perbaikan-perbaikan dan pembinaan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah yang lebih luas maka pengawasan meliputi semua fungsi dan masalah yang ada sangkut pautnya dengan program partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut Smith, pengawasan berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.⁵² *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah untuk menjamin agar supaya semua program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada umunya kegiatan *controlling* sebagai berikut:

- a) Berupaya memperbaiki pengarahan sesuai dengan petunjuk pengawasan.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 593.

⁵¹Tafsir Ibnu Katsir, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, h. 339.

⁵²J. Smith dengan judul *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Cet. VIII; Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 395.

- b) Membandingkan hasil- hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- c) Menilai hasil pekerjaan dengan standard hasil kerja.
- d) Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- e) Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
- f) Memindahkan data secara terperinci agar dapat terlihat perbandingan dan penyimpangan-penyimpangannya.
- g) Membuat saran tindakan-tindakan perbaikan jika dirasa oleh anggota.
- h) Memberitahu anggota-anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.
- i) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.⁵³

Adapun kegiatan pengawasan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah adalah kegiatan memastikan atau melihat pekerjaan bahwa sasaran dan hal yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan atau target. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Attaubah/9: 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

Terjemahnya:

Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.⁵⁴

Menurut Katsir dalam tafsirnya ayat ini menegaskan bahwa amal perbuatan manusia akan ditampakkan kepada Allah.⁵⁵ Pada intinya pengawasan dalam arti manajemen

⁵³Salindeho, *Peranan Tindak Lanjut dalam Manajemen*, h. 34.

⁵⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 298.

⁵⁵Tafsir Ibnu Katsir, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, h. 259.

yang diformalkan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan sebelumnya. Pengawasan tidak dapat terjadi dalam sebuah vakum. Ia berkaitan dengan dan merupakan bagian dari pada *output* ketiga macam fungsi fundamental manajemen lainnya (perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan).

d. Evaluasi Program Partisipasi Masyarakat

Akhirnya dalam program partisipasi masyarakat dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan tahapan dalam proses humas ini. Evaluasi bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan bagian dari langkah melakukan perbaikan. Karena melalui evaluasi inilah kita bisa menentukan apakah program partisipasi masyarakat yang dilakukan itu mencapai tujuan yang ditetapkan. Bila tidak, apa langkah perbaikan yang harus dilakukan? Bila sesuai dengan apa yang diinginkan, bagaimana hal tersebut bisa diterapkan untuk program dan kegiatan yang lainnya.

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*", yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan.⁵⁶

Evaluasi program bisa dipandang sebagai "proses yang terstruktur yang melahirkan dan memadukan informasi yang sengaja dikumpulkan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian pada para stakeholder tentang kebijakan atau program tertentu". Sedangkan program sendiri bermakna sebagai sejumlah kegiatan yang saling berhubungan yang sengaja dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai satu tujuan atau lebih.⁵⁷

⁵⁶M. Chabib Thaha, *Teknik Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

⁵⁷Yosal Iriantara, *Manajemen Humas Sekolah*, h. 172.

Dalam evaluasi tentu akan ditemukan kekeliruan dan kesalahan, namun tujuannya bukan untuk menyalahkan orang lain melainkan untuk bersama-sama memperbaiki kekeliruan dan kesalahan tersebut. Perbaikan itu dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan bisa mewujudkan tujuan program dan kegiatan serta mewujudkan tujuan institusi pendidikan.

Temuan evaluasi itu dapat dipergunakan untuk:

- 1) Memperbaiki kegiatan dan program yang dilaksanakan sehingga bisa ditetapkan bagaimana tindakan yang terbaik untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut,
- 2) Menilai efektivitas kegiatan atau program, yang berkaitan dengan akuntabilitas serta kendali mutu kegiatan dan program,
- 3) Melahirkan pengetahuan baru karena kita mengetahui bagaimana dan mengapa program atau kegiatan berjalan.⁵⁸

Evaluasi program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu rangkaian kegiatan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah. Sanjaya mengemukakan bahwa:

- 1) Evaluasi harus dilaksanakan terhadap semua aspek program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.
- 2) Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus, dengan menekankan kepada evaluasi bukan hanya untuk mengumpulkan informasi tentang hasil program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah yang telah dicapai akan tetapi juga bagaimana program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah bisa berkembang.
- 3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penilaian

⁵⁸M. Chabib Thaha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, h. 18.

- 4) Evaluasi harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan semua *stakeholder* pendidikan di madrasah sebagai evaluator.⁵⁹

Evaluasi program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah merupakan kegiatan pengumpulan secara sistematis untuk menetapkan keberhasilan dalam kegiatan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah dan menetapkan sejauh mana tingkat keberhasilan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah untuk memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan dan kebijakan berikutnya.

Hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk:

- 1) Membangun pemahaman dan pemaknaan bersama, melalui komunikasi yang berlangsung di antara anggota tim akan terbentuk pemahaman dan pemaknaan terhadap apa yang dikerjakan,
- 2) Mendukung dan memperkaya program atau kegiatan, karena di dalamnya ada proses membangun trust yang mungkin berlangsung tanpa disadari, dan
- 3) Mendukung pengembangan sumber daya manusia dan organisasi karena ada proses berpikir dan berinteraksi di antara sesama anggota tim selama menjalankan kegiatan.⁶⁰

Evaluasi program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena pengawasan bertujuan mengembangkan iklim yang kondusif dan lebih baik dalam kegiatan program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah, karena tujuan evaluasi membantu

⁵⁹Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 152.

⁶⁰Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 193.

dan memberikan kemudahan kepada para pelaku program partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.

B. Pengembangan Mutu Madrasah

Masalah pokok yang dihadapi oleh madrasah adalah di antaranya:

- a. Rendahnya kemampuan manajerial kepala madrasah, mencakup; kurang mampu mengembangkan inovasi pendidikan, kurang menguasai prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis madrasah, kurang mampu mendayagunakan sumber daya, lemahnya sistem administrasi dan keuangan, serta kurangnya monitoring dan evaluasi capaian hasil pendidikan.
- b. Rendahnya kualitas tenaga pengajar mencakup: guru pengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (*75% mismatch*) guru kurang menguasai materi, guru kurang menguasai metodologi pengajaran yang efektif, kurang menguasai media dan alat pembelajaran, guru kurang mengakses buku-buku dan pengetahuan baru, guru kurang mampu mengoperasikan komputer sebagai alat pendukung tugas pokok dan fungsi guru, dan rendahnya insentif.
- c. Rendahnya dukungan masyarakat, mencakup: kurang partisipasi masyarakat dalam program peningkatan mutu pendidikan madrasah, belum fungsionalnya komite madrasah, lemahnya tingkat ekonomi masyarakat pengguna madrasah.⁶¹

Permasalahan lain yang timbul dalam sistem pendidikan Islam (madrasah) antarlain:

- a. Aspek komponen madrasah, meliputi: visi, misi, dan tujuan yang tidak memiliki fokus, kualifikasi dan kompetensi guru yang belum standar, tenaga kependidikan kurang memiliki *skill* dalam tugas pokok

⁶¹Kementerian Agama RI., *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 18.

- dan fungsinya, input peserta didik yang heterogen, kurikulum yang tunjang tindih dan mengulang-ulang, metode dan strategi pembelajaran yang monoton sehingga membosankan guru dan peserta didik, sarana dan prasarana belajar yang tidak mencukupi kebutuhan, lingkungan belajar kurang kondusif, evaluasi belajar yang masih kognitif *oriented*, lulusan yang tidak siap pakai,
- b. Aspek politik pendidikan, meliputi: kebijakan yang tidak adil, anggaran pendidikan yang melum menjadi prioritas, data saing bangsa masih lemah, serta menjamurnya lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan standar mutu.
 - c. Aspek manajemen pendidikan, meliputi: perencanaan tidak berbasis data dan standar mutu, pengorganisasian sumber daya yang tidak optimal, pelaksanaan program tidak berdasarkan rencana strategis, dan pengawasan mutu tidak berkelanjutan.
 - d. Aspek IPTEK, meliputi: pemanfaatan jaringan teknologi informasi sangat sederhana, hasil-hasil studi kurang dipublikasikan dengan baik.⁶²

Permasalahan di atas, merupakan kegagalan sistem yang memerlukan perubahan kebijakan dengan implikasi manajemennya adalah hal tersebut harus dihilangkan dan sistem serta prosudurnya harus disusun, ditetapkan dan dikembangkan kembali. Selain gagasan sistem, sebab-sebab kegagalan lainnya adalah prosudur dan aturan yang tidak diikuti dan ditaati serta adanya kegagalan komunikasi dan masalah-masalah di dalam internal madrasah.

Sedangkan pada sebagian madrasah swasta masih sangat tergantung pada uran dana dari Kementerian Agama, tetapi secara keseluruhan madrasah swasta telah mandiri dan tidak bergantung pada dana kemenag. Justru dengan adanya program madrasah gratis, keberadaan madrasah swasta semakin tergantung dengan dana BOS dari

⁶²Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), h. 52-53.

pemerintah. Program madrasah gratis telah menghipnotis masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa semua madrasah harus gratis. Sementara dana BOS yang ada kurang bisa memenuhi penyelenggaraan pendidikan. Inilah program yang dianggap telah menurunkan tingkat kemandirian madrasah maupun madrasah swasta.

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu madrasah tersebut, tentulah diperlukan perencanaan dan langkah-langkah operasional secara bertahap, selanjutnya hasil pelaksanaan kegiatan tersebut harus dievaluasi secara periodik untuk mengetahui pencapaian target dan perkembangan yang terjadi pada kelembagaan pendidikan tersebut. Karena itu para pengelola lembaga pendidikan Islam (madrasah) perlu merenungkan kembali firman Allah dalam QS Al-Hasyr/59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(18)

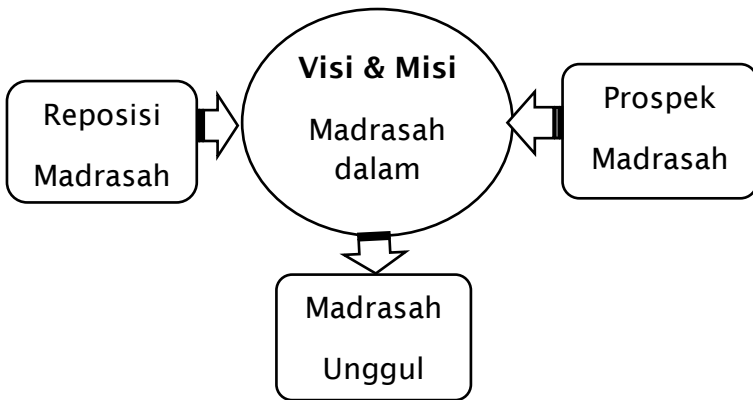
Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri (individu) melakukan nazar terhadap segala sesuatu (ide, konsep dan rencana kerja) yang telah diajukan atau ditawarkan untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pemberi kabar terhadap prestasi kerjamu”.

Dalam konteks ini, menurut Muhaimin, Melakukan nazhar dapat berarti *at-taamul wa al-fahsh*, yakni melakukan perenungan atau menguji dan memeriksanya secara cermat dan mendalam; dan bisa berarti *taqlid al-bashar wa al-bashirah li idrak al-syai'i wa ru'yatihi*, yakni melakukan perubahan pandangan (cara pandang) dan cara penalaran (karangka pikir) untuk menangkap dan melihat sesuatu.⁶³

⁶³Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 288.

Pendidikan madrasah dikembangkan dengan mengacu pada visi dan misi yang berdasarkan pada prinsip, nilai-nilai normatif, religius, filosofis yang diyakini kebenarannya, (2) lingkungan strategis, (3) sejumlah isu strategis bangsa. Menurut Tilaar, Konseptual dan prospek dalam pengembangan madrasah memasuki era global sebagai berikut.



Gambar: 1. Kerangka Konseptual Reposisi dan Reaktualisasi Madrasah.⁶⁴

Sedangkan untuk landasan dalam pengembangan visi dan misi madrasah, sebagai berikut:

- a. Visi makro madrasah, yaitu “ terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-amaliyah, trampil dan profesional”. Sedangkan visi mikro, yakni “terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah diniyah, dan profesional sesuai dengan tatanan kehidupan.
- b. Misi madrasah, yakni; (a) menciptakan calon agamawan yang berilmu, (b) menciptakan calon imuan yang

⁶⁴Konsep dari Tilaar tersebut telah dimodifikasi oleh penulis. Lihat lebih jelas pada buku HAR. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, h.166.

beragama, (c) menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis.⁶⁵

Dalam tataran praktis pada pendidikan madrasah, ada beberapa prinsip dasar yang akan menjadi acuan dalam pengembangan madrasah, antara lain:

- a. Membangun prinsip kesetaraan, yakni antara sektor pendidikan madrasah dengan sektor pendidikan di luar madrasah, dan sektor-sektor lainnya.
- b. Prinsip perencanaan pendidikan. Yakni dituntut cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya.
- c. Prinsip rekonstruksionis, yakni bahwa pendidikan madrasah mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih berorientasi masa depan dengan berpijak pada kondisi sekarang.
- d. Prinsip pendidikan yang berorientasi pada peserta didik, yakni dalam pelayanan pendidikan mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik baik secara umum maupun spesifik.
- e. Prinsip pendidikan multibudaya, yakni sistem pendidikan harus mampu memahami masyarakat yang bersifat plural.
- f. Prinsip pendidikan global, yakni mampu berperan dalam menyiapkan peserta didik dalam konstalasi masyarakat global.⁶⁶

Sedangkan konsep perkembangan madrasah dikembangkan memakai teori *sosial-reconstructivisme*. Dengan filosofi kebijakan sosial (*social-policy*) untuk menggantikan filosofi kebijakan publik (*public-policy*).⁶⁷

⁶⁵Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 29.

⁶⁶Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, h. 30.

⁶⁷Teori rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis dan sejenisnya. Tujuannya untuk peradaban manusia masa depan. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930, ingin membangun

Landasan filosofi kebijakan sosial berangkat dari pengakuan bahwa siapa pun memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-masing untuk menentukan arah dan mutu yang dikehendaki.

C. Mutu Pendidikan

Menurut Tampubolon mutu sebagai panduan sifat-sifat produk, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan.⁶⁸

Dalam dunia pendidikan peningkatan mutu sebagai agenda utama dalam proses pendidikan menurut konsep mutu sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa.⁶⁹

Sedangkan kata pendidikan menurut Coser: "*Education is the deliberate, formal transfer of knowledge, skill and values from one person to another*".⁷⁰ Dalam Webster bahwa: "*education is the process of training and developing the knowledge, skill, mind, character etc especially by formal schooling*".⁷¹

masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Pola pikir yang ditawarkan yakni meyakini *problem solving* dengan penyelesaian problem sosial yang signifikan. Berpikir tentang tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang, pendidikan berdasar fakta, *learning by doing* (belajar sambil bertindak) lihat Zuhairi, *Filsafat Pendidikan Islam*, h. 30.

⁶⁸Daulat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-21* (Cet. XI; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 77.

⁶⁹Sallis, *Total Quality Management in Education*, alih bahasa Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi (Yogyakarta: IRCISOD, 2016), h. 98.

⁷⁰Coser at all., *Introduction to Sociology* (Cet. VIII; Florida: Harcourt Brace Javanovich, Inc, 2003), h. 380.

⁷¹Webster's, *New World Dictionary* (Cet. XI; New York: The World Publishing Coy, 2002), h. 461.

Good mengemukakan: (1) *pedagogy is the art, practice, or profession of teaching*; (2) *the systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance; largely replaced by the term education*.⁷²

Pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*⁷³ dan dalam bahasa Arab ditemukan penyebutannya dalam tiga kata, yakni *al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib* yang secara etimologis kesemuanya bisa berarti bimbingan dan pengarahan. Kata *al-tarbiyah* dalam *Lisan al-Arab*, berakar dari tiga kata, yakni; *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh; *rabiya-yarba>* yang berarti menjadi besar, dan *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki.⁷⁴

Definisi pendidikan yang secara global kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan definisi-definisi baru, yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Definisi pendidikan dengan seluruh totalitas-nya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi term *al-tarbiyah*, *al-ta'li>m* dan *al-ta'dib*, yang harus dipahami secara bersama-sama.

Dari ketiga term tersebut, term yang paling populer digunakan dalam pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*, sedangkan term *al-ta'li>m* dan *al-ta'di>b* jarang sekali digunakan. Walaupun demikian, dalam hal-hal tertentu, ketiga term tersebut memiliki kesamaan makna, namun secara esensial setiap term tersebut terdapat perbedaan,

⁷²Carter V. Good, *Dictionary of Education* (Cet. VII; New York: Mc. Graw Hill Book Company, Inc, 2001), h. 387.

⁷³John Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: Gramedia, 2000), h. 81.

⁷⁴Jama>l al-Di>n Ibn Manzu>r, *Lisa>n al-'Arab*, jilid I (Mesir: Da>r al-Mishriyyah, t.th), h. 384 dan 389. Luwis Ma'lu>f, *al-Munjid fi al-Lugah wa A'la>m* (Cet. XXVII; Bairu>t: Da>r al-Masyriq, 1997), h. 243.

baik secara tekstual maupun kontekstual. Karenanya, perlu dikemukakan uraian dan analisis terhadap ketiga term pendidikan tersebut dengan beberapa argumentasi tersendiri dari beberapa asumsi para ahli pendidikan Muslim.

a. Term *al-Tarbiyah*

Penggunaan term *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabb*, kata kerja *rabb* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad saw., seperti terlihat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam al-Qur'an, kata ini digunakan dalam QS Al-Syu'ara>' /26: 18.

قَالَ أَلَمْ نُزَكِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَكَيْتَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ (18)

Terjemahnya:

Berkata Fir'aun kepada (Nabi Musa) bukankah kami telah mengasuhmu (mendidikmu) dalam keluarga kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.⁷⁵

Kata *al-tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu: *Pertama*, *rabba-yarbu* yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. *Kedua*, *rabiya-yarba* yang berarti menjadi besar. *Ketiga*, *rabba-yarubbu* berarti memperbaiki, menguasai urusan, memuat, menjaga, dan memelihara.⁷⁶

Uraian tersebut, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai pendidik seluruh ciptaan-Nya termasuk manusia. Dalam konteks yang luas definisi pendidikan yang terimplikasi dalam term *al-tarbiyah*, terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu:

⁷⁵Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 574.

⁷⁶Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat* (Cet. XII; Bandung: Diponegoro, 2012), h. 31.

- 1) Memelihara dan menjaga fitrah anak menjelang dewasa (balig).
- 2) Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan.
- 3) Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan.
- 4) Melaksanakan pendidikan secara graduasi.⁷⁷

Arti *al-tarbiyah* menunjukkan bahwa hakikat pendidikan adalah proses pertumbuhan anak. Pendidikan mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang, dan pendidikan memelihara, dan menjaga anak.

Kata *tarbiyah* lebih tepat digunakan dalam mengkonotasikan pendidikan menurut ajaran Islam yang merupakan kegiatan yang memiliki target, tujuan dan sasaran dan pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang, peningkatan kegiatan, dan pengajaran selaras dengan urutan juga sistematika menanjak yang membawa anak didik dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya.

b. Term *al-Ta'li>m*

Al-Ta'li>m telah digunakan sejak priode awal pelaksanaan pendidikan. Rasyid Ridha mendefinisikan yang dikutip oleh Syamsul Nizar bahwa *al-ta'li>m* merupakan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.⁷⁸

Argumen ini didasarkan dengan merujuk pada QS al-Baqarah/2: 151.

... وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)

Terjemahnya:

⁷⁷Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, h. 32.

⁷⁸Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 27.

...Mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.⁷⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengajarkan *tilawah* al-Qur'an kepada kaum muslimin. Dengan berdalihkan argumen Rasyd Ridha, dapat diasumsikan bahwa secara implisit, makna *al-ta'lim* tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriyah, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan (sains) dan skill yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan, dan pedoman untuk berperilaku.⁸⁰

Kata *al-ta'lim* menurut al-Fattah, adalah lebih universal dibanding dengan *al-tarbiyah* dengan alasan bahwa *al-ta'lim* berhubungan dengan pemberian bekal pengetahuan. Pengetahuan ini dalam Islam dinilai sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi.⁸¹

Pendidikan dengan makna *al-ta'lim* menurut Ridha adalah sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.⁸² Argumentasinya merujuk pada QS al-Baqarah/2: 151.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)

Terjemahnya:

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-

⁷⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 38.

⁸⁰ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, h. 27.

⁸¹ Abd al-Fattah Jala'ih, *Min Usju' al-Tarbawiy fi al-Islam* (Cet. XV; Kairo: Markaz al-Duwal li al-Tal'lim, 2003), h. 17.

⁸² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Tafsir al-Manar*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 262

Hikmah (as-Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang kamu ketahui.⁸³

Menurut Jalal bahwa kalimat *wayu'allimumum al-kita>b wa al-hikmah* bahwa aktivitas Rasulullah tidak hanya sekedar membuat umat Islam bisa membaca, tetapi mengantar kaum muslim kepada nilai pendidikan *tazkiyah an-nafs* (pensucian diri) dari segala kotoran, sehingga memungkinkan dapat menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui.⁸⁴

Al-ta'li>m tidak hanya terbatas pada pengetahuan lahiriyah, tetapi juga mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku.

c. Term *al-Ta'di>b*

Al-Attās menyatakan bahwa *al-tarbiyah* terlalu luas pengertiannya, tidak hanya tertuju pada pendidikan manusia, tetapi juga mencakup pendidikan untuk hewan. Sehingga dia lebih memilih penggunaan kata *al-ta'dib* karena kata ini menurutnya, terbatas pada manusia.⁸⁵

Al-Attas mendefinisikan *al-ta'di>b* yang dikutip oleh Nizar bahwa, *al-ta'di>b* merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri anak tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptanya. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya.⁸⁶

⁸³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

⁸⁴Abdul Fattah Jalal, *Azas-azas Pendidikan Islam*, Terj. Hary Noer Ali (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), h. 29-30.

⁸⁵Muhammad Naquib al-Atta>s, *Aims and Objective of Islamic Education* (Jeddah: King Abd. al-Azi>z, 1999), h. 52.

⁸⁶Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, h. 30.

Al-Attas mengemukakan bahwa pendidikan dengan kalimat *al-ta'dib* adalah yang paling tepat. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

87 (رواه العسكري) أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي.

Artinya:

Tuhan telah mendidiku, maka ia menyempurnakan pendidikanku (HR. al-Askary).

Kata *addaba* pada hadis di atas menurutnya berarti "mendidik" bisa juga dimaknai kepada Tuhanku telah membuatku mengenal dan mengakui dengan adab yang dilakukan secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diriku dan telah membuat pendidikanku yang paling baik.⁸⁸

Kata *al-ta'dib* lebih mengacu pada aspek pendidikan moralitas (adab), sementara kata *al-ta'lim* lebih mengacu pada aspek intelektual (pengetahuan), sedangkan kata *tarbiyah*, lebih mengacu pada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan pembentukan kepribadian.

Uraian tersebut kelihatannya term *al-tarbiyah* menunjuk pada arti yang lebih luas, karena di samping mencakup ilmu pengetahuan dan adab, juga mencakup aspek-aspek lain yakni pewarisan peradaban sebagaimana yang dikatakan al-Ahwaniy bahwa pada dasarnya, term *al-tarbiyah* mengandung makna pewarisan peradaban dari generasi ke generasi).⁸⁹

Al-Abrāsy menyatakan bahwa *al-tarbiyah* mengandung makna kemajuan yang terus menerus

⁸⁷Ahmad Mu'az Haqqi, *al-Arba'u>na Hadi>s}an fi> al-Akhla>q Ma'a Syarh}iha>*, Terj., Abu Azka dengan judul: *Syarah 40 Hadis tentang Akhlak*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 23.

⁸⁸Muhammad Naquib al-Atta>s, *Aims and Objective of Islamic Education*, h. 60.

⁸⁹Ahmad Fu'ad al-Ahwa>niy, *al-Tarbiyah fi> al-Islam* (Mesir: Da>r al-Ma'a>rif, t.th), h. 19.

menjadikan seseorang dapat hidup dengan berilmu pengetahuan berakhlak mulia, mempunyai jasmani yang sehat, dan akal cerdas.⁹⁰ Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa ketiga term pendidikan di atas merupakan suatu kesatuan integrasi yang sama-sama kerelevansiannya, yang tidak terpisahkan dengan proses pemeliharaan, pengasuhan dan mendewasakan anak.

Dari uraian di atas penulis klasifikasikan istilah pendidikan bahwa:

- a. Term *al-tarbiyah* merupakan istilah pendidikan (*education*)
- b. Term *al-ta'lim* merupakan istilah pembelajaran (*instruction*)
- c. Term *al-ta'dib* merupakan istilah pelatihan (*training*)

Perdebatan makna dari ketiga term di atas, secara terminologi para pakar pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan definisi pendidikan, di antara batasannya yang sangat variatif, di antaranya Armai Arif memberinya definisi pendidikan itu sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.⁹¹

Shaleh mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah saw, kepadanya, agar mampu mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi dalam pengabdianya kepada Allah swt.⁹²

⁹⁰Muhammad Athiyah al-Abra>sy, *Ru>h} al-Tarbiyyah wa al-Ta'li>m* (Kairo: Da>r al-'Arabiyyah Isa al-Ba>b al-H{alab, t.th), h. 14.

⁹¹Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h 16.

⁹²Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi* (Cet. II; Jakarta: PT Gema Windu Pancaperkasa, 2001), h. 4.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu proses atau usaha bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, agar ia dapat berkembang secara maksimal yaitu terbentuknya kepribadian yang utama atau terwujudnya kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. Proses tersebut dilakukan dengan cara pelatihan dan pembelajaran maupun pendidikan. Melalui pendekatan ini anak akan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang diyakininya.

Pendidikan merupakan sebuah penanaman modal manusia untuk masa depan dengan membekali generasi muda akhlak mulia dan kecakapan yang tinggi agar mencapai kesejahteraan. Al-Qur'an telah memerintahkan kepada manusia agar meningkatkan kualitas dan waspada terhadap keturunan yang lemah, Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>' /4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(9)

Terjemahnya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menurut Katsir dalam tafsirnya ayat ini memerintahkan hendaklah kalian berusaha menjaga ahli waris (keturunan) agar mereka tidak menyia-nyiakan ahli warisnya (keturunannya).⁹³ Ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran untuk membangun manusia seutuhnya yang meliputi segala bidang kehidupan bangsa termasuk keagamaan dan pendidikan, karena pendidikan

⁹³Tafsir Ibnu Katsir, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, h. 307.

sebagai proses pembentukan akhlak yang esensial dalam kehidupan manusia, yang lazimnya dimiliki dan tertanam dalam diri setiap umat Islam. Pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumber daya manusia, karena pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan, melahirkan berbagai interpretasi yang termuat di dalamnya, yakni, adanya unsur-unsur edukatif yang sekaligus sebagai konsep bahwa pendidikan yang menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak, tujuan, dan sebagainya.

Bila kata "mutu" disatukan dengan kata "pendidikan" dalam sebuah variabel, maka yang dimaksud adalah kualitas pendidikan adalah kadar prestasi yang diraih oleh peserta didik melalui proses pembelajaran, atau tingkat kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik.

Maka prinsip dasar mutu pendidikan harus bertumpu pada gagasan yang dialogis nilai ketuhanan dan rasionalitas. Dengan kata lain bahwa terdapat kesesuaian antara pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi dengan nilai Ilahiyah untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah.

Mutu pendidikan yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini, masih sebatas konsep. Berbagai cara berpikir telah dikembangkan untuk mencoba memberikan suatu pengertian tentang mutu pendidikan, dalam kenyataannya konsepsi tentang mutu itu masih tetap bergerak dalam bentuk-bentuknya yang masih bersifat *rethorical*, artinya bahwa mutu pendidikan masih bergerak dari gagasan satu ke gagasan lain dan belum diterjemahkan secara tepat ke dalam ukuran dan tindakan yang lebih nyata.

Menurut Pongtuluran, bahwa segi normatif ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan, yakni "manusia yang terdidik" sesuai dengan standar ideal, dan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik "tenaga kerja" yang terlatih dan mutu pendidikan menengah ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar atau output lulusan dengan kriteria siap lanjut, siap latih dan siap kerja.⁹⁴

Untuk mencapai sinergitas atas tuntutan dunia kerja dengan tingkat kebutuhan masyarakat, maka perbincangan mengenai mutu pendidikan merupakan wacana yang aktual di dalam mendongkrak dan menghasilkan lulusan yang kualified. Mutu diartikan sebagai kesesuaian (*fitness*) atau relevansi keluaran pendidikan dengan kebutuhan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan, merupakan tuntutan yang makin mendesak dan tidak dapat dihindari, dan tantangan yang dihadapi madrasah memasuki abad ke-21, bagaimana agar sumber daya manusia yang disiapkan madrasah berkualitas dan mampu bersaing yang ditandai dengan lulusan madrasah yang, cerdas, trampil, profesional dan berkepribadian (berakhlak/bermoral).

D. Standar Nasional Pendidikan

Satandar nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) Standar isi; (2) Standar proses; (3) Standar kompetensi lulusan; (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) Standar saranadan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; (8) Standar penilaian pendidikan.

1. Standar Isi

⁹⁴Aris Pongtuluran, *Manajemen Mutu Total dalam Pendidikan*, Makalah disampaikan dalam Konfrensi Nasional Manajemen Pendidikan Jakarta: 2012, h. 14.

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.⁹⁵ Menurut Yafrianti Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Tujuan standar isi ialah meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.⁹⁶

Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi ini memberikan arahan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. memberikan arahan tentang kerangka dasar beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Memberikan arahan tentang kerangka dasar kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan standar isi.

2. Standar Proses

⁹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 10.

⁹⁶Fitri yafrianti (<http://sakura-ilmu.blogspot.co.id/2019/pengertian-dan-hakikat-standar-isi.html>) di akses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 21:41.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.⁹⁷ Menurut Fauziah proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.⁹⁸

Standar proses dijalankan sebagai berikut:

a. Kemampuan Merencanakan Pembelajaran

Rencana atau perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai.⁹⁹ Perencanaan memiliki kaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Pembelajaran mengacu pada pada pasal 1 ayat 20 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pembelajaran adalah proses interksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar".¹⁰⁰ Pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menanamkan pengetahuan kepada peserta didik tetapi banyak hal yang dilakukan pendidik sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik.¹⁰¹

⁹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 10.

⁹⁸Nurul Fauziah
(<https://www.scribd.com/document/362887248/Standar-Proses>) di akses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 20:30.

⁹⁹Harjanto, *Perencanaan Pengajaran* (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2

¹⁰⁰Republik Indonesia, "*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*", dalam Redaksi Sinar Grafika (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 107.

¹⁰¹Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 21.

Madjid menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar.¹⁰² Pembelajaran terkait dengan bagaimana (*how to*) membelajarkan peserta didik atau bagaimana membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa (*what to*) yang teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan (*needs*) peserta didik.¹⁰³ Pelaksanaan program pembelajaran memiliki makna yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan.

Perencanaan pengajaran merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan mengatasi masalah-masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.

b. Kemampuan Mengelola Proses Pembelajaran

1) Keterampilan Membuka Pelajaran

Dalam membuka pelajaran ada beberapa hal yang dilakukan agar pembelajaran menarik yaitu:

- a) Menarik perhatian peserta didik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian peserta didik antara lain: gaya mengajar, menggunakan alat bantu mengajar, pola interaksi yang bervariasi
- b) Membangkitkan motivasi, untuk menimbulkan motivasi dapat dikerjakan dengan cara menunjukkan kehangatan dan semangat, membangkitkan rasa ingin tahu,

¹⁰²Abdul Madjid, *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Pendidik)* (Cet. I; Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 16.

¹⁰³Muhaimin, *et al*, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2004), h. 146.

mengemukakan ide-ide yang bertentangan, memperhatikan minat belajar peserta didik

- c) Memberikan acuan, acuan merupakan usaha memberikan gambaran yang jelas kepada peserta didik mengenai hal-hal yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang relevan.¹⁰⁴

Memberi acuan diusahakan dengan mengemukakan secara spesifik dan singkat supaya memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pembelajaran. Usaha-usaha yang biasa dikerjakan guru antara lain, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Membuat kaitan, untuk membuat kaitan pelajaran, guru dapat melakukannya dengan menghubungkan materi yang telah dikuasai peserta didik dengan materi yang akan disampaikan.¹⁰⁵ Atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan dan mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, atau guru menjelaskan konsepnya terlebih dahulu baru kemudian uraian secara terinci.

2) Keterampilan Menyajikan Materi Pelajaran

Agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam penyajian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tetapi dapat didengar oleh seluruh peserta didik.
- b) Gunakanlah intonasi sesuai dengan materi yang dijelaskan

¹⁰⁴Hasibuan dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya: 2004), h 74-75.

¹⁰⁵*Ibid.*

- c) Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta hindarilah kata-kata yang tidak perlu.
- d) Bila ada istilah-istilah khusus atau baru, berilah definisi yang tepat.¹⁰⁶

Perhatikanlah, apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan, dan apakah penjelasan yang diberikan dapat dipahami serta menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi belajar mereka

3) Keterampilan Menutup Pelajaran

Ketika menutup pelajaran, kegiatan yang dilakukan guru adalah mengakhiri pelajaran atau mengakhiri kegiatan interaksi edukatif dengan cara:

- a) Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan menarik kesimpulan.
- b) Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan
- c) Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipelajari.
- d) Mengevaluasi dengan memberikan berbagai bentuk evaluasi misalnya post test baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan atau mendemonstrasikan.¹⁰⁷

Penjelasan di atas terbukti bahwa membuka dan menutup pelajaran bukanlah urutan kegiatan yang bersifat rutin, melainkan merupakan suatu perbuatan guru yang perlu direncanakan secara sistematis dan rasional, sehingga proses pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal.

Standar proses pendidikan merupakan suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan

¹⁰⁶E. Mulyasa, *Menjadi Pendidik Profesional, op.cit.*, h. 81.

¹⁰⁷*Ibid.*, h. 84.

pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.¹⁰⁸

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Menurut Haris Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap, yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.¹⁰⁹

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 10.

¹⁰⁹ Ainun Haris (<http://blogspot.co.id/2019/standar-kompetensi-lulusan-skl.html>) di akses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 21:40

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.¹¹⁰

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai guru. Dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen memuat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahu 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi sosial
4. Kompetensi profesional.¹¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang guru bukan suatu hal yang mudah akan tetapi harus memiliki berbagai macam kompetensi dan keahlian sehingga dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya maka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

¹¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 10.

¹¹¹Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005) Dilengkapi dengan Perpres RI No. 65 Th. 2007, No. 58 Th. 2006, Kepmendiknas No. 057 dan 056 Th. 2007, Permendiknas No. 42,32,18,16 Th. 2007, dan No. 7 Th. 2006 (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 147.

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogis

Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru bab II kompetensi dan sertifikasi pasal 3 yaitu kompetensi pedagogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik;
- 3) Pengembangan materi pelajaran;
- 4) Perancangan pembelajaran;
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- 7) Evaluasi hasil belajar; dan
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹¹²

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa ciri guru yang memiliki kompetensi pedagogis adalah memiliki kemampuan pedagogis yang dibuktikan dengan menguasai bahan pembelajaran, mampu menyusun rencana pembelajaran, dapat melaksanakan acara pembelajaran dengan memanfaatkan semua media dan metode pembelajaran yang diperlukan, serta dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan efisien.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang dimiliki seorang guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan

¹¹²PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bab II Kompetensi dan Sertifikasi pasal 3. (www. PP RI Nomor 74 Tahun 2008). Diakses tanggal 11 Januari 2014.

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹¹³ Kompetensi kepribadian yang dimiliki seorang guru sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik, sehingga setiap guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian.

Keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dapat diimplementasikan dalam pengembangan kepribadian guru yang mantap, dan dinamis yang meliputi:

- 1) Kemantapan dan integrasi pribadi. Seorang guru dituntut dapat bekerja secara teratur, konsisten, dan kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru demi tercapainya tujuan pendidikan.
- 2) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan artinya apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan jaman.
- 3) Berpikir alternatif. Artinya bahwa seorang guru harus mampu berpikir secara kreatif dan berwawasan luas.
- 4) Adil, jujur, dan objektif. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sikap adil akan menumbuhkan rasa disiplin diri bagi peserta didik dan sekaligus akan menambah wibawa guru.
- 5) Disiplin dalam menjalankan tugas. Disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya.
- 6) Ulet dan tekun bekerja. Artinya guru bekerja tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan tidak mudah putus asa sehingga program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.
- 7) Berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dengan adanya usaha untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan maka kemampuan guru akan bertambah pula, sehingga tidak

¹¹³Martis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 8.

mengalami kesulitan yang berarti dalam kegiatan pembelajaran.

- 8) Simpatik, menarik, luwes, bijaksana, dan sederhana. Sifat kemampuan pribadi guru dalam kegiatan pembelajaran memerlukan kematangan pribadi, kedewasaan sosial, pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yang memadai khususnya dalam pengalaman praktek mengajar.
- 9) Bersifat terbuka. Bersifat terbuka artinya bahwa guru dituntut meningkatkan dan memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan berbagai pihak karena sifat terbuka dapat terwujud melalui kegiatan pembelajaran yang demokratis.
- 10) Kreatif. Guru yang kreatif harus mampu melihat berbagai kemungkinan yang perkiraannya sama baik, guru harus lebih banyak bertanya, belajar dan berdedikasi tinggi.
- 11) Berwibawa. Dengan adanya kewibawaan maka kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.¹¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa kompetensi kepribadian harus dijadikan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didiknya. Sehingga guru sebagai teladan bagi peserta didiknya harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh agar dapat dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh aspek kehidupan.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

¹¹⁴Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar Landasan Konsep dan Implementasi* (Bandung; Alfabeta, 2009), h. 54.

- 1) Berkomunikasi, lisan, tulisan, atau isyarat,
- 2) Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.¹¹⁵

Guru sebagai pribadi yang ditokohkan dalam masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai pengajar di kelas, tetapi diharapkan pula tampil sebagai pendidik di masyarakat yang seyogyanya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menyusun materi pembelajaran secara luas dan mendalam sebagai inti pengembangan silabus serta kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.¹¹⁶ Oleh karena itu, kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru mampu melaksanakan pendidikan secara efektif dan efisien.

Istilah profesional dapat pula diartikan sebagai sifat atau orang. Profesional menunjuk pada dua hal, yaitu orang yang menyanggah suatu profesi, misalnya dia seorang profesional, dan kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan.¹¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bab I pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa:

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber

¹¹⁵Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. VII; Yogyakarta: Grha Guru, 2012), h. 33.

¹¹⁶Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 100.

¹¹⁷Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 133-135.

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹¹⁸

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang istilah profesional di atas maka dapat dimaknai bahwa kompetensi profesional adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang sesuai dengan bidang pekerjaan yang digelutinya. Atau sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Kompetensi profesional berarti suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui keahlian khusus atau latihan khusus.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹⁹ Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas dan pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman.¹²⁰

Lebih lanjut prasarana dimaksud adalah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,

¹¹⁸Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005) Dilengkapi dengan Perpres RI No. 65 Th. 2007, No. 58 Th. 2006, Kepmendiknas No. 057 dan 056 Th. 2007, Permendiknas No. 42,32,18,16 Th. 2007, dan No. 7 Th. 2006, h. 3.

¹¹⁹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, bab. I, pasal 1.

¹²⁰E. Mulyasa, *Pedomanan Manajemen Berbasis Madrasah*, h. 49.

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.¹²¹

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.¹²² Sedangkan Minarti menyebutkan, sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman.¹²³ \

Dari penjelasan sarana pendidikan, bisa diklasifikasi yaitu ditinjau dari sudut: habis tidaknya dipakai; bergerak tidaknya pada saat digunakan; dan hubungannya dengan proses pembelajaran. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kapur tulis, tinta printer dan lain sebagainya. Ada pula sarana pendidikan yang tahan lama yaitu bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama.

¹²¹Republik Indonesia, Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, bab VII, pasal 42.

¹²²Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 273.

¹²³Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 251.

Contohnya meja, kursi, komputer, atlas, globe, dan alat-alat olahraga.

Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindah-tempatkan sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Contohnya, meja dan kursi, lemari arsip, dan alat-alat praktik. Kemudian, untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit jika dipindahkan, misalnya saluran kabel listrik, saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan LCD yang dipasang permanen.

Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang dapat menkonkretkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat dikonkretkan melalui alat peraga sehingga peserta didik lebih mudah dalam menerima pelajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada tiga jenis, yaitu visual, audio, dan audiovisual.

Sedangkan prasarana pendidikan di madrasah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana madrasah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya, ruang kantor, kantin madrasah, tanah dan jalan menuju madrasah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan

madrasah, ruang guru, ruang kepala madrasah, dan tempat parkir.

Sarana dan prasarana merupakan komponen dalam proses pembelajaran yang mengandung potensi masing-masing peserta didik di setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah/madrasah yang terangkum dalam manajemen perlengkapan sekolah/madrasah yang dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.¹²⁴

Pengertian sarana dan prasarana itu sendiri adalah peralatan atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan secara langsung untuk proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah semua perangkat yang tidak secara langsung digunakan untuk proses pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007, menjelaskan bahwa sekolah/madrasah menetapkan kebijakan secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Program pengelolaan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana meliputi:

- 1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;
- 3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah;
- 4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat;
- 5) memelihara semua fasilitas fisik

¹²⁴Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2.

dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.¹²⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: tujuan, efisiensi, administratif, kekohesifan dan tanggung jawab. Standarisasi sarana prasarana madrasah sangat diharuskan karena untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

6. Standar Pengelolaan

Pendidikan membutuhkan pengelolaan yang baik agar menghasilkan kualitas yang baik pula. Pengelolaan pendidikan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2007 terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja serta pengawasan dan evaluasi.

Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 menegaskan bahwa:

Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.¹²⁶

Dapat disimpulkan mengenai standar pengelolaan adalah perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan di seluruh tingkat satuan pendidikan Republik Indonesia, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

¹²⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, (salinan lampiran) h. 14.

¹²⁶Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standar Pengelolaan, h. 132.

1) Perencanaan Program

Menurut Kurniadin & Imam Machali, perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan peserta secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.¹²⁷ Pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007, perencanaan program terdapat penyusunan visi, misi, tujuan sekolah/madrasah, serta rencana kerja sekolah/madrasah.

2) Visi Madrasah/Sekolah

Madrasah merumuskan, menetapkan visi serta pengembangannya. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga madrasah. Visi dirumuskan berdasar saran/masukan dari berbagai warga madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi pendidikan nasional. Visi diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala madrasah dengan memperhatikan masukan dari komite madrasah, lalu visi disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

3) Misi Madrasah/Sekolah

Madrasah merumuskan, menetapkan misi serta mengembangkannya. Misi madrasah memberikan arah dalam mewujudkan visi madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi menjadi program pokok madrasah. Misi dirumuskan berdasarkan saran dan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yang dipimpin oleh kepala madrasah. Misi disosialisasikan kepada warga madrasah.

4) Tujuan Madrasah

Tujuan madrasah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahun). Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan madrasah mengacu pada standar kompetensi

¹²⁷Didin Kurniadin & Imam Machali, *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media: 2013), h. 139.

lulusan yang sudah ditetapkan oleh madrasah dan pemerintah. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala madrasah. Disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

5) Rencana Kerja Madrasah

Rencana kerja dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. Dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKA-M). Rencana kerja jangka menengah yaitu rencana kerja empat tahun dan tahunan. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite madrasah. Rencana kerja tersebut dijadikan sebagai dasar pengelolaan madrasah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: (a) Kesiswaan, (b) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (c) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya (d) Sarana dan prasarana, (e) Keuangan dan pembiayaan, (f) Budaya dan lingkungan madrasah, (g) Peran serta masyarakat dan kemitraan, (h) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu, (b) Pelaksanaan Rencana Kerja.

6) Pengawasan dan Evaluasi

Kompomen pengawasan pengelolaan madrasah) pemantauan, supervisi evaluasi pelaporan dan tindak lanjut hasil pelaporan.

Pengawasan dan evaluasi dalam bentuk program pengawasan dan akreditasi dilakukan pada madrasah.

a) Program Pengawasan

- (1) Pengawasan madrasah dilakukan secara objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan madrasah dilakukan secara obyektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

- (3) Kegiatan pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh komite madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
- (5) Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.
- (6) Kepala madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap semester.
- (7) Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.
- (8) Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala madrasah. Kepala madrasah secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.
- (9) Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah terkait.
- (10) Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah terkait.
- (11) Tiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah,

termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.¹²⁸

Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

7. Standar Pembiayaan

Menurut Levin dalam Fatta, pembiayaan sekolah/madrasah adalah proses pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.¹²⁹

Menurut Mulyasa, terdapat banyak madrasah/sekolah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya disebabkan keuangan, baik untuk menggaji tenaga pendidik, staf, serta pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. Meskipun tututan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.¹³⁰

Sumber keuangan dan pembiayaan madrasah/sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanyayang bersifat khusus atau umum dan diperintuhkan kepada kepentingan pendidikan,
- (2)

¹²⁸Nanang Fattah, *Sistem Manajemen Mutu Pendidikan: Dalam Konteks Penerapan MBS* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 1.

¹²⁹Nanang Fattah, *Sistem Manajemen Mutu Pendidikan: Dalam Konteks Penerapan MBS*, h. 1 .

¹³⁰E. Mulyasa, *Manajemen Kepala Sekolah Profesional*, h. 193.

orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat, baik pengikat maupun tidak pengikat.¹³¹

Perencanaan keuangan madrasah/sekolah setidaknya mencakup dua kegiatan pokok di antaranya; penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja madrasah/sekolah (RAPSM/RAPBS). Menurut Mulyasa; kedua kegiatan pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyusunan anggaran madrasah/sekolah atau sering disebut anggaran belanja madrasah/sekolah (ABM/ABS) dapat dikembangkan dalam format-format di antaranya: (1) sumber pendapatan terdiri dari UYHD, DPP, OPF, dan lain-lain, (2) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan rasaran dan prasarana, bahan-bahan alat pembelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan pada bab I ketentuan umum pasal 2 ayat (1) dan (2):

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.¹³²

Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang

¹³¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implementasi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 48.

¹³²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan*, bab. I, pasal 2.

ketercapaian tujuan pendidikan. Hal ini penting terutama dalam rangka manajemen berbasis madrasah (MBM), yang memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai keperluan madrasah.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹³³ Menurut Sanjaya penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran yang terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.¹³⁴

Setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 64 ayat dijelaskan bahwa:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- b. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk
 - (1) menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - (2) bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - (2) memperbaiki proses pembelajaran. Dalam rangka penilaian hasil belajar (rapor) pada semester satu penilaian dapat dilakukan

¹³³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 10.

¹³⁴Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, h. 167.

melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti pekerjaan rumah (PR), proyek, pengamatan dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor semester satu. Pada semester dua penilaian dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti PR, proyek, pengamatan dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor pada semester dua.

Penilaian merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka).

E. Kerangka Konseptual

Studi ini berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah pada di Provinsi Papua (Studi Implementasi Menejemen Pengembangan Standar Mutu MI di Kab. Keerom-Papua)*". Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah, dan untuk menjawab fokus dalam studi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan teori yang ada. Di antara teori-teori dimaksud adalah:

Pertama, prinsip pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna atau pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu

layanan pendidikan. Maka di antara teori yang digunakan adalah teori Struktural-Fungsionalisme.¹³⁵

Konsep ini oleh Brown (1881-1955) dijelaskan sebagai berikut. Dasar pemikiran, masyarakat disamakan dengan sebuah organisme, terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Eksistensinya sangat tergantung pada berfungsi baiknya masing-masing bagian yang membentuknya. Teori Struktural-Fungsionalisme adalah fokus pada bagaimana elemen-elemen dalam struktur sosial (seperti: kelompok-kelompok masyarakat dan pranata-pranata sosial) berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial (*social order*) dan keseimbangannya (*equilibrium*).

Kedua, partisipasi terhadap madrasah/sekolah yang digalakkan pemerintah adalah kerja sosial, maka salah satu teori yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah adalah menggunakan teori gerakan sosial (*social movement*). Konsep ini oleh Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Arifin menyebutkan dengan faktor ideologis.¹³⁶

Ketiga, bahwa untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan madrasah dapat pula digunakan teori solidaritas praktis. Konsep ini oleh Cooley, (1864-1929)¹³⁷ disebut sebagai saling-hubungan dan saling tidak terpisah antara individu, lembaga dan masyarakat adalah dilahirkan kembar atau bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adanya hubungan manusia dengan proses sosial seperti organisasi sosial. Masyarakat dan individu, organisasi tidak menggambarkan fenomena yang berbeda tetapi menggambarkan aspek kolektif dan

¹³⁵J.R. Mansoben, "Antropologi Klasik dan Kontemporer" (Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Budaya dan Agama di UNCEN, Jayapura, 3 Maret 2017), h. 7.

¹³⁶Arifin Imron, *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs, dan Multi Kasus dalam Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma, 2000), h. 355.

¹³⁷J.S. Roucek & R.I. Warren, *Sociology An Introduction (Pengantar Sosiologi)* alih bahasa: Sahat Simamora, h. 286.

penyebaran perkara atau tujuan yang sama. Maka dalam hal ini untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan (pendidikan berkualitas) maka kerja sama antara lembaga pendidikan dan masyarakat adalah tidak terpisahkan.

Keempat, bahwa menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan madrasah studi ini menggunakan teori struktur sosial, konsep yang oleh Koentjaraningrat, (1980: 181)¹³⁸ struktur sosial adalah total dari jaringan hubungan antara individu-individu. Dimensinya ada dua, yaitu hubungan diadik, artinya antara pihak (yaitu person atau kelompok) kesatu dengan pihak kedua, tetapi juga diferensial, antara satu pihak dengan beberapa pihak yang berbeda-beda, atau sebaliknya.

Kelima, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah adalah bagian dari aktivitas keterlibatan orang, maka teori *activity* dapat digunakan. Konsep ini oleh Lafrancois (1984) bahwa makin tua seseorang, makin erat ia memelihara hubungan sosial, fisik, dan emosional. Kepuasan hidup orang tua sangat bergantung pada kelangsungan keterlibatannya di berbagai kegiatan.¹³⁹

Keenam, Masyarakat plural yang terdapat di kab. Keerom pada umumnya dan khususnya Arso III, IV dan VI merupakan realitas yang tidak dapat dihindari untuk menciptakan itegrasi, Emile Durkheim.¹⁴⁰ Menempatkan agama sebagai gejala yang dapat meningkatkan integrasi dan sosidaritas sosial. Muncul berbagai hal yang melatarbelakangi masyarakat beragama, baik Islam maupun Kristen dalam tercipta solidaritas di Arso III, IV dan VI. Di kab. Kerom. dengan demikian teori yang digunakan penulis

¹³⁸J.R. Mansoben, *Antropologi Klasik dan Kontemporer*, Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Budaya dan Agama di UNCEN Jayapura, 3 Maret 2017.

¹³⁹Zainal Aqib Ahmad Amrullah, *Ensiklopedia Pendidikan & Psikologi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 239.

¹⁴⁰George Rritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 14.

adalah teori solidaritas mekanik. (kebersamaan antara Islam dan Kristen adalah ikatan solidaritas mekanik, yaitu atas dasar persamaan sebagai sesama masyarakat Arso III, IV dan VI) persamaan prinsip hidup gotong royong, kemudian mereka terlibat secara fisik dalam aktivitas yang sama serta memiliki tanggung jawab bersama.

Ketujuh untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan madrasah, maka dalam studi ini juga menggunakan konsep-konsep Islam. Peran agama begitu *determinant* (menentukan) yakni masyarakat muslim memiliki semangat keagamaan dan dakwah dan terbukti efektif untuk mendorong setiap individu berpartisipasi dalam pengembangan madrasah.

Kedelapan partisipasi masyarakat bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh motivasi sebagai penggerak dalam melaksanakan kebaikan.

*Motivation as a mover and encouragement from within yourself and encouragement from outside yourself to do anything, including job performance. Someone who works in earnest through adequate achievement will be driven by a great motivation. Furthermore, if the performance is not driven by the motivation will impact an unacceptable performance. Motivation is also an effort to fulfill the needs of the work, both the need for power, achievement, affiliation and the need to stand alone.*¹⁴¹

Maksudnya adalah motivasi sebagai penggerak dan dorongan dari dalam diri anda dan dorongan dari luar diri anda untuk melakukan apa saja, termasuk prestasi kerja. Seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh melalui pencapaian yang memadai akan didorong oleh motivasi yang besar. Selanjutnya, jika kinerja tidak didorong oleh

¹⁴¹Relationship of Democratic Leadership Style with High School Teacher Motivation
<http://www.fcps.edu/DHR/employees/evaluations/handbooks/teacher.pdf>
. diakses, 15/9/2019.

motivasi akan berdampak pada kinerja yang tidak dapat diterima. Motivasi juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, baik kebutuhan akan kekuatan, prestasi, afiliasi dan kebutuhan untuk berdiri sendiri).

Menurut Tucker yang kutip oleh Abhishek Sharma dalam jurnal internasional mengatakan: *Idealized influences and inspirational motivations that are connected with the leader's ability to actualize a shared vision with followers. These leaders are looking for new things that are useful for the future of the organization they lead.*¹⁴²

Maksudnya adalah pengaruh yang diidealisasikan dan motivasi inspiratif yang terhubung dengan kemampuan pemimpin untuk mengaktualisasikan visi bersama dengan pengikut. Para pemimpin ini mencari hal yang baru yang bermanfaat untuk masa depan organisasi yang dipimpinnya) dalam hal ini kepala madrasah berupaya meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan madrasah.

Partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh kepala madrasah yang merupakan *motivator, event organizer*, bahkan penentu arah kebijakan madrasah yang akan menentukan tujuan pendidikan yang harus direalisasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Halpin bahwa: *The principal's leadership behavior is at the core of various conditions in the school. This means that the good and bad conditions in schools are determined more by the leadership behavior of the principal, including the formation of teacher performance in schools.*¹⁴³

Menurut Bass & Avolio yang dikutip oleh Acharya dalam jurnal internasional yang berjudul. *The Impact Of*

¹⁴²Abhishek Sharma, *The Comparative Influences Of Transformational Leadership And Leader Member Exchange on Organizational Outcome, Personal Outcome, and Employee Satisfaction*, *International Journal of Education* <https://www.myschool.edu.au>. diakses, 14/9/2019.

¹⁴³Halpin, *The Principal's Leadership Behavior*, *International Journal of Organizational Behavior* (<http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/676/1/jurnal>), diakses, 14/9/2019.

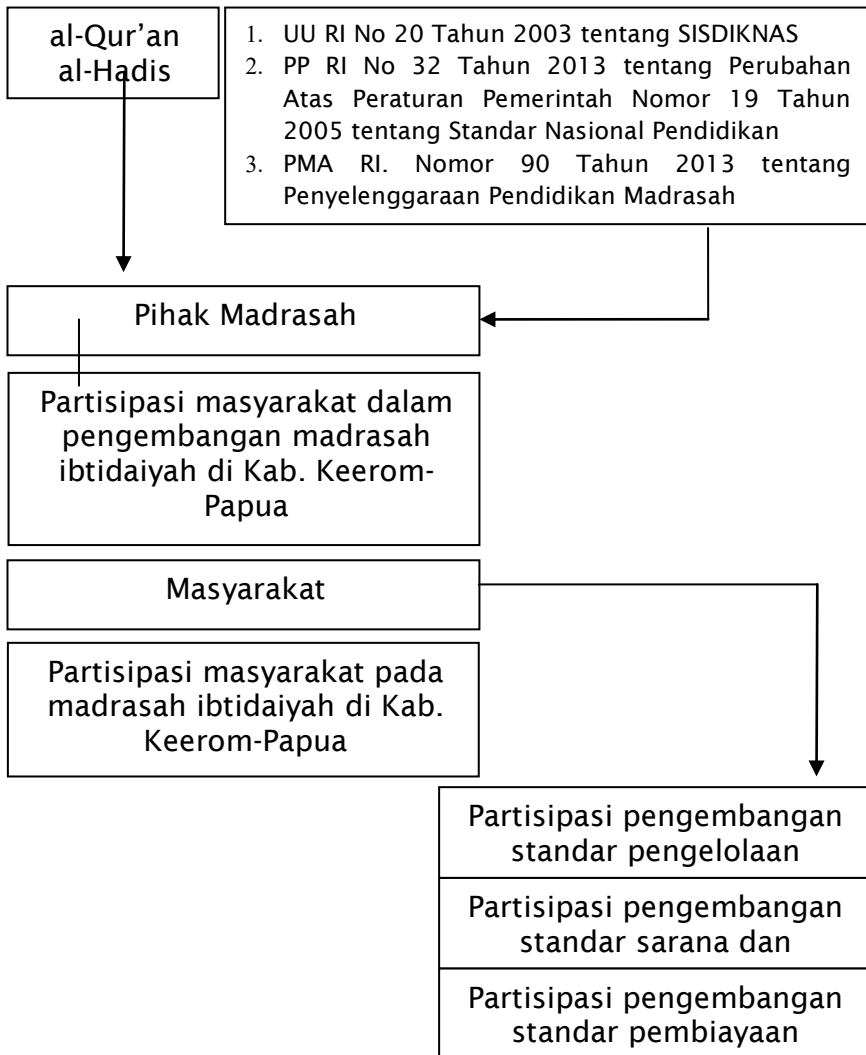
Transformational Leadership On Motivation And Performance Of The Followers mengemukakan *The leader is the person who is can encourage the power of motivation in himgroup member in an organization.*¹⁴⁴

Pemimpin adalah orang yang dapat mendorong kekuatan motivasi dalam anggota grup dalam suatu organisasi.

Kepala madrasah dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala madrasah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban madrasah agar dapat meningkatkan mutu madrasah.

¹⁴⁴Nirmal Acharya, *The Impact Of Transformational Leadership On Motivation And Performance Of The Followers*, *Elk Asia Pacific Journal Of Leadership And Inovasi Manajement*.<https://www.elkjournals.com/leadership-and-innovation>), diakses, 13/9/2019.

Kerangka Konseptual



BAB III

TAHAPAN MEMBANGUN SEKOLAH BERMUTU DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua

Standar pengelolaan dalam studi ini meliputi (1) perencanaan kegiatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua; (2) pelaksanaan kegiatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua; dan (3) pengawasan kegiatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua.

Berikut uraian pengembangan standar pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua dengan merangkum data melalui metode pengumpulan data yaitu pengamatan peran serta (*participant observation*). Dalam kegiatan ini penulis sendiri sebagai instrumen, wawancara, dan dokumentasi.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua yaitu perencanaan program terdapat penyusunan visi, misi, tujuan madrasah, rencana kerja madrasah dan program Adiwiyata serta Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

a. Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III)

Lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua merupakan lembaga penyelenggara pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai madrasah yang berbasis

agama Islam untuk membentuk perilaku yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadits sebagai landasannya.

Adapun partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan kegiatan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua merupakan madrasah setingkat Madrasah Dasar yang memadukan materi-materi pelajaran umum dan materi pelajaran agama yang merupakan ciri khas Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Penulis melakukan telaah dokumen untuk mendapatkan data tentang visi misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua Adapun visi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua adalah:

“Unggul dalam IMTAQ DAN IPTEK, berakhlak karimah dan berdaya saing tinggi serta berwawasan lingkungan”.

Hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum bahwa:

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam perumusan visi misi di madrasah ini, pihak madrasah mengundang tokoh masyarakat sekitar, dan khususnya komite madrasah. Partisipasi masyarakat sangat penting karena visi tersebut ditetapkan dengan tujuan peserta didik yang dihasilkan tidak hanya pintar saja tetapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Kepintaran peserta didik diasah melalui pembelajaran dalam bidang ilmu dan teknologi, sementara keimanan dan ketakwaan diasah melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan (Islam) dalam diri peserta didik, baik dalam pelajaran yang secara langsung berhubungan dengan

keagamaan, maupun dalam pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pendidikan atau pembelajaran IPTEK yang berkualitas, efektif dan efisien.
- b) Memacu peserta didik untuk berprestasi dalam bidang akademik, sehingga lulusan memiliki daya saing yang tinggi.
- c) Menyelenggarakan kehidupan Madrasah yang berwawasan keislaman, tertib dan berakhlak mulia.
- d) Mengembangkan pelatihan teknologi dasar dan komunikasi.
- e) Menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga, seni dan budaya daerah yang bernuansa keislaman.
- f) Memberdayakan warga madrasah dalam upaya pengendalian pencemaran, kerusakan dan pelestarian lingkungan.
- g) Membudayakan perilaku salam, sapa, dan seyum (Lampase), hidup bersih, dan cinta lingkungan melalui gerakan “Tampora” (Tanam Pohon dan Rawat), “Limas” (Lima Menit Ambil Sampah), “CTPS” (Cuci Tangan Pakai Sabun), dan “Basmi” (Baca Sepuluh Menit).²

Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut:

Menurut wakil kepala madrasah bidang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) dalam penyusunan visi misi madrasah melibatkan beberapa unsur yaitu pimpinan madrasah, dewan guru, komite madrasah, dan tokoh masyarakat. Itu dilakukan karena visi misi sebagai panduan dalam rangka mencapai

¹Supratman, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III),.

²Buku Revisi Penyusunan Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua.³

Dari visi misi tersebut Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua menjadi lembaga pendidikan dasar yang secara umum berprestasi unggul, memiliki karakteristik islami dan populis (merakyat) yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi.

2) Penyusunan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom Arso III Kab. Keerom-Papua

Adapun tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom Arso III Kab. Keerom-Papua adalah:

- a) Terciptanya perilaku disiplin, rapi dan bertanggung jawab jujur, ramah, sopan santun dan saling menghargai dari setiap warga madrasah sebagai wujud iman dan taqwa.
- b) Peserta didik memiliki kopentensi dari pengembangan diri yang berdaya saing lokal, nasional dan internasional.
- c) Peserta didik memiliki pengetahuan, ketrampilan serta berprestasi dalam pelajaran bahasa indonesia, matematika, sains, seni budaya dan ketrampilan, dan olahraga.
- d) Setiap guru berpenampilan rapi dan menarik, membimbing dan melayani peserta didik dengan ramah tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa.
- e) Setiap guru memiliki kompetensi akademik dan IT dan profesional dalam merancang, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- f) Tersedianya media pembelajaran matematika, bahasa, sains, IPS, seni budaya, dan ketrampilan serta fasilitas olahraga.

³Supratman, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

- g) Tersedianya ruang: multi media, aula, uks, kantin dan dapur madrasah yang dikelola secara optimal.
- h) Terciptanya lingkungan madrasah yang asri, bersih, indah dan nyaman sebagai wujud madrasah adiwiyata untuk pengendalian pencemaran, kerusakan dan pelestarian lingkungan.
- i) Melalui pembiasaan tercipta budaya peduli lingkungan oleh seluruh warga madrasah.
- j) Unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian masyarakat.
- k) Unggul dalam memperoleh nilai Ujian Semester (US) dan Ujian Akhir Semester (UAM).
- l) Unggul dalam persaingan masuk jenjang menengah.
- m) Unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang sains dan matematika
- n) Unggul dalam lomba olahraga, kesenian, dan pramuka.
- o) Menghasilkan lulusan yang rajin beribadah dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan agama Islam.
- p) Menghasilkan lulusan yang berprestasi optimal sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- q) Menghasilkan setiap lulusan menguasai salah satu bidang kerajinan tangan, kesenian atau olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya.⁴

Dalam hasil wawancara dengan kepala madrasah dikatakan bahwa:

Tujuan madrasah ini sangat penting jadi bukan hanya dirumuskan oleh satu orang akan tetapi semua *stakeholder* pendidikan dimintai pendapat sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan madrasah. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua ditetapkan atas dasar setiap orang mempunyai dorongan untuk mempelajari agama, dorongan ini lahir karena ingin mencari kebenaran,

⁴Buku Revisi penyusunan Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

rasa aman dan kebahagiaan di dunia maupun sesudah mati. Apa yang ditemui manusia mengenai agama adalah setaraf di tingkat pemikirannya, kelompok manusia yang masih bersahaja memiliki agama sesuai dengan kehidupan kebersahajaannya. Dalam penyusunan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua pihak madrasah melibatkan komite madrasah.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas bahwa dalam perumusan tujuan madrasah, masyarakat ikut berpartisipasi sehingga dihasilkan tujuan yang sangat religius agamis karena agama mutlak untuk dijadikan materi dalam pembinaan mental dan moral, karena agama menjadi penuntun hidup manusia, yang dikembangkan melalui madrasah untuk mengajarkan materi dan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Sejurus masalah tersebut maka masyarakat membentuk lembaga pendidikan yang bernama madrasah, karena masyarakat melihat peranan madrasah adalah suatu tempat dimana telah dibentuk dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai tempat belajar dan mengakaji ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu umum yang lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah madrasah sebagai tempat pendidikan ilmu agama dan umum, pembinaan mental dan moral peserta didik yang masih berusia madrasah. Dengan demikian peranan madrasah jelas sangat penting dan setrategis dalam memberikan pendidikan ilmu agama dan umum, membina pendidikan moral dan mental peserta didik.

Telaah dokumen dalam buku Rencana Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua dikatakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang antara lain:

⁵Arsad. R., Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

- a) Pemantapan pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan orang tua peserta didik.
- b) Peningkatan jumlah jenis dan mutu sebagai peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai usaha pelayanan pendidikan yang merata.
- d) Peningkatan mutu pendidikan.
- e) Sebagai kegiatan yang bersifat kemasyarakatan.⁶

Dalam penyusunan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua dilibatkan masyarakat melalui komite madrasah, ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua, sebagai berikut:

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua saya sebagai komite madrasah dilibatkan dalam penyusunan tujuan madrasah, seperti tahun lalu ada revisi/perbaikan tujuan madrasah senantiasa dilibatkan.⁷

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua jika dilihat dari tujuannya memiliki alternatif dan kebijakan/langkah yang dapat diterima oleh masyarakat. Segala potensi yang ada di madrasah dioptimalkan agar menjadi madrasah yang berprestasi, berdisiplin, berbudaya, dilandasi iman dan taqwa, sesuai dengan visinya dan kondisi obyektif madrasah.

3) Penyusunan rencana kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua

Rencana Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua disusun secara strategis, realistis untuk jangka waktu 4 tahun, sehingga dapat

⁶Buku Rencana Kerja Madrasah (RKM) Madrasah Ibtidaiyah al-Azhar Arso IV Kab. Keerom-Papua,

⁷Iwan Siswanto, Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III),.

digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita pemangku kepentingan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua, dan dalam pelaksanaannya tidak ada aral yang berarti dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan bersama.

Dalam dokumen Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua dikatakan rencana kerja madrasah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala madrasah dalam mengambil kebijakan, di samping itu sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program belajar mengajar dan administrasi madrasah yang lain, agar pengelola madrasah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip manajemen.

Keberhasilan perencanaan ini didukung oleh peran serta warga madrasah dan dukungan dari warga masyarakat. Seluruh komponen madrasah harus mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan misi sehingga seluruh program yang dijalankan oleh madrasah tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut.⁸

Perencanaan penting dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku madrasah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan madrasah yang lebih baik dalam meningkatkan dan mengembangkan madrasah dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

Untuk memperkuat pendapat informan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua, maka penulis melakukan telaah

⁸Buku Rencana Kerja Madrasah (RKM) Madrasah Ibtidaiyah al-Azhar Arso IV Kab. Keerom-Papua.

dokumen untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap langkah langkah Perencanaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.⁹

4) Penyusunan Program Adiwiyata

Program adiwiyata adalah program yang dicetuskan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup NO 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Kata adiwiyata berasal dari sansekerta yaitu “Adi” dan “Wiyata”. Adi memiliki makna: besar, agung, baik, ideal dan sempurna. Wiyata memiliki makna: tempat dimana seseorang mendapat ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam berkehidupan sosial. Jadi, Adiwiyata mempunyai pengertian sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah mengatakan bahwa:

Program Adiwiyata adalah bagian dari program unggulan madrasah, serta tujuan dari Madrasah MIN Keerom itu sendiri, selain itu Adiwiyata adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Keerom, dimana MIN Keerom dinobatkan sebagai Madrasah pertama dalam menjalankan program Adiwiyata dari sekian banyak SD/MI yang ada di Kab. Keerom. Kebijakan program Adiwiyata ini juga mendapat respon positif Komite Madrasah dalam rangka mengembangkan pendidikan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan program Adiwiyata pada MIN Keerom. Program ini mencakup empat (4) bidang yakni: bidang kebijakan berwawasan lingkungan, bidang kurikulum berwawasan lingkungan, bidang kegiatan berwawasan

⁹Lampiran/Dokumentasi

¹⁰Dokumen Pedoman Kegiatan Program Adiwiyata Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Keerom.

lingkungan, serta bidang sarana dan prasarana media pembelajaran lingkungan.¹¹

Dalam hasil wawancara penulis dengan Suparman, mengatakan bahwa:

Empat (4) bidang kebijakan pojka di antaranya, (1) kebijakan berwawasan lingkungan meliputi: kelompok kerja (pokja) penghijauan, pokja *green house*, pokja penataan taman, pokja kebun madrasah, pokja pembibitan, (2) pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan meliputi: pokja toilet, pokja kolam ikan, pokja bank sampah, pokja ekstrakurikuler, (3) kegiatan lingkungan berbasis partisipatif meliputi: pokja dokumentasi lingkungan, pokja hari-hari lingkungan hidup, pokja keamanan, pokja budaya lingkungan, pokja slogan, pokja madding lingkungan hidup, (4) pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan meliputi: pokja daur ulang, pokja kompos, pokja kantin, pokja apotek hidup.¹²

Lebih lanjut Suparman, mengatakan bahwa:

Kami bersyukur dengan adanya program Adiwiyata, maka partisipasi masyarakat dan pemerintah Kab. Keerom, bersama MIN Keerom terlaksana dengan baik. Bahwa sebagian dari program Adiwiyati ini berjalan baik karena adanya komitmen bersama masyarakat, pemerintah bersama pihak Madrasah dalam partisipasi mengembangkan Madrasah yang ramah lingkungan dan berkualitas.¹³

¹¹ Arsad R. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

¹²Suparman, Ketua TIM Inti, Program Adiwiyata Mandiri Keerom.

¹³Suparman, Ketua TIM Inti.



Dokumen.1¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diasumsikan bahwa pengembangan madrasah kaitannya dengan perencanaan kegiatan pendidikan serta program adiwiyata pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dan dilakukan secara bertahap. Melalui pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua secara bertahap, kompleksitas permasalahan dikurangi serta berbagai intervensi atas kegiatan

¹⁴ TIM Penilai Adiwiyata pada lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom melibatkan berbagai unsur diantaranya: Kementerian Agama Kab. Keerom, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup kab. Keerom, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Keerom-Papua. Menurut penanggung jawab adiwiyata MIN Keerom (sumarni) penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat dan pihak madrasah dalam mewujudkan lingkungan madrasah yang ramah lingkungan dan berkualitas, dan sasaran penilaian juga terhadap keberhasilan capaian program-program adiwiyata yang disepakati bersama. Penilaian yang sama juga dilakukan dilingkungan madrasah yang ada di Ka. Keerom-Papua. Alhamdulillah MIN Keerom mendapat predikat terbaik dalam pengelolaan program adiwiyata di Kab. Keerom., dan belum di kalahkan oleh madrasa lainnya di kab. Keerom Papua.

pembinaan, lantaran aspirasi yang berubah terlalu cepat dan meloncat-loncat.

Masyarakat menjadi partner madrasah dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua, kerjasama keduanya merupakan hubungan dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program perencanaan kegiatan pendidikan serta program adiwiyata pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan madrasah. Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Agar pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud yakni terdiri dari wali peserta didik, masyarakat sekitar, pengusaha sekitar madrasah dan donatur madrasah, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan sebagainya.

5) Penyusunan Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

PHBS di madrasah adalah upaya untuk memberdayakan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan madrasah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif dalam mewujudkan madrasah sehat. Untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta

Tahapan Membangun Sekolah Bermutu Dengan Partisipasi Masyarakat

aktif masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia madrasah (usia 6-10), ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, pemahaman nilai-nilai PHBS di madrasah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pedekatan usaha kesehatan madrasah (UKS).



Dokumen: 2¹⁵

Pada tahap perencanaan tim PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) melakukan:

- a) Koordinasi persiapan pelaksanaan proyek dengan Kabid PHA Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kab. Keerom dalam rangka rencana pelaksanaan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua.
- b) Melakukan koordinasi ke *stakeholder*, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Madrasah Sehat berbasis PHBS (Perilaku Hidup

¹⁵Sosialisasi Madrasah Sehat Berbasis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Keerom, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Keerom-Papua, melibatkan warga madrasah diantaranya kepala madrasah, guru, komite madrasah, siswa bersama para orang tua siswa, tokoh masyarakat di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan khususnya warga madrasah tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, menuju sekolah/madrasah ramah anak, bertempat di madrasah ibtidaiyah negeri arso III Kab. Keerom-Papua.

Bersih dan Sehat) yang akan dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua.¹⁶

PHBS memiliki tujuan, manfaat, dan sasaran sebagai berikut:

a) Tujuan PHBS di Madrasah.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di madrasah mempunyai tujuan yakni :

- 1) Tujuan Umum: Memperdayakan setiap peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan madrasah agar tahu, mau, dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan madrasah sehat.
- 2) Tujuan Khusus: Meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap peserta didik, guru dan masyarakat di lingkungan madrasah berPHBS di madrasah. Memandirikan setiap peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan madrasah ber PHBS.

b) Manfaat PHBS di Madrasah

(1) Manfaat bagi peserta didik

- (a) Meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit.
- (b) Meningkatkan semangat belajar.
- (c) Meningkatkan produktivitas belajar.
- (d) Menurunkan angka absensi karena sakit.

(2) Manfaat bagi warga madrasah

- (a) Meningkatkan semangat belajar peserta didik berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan.
- (b) Menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua.
- (c) Meningkatnya citra madrasah yang positif.

(3) Manfaat bagi madrasah.

- (a) Adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di madrasah.

¹⁶Laporan Implementasi Proyek Sehat Berbasis PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Kab. Keerom-Papua.

- (b) Adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di madrasah.
- (4) Manfaat bagi masyarakat
 - (a) Mempunyai lingkungan yang sehat.
 - (b) Dapat mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh madrasah.
- (5) Manfaat bagi pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota :
 - (a) Madrasah yang sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang sehat.
 - (b) Dapat dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan PHBS di madrasah.

c) Sasaran PHBS di Madrasah

Sasaran PHBS di institusi pendidikan adalah seluruh warga institusi pendidikan yang terbagi dalam:

- 1) Sasaran primer atau sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan di rubah perilakunya atau murid dan guru yang bermasalah (individu/kelompok dalam institusi pendidikan yang bermasalah)
- 2) Sasaran sekunder atau sasaran yang mempengaruhi individu dalam institusi pendidikan yang bermasalah misalnya, kepala madrasah, guru, orang tua murid, kader kesehatan madrasah, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, dan lintas sektor terkait.
- 3) Sasaran tersier merupakan sasaran yang diharapkan menjadi pembantu dalam mendukung, pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di institusi pendidikan seperti, kepala desa, lurah, camat, kepala puskesmas, diknas, guru, tokoh masyarakat, dan orang tua murid.

Penulis melakukan observasi pada 13 Nopember 2019 tentang kegiatan PHBS di Madrasah Ibtidaiyah.

Kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Peserta didik dilatih mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun.

2. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik untuk mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
3. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
4. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik memberantas jentik nyamuk.
5. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu menyampaikan peserta didik agar tidak merokok.
6. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu menimbang berat badan dan mengukur tinggi peserta didik badan setiap bulan.
7. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik agar membuang sampah pada tempatnya.
8. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik untuk mencuci rambut secara teratur dan menyisirnya sehingga terlihat rapih.
9. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik memakai baju yang tidak ada kotorannya, tidak berbau, dan rapi. Pakaian yang bersih dan rapi diperoleh dengan mencuci baju setelah dipakai dan dirapikan dengan disetrika. Memeriksa baju yang dipakai dapat dilakukan oleh dokter kecil/kader kesehatan/guru UKS minimal seminggu sekali.
10. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan dan mempraktikkan memotong kuku sebatas ujung jari tangan secara teratur dan membersihkannya sehingga tidak hitam/kotor dan memeriksa kuku secara rutin.
11. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik memakai sepatu bersih dan rapih, misalnya ditalikan bagi sepatu yang bertali.

Sepatu bersih diperoleh bila sepatu dibersihkan setiap kali sepatu kotor. Memeriksa sepatu yang dipakai siswa dapat dilakukan oleh dokter kecil/kader kesehatan/guru UKS minimal seminggu sekali.

12. Dalam kegiatan PHBS Siswa/Guru/Masyarakat sekolah lainnya melakukan olahraga/aktivitas fisik secara teratur minimal tiga kali seminggu selang sehari. Olahraga teratur dapat memelihara kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kebugaran tubuh sehingga tubuh tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Olahraga dapat dilakukan di halaman secara bersama-sama, di ruangan olahraga khusus (bila tersedia), dan juga di ruangan kerja bagi guru/karyawan sekolah berupa senam ringan di kala istirahat sejenak dari kesibukan kerja. Sekolah diharapkan membuat jadwal teratur untuk berolahraga bersama serta menyediakan alat/sarana untuk berolahraga.
13. Dokter kecil mengikuti pelatihan agar mampu mengajarkan peserta didik agar tidak Menggunakan NAPZA Anak sekolah/guru/masyarakat sekolah tidak menggunakan NAPZA (Narkotika Psikotropika Zat Adiktif). Penggunaan NAPZA membahayakan kesehatan fisik maupun psikis pemakainya.
14. Mencuci Tangan dengan Air Mengalir dan Memakai Sabun Sekolah/guru/masyarakat sekolah selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar/sesudah buang air kecil, sesudah beraktivitas, dan atau setiap kali tangan kotor dengan memakai sabun dan air bersih yang mengalir. Air bersih yang mengalir akan membuang kuman-kuman yang ada pada tangan yang kotor, sedangkan sabun selain membersihkan kotoran juga dapat membunuh kuman yang ada di tangan. Diharapkan tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman serta dapat mencegah terjadinya penularan penyakit seperti: diare, disentri,

kolera, tipus, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan flu burung.

15. Membuang Sampah ke Tempat Sampah yang Terpilah
Anak sekolah/guru/masyarakat sekolah membuang sampah ke tempat sampah yang tersedia. Diharapkan tersedia tempat sampah yang terpilah antara sampah organik, non-organik, dan sampah bahan berbahaya. Sampah selain kotor dan tidak sedap dipandang juga mengandung berbagai kuman penyakit. Membiasakan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia akan sangat membantu anak sekolah/guru/masyarakat sekolah terhindar dari berbagai kuman penyakit.
16. Mengonsumsi jajanan sehat dan bersih di kantin.
Anak sekolah/guru/masyarakat sekolah mengonsumsi jajanan sehat dari kantin/warung sekolah atau bekal yang dibawa dari rumah. Sebaiknya sekolah menyediakan warung sekolah sehat dengan makanan yang mengandung gizi seimbang dan bervariasi, sehingga membuat tubuh sehat dan kuat, angka absensi anak sekolah menurun, dan proses belajar berjalan dengan baik.



Dokumen. 3 ¹⁷

¹⁷Kegiatan sosialisasi PHBS kepada sasaran primer atau sasaran utama yakni siswa sehingga berdampak perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, sasaran sosialisasi juga diharapkan mempengaruhi selain siswa juga kepada warga madrasah misalnya kepala madrasah, guru, staf kader Kesehatan madrasah, tokoh masyarakat petugas Kesehatan dan lintas sektor terkait, baik secara individu maupun secara kelompok, tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada madrasah ibtidaiyah negeri keerom - Papua.

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua merupakan upaya untuk memberdayakan peserta didik guru dan masyarakat lingkungan madrasah agar tahu, mau, dan mampu mempratikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan madrasah sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat juga merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan madrasah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.



Dokumen.4 ¹⁸

Penulis melakukan wawancara dengan kepala MIN Arso III, sebagai berikut:

¹⁸Ibu Emilda Rumere (dokter pada puskesmas Arso III) beliau juga sebagai penggagas sekolah berbasis PHBS, juga sebagai penanggung jawab usaha kesehatan sekolah (UKS) pada MIN Keerom. Dalam hal ini sebagai narasumber utama pelatihan para calon dokter kecil dan jenderal sehat serta tugas dan fungsinya, dokter kecil tugasnya membantu dalam pelaksanaan UKS di madrasah sedangkan jenderal sehat tugasnya mengawasi teman-temannya dalam pengisian papan control Kesehatan. Dilati juga bagaimana penanganan saat menolong teman yang pingsan, juga menolong teman yang kecelakaan serta bagaimana perawatan lukanya. Adapun siswa yang dilatih sebagai calon dokter kecil dan jenderal sehat masing masing 10 orang dari siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Arso III Keerom Papua.

Tahapan Membangun Sekolah Bermutu Dengan Partisipasi Masyarakat

Bermula dari adanya tawaran Ibu Hersy Sabatini, seorang pemerhati lingkungan dan kesehatan anak yang merasa prihatin dengan keberadaan madrasah yang berada di Kab. Keerom, menurutnya, kurang memperhatikan lingkungan madrasah yang bersih utamanya kebersihan diri peserta didik itu sendiri. Ibu Hersy memili MIN sebagai madrasah percontohan program madrasah sehat berbasis PHBS (perilaku hidup bersih sehat) kepala Madrasah menuturkan kami MIN siap mendukung dan membantu Ibu Hersy dalam rangka membina, dan membantu melakukan program madrasah sehat yang dilaksanakan di madrasah kami, dan saya menyerankan agar segera diimplementasikan program ini di madrasah kami.¹⁹



Dokumen.5 ²⁰

Kepala madrasah sangat merespon rencana PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah

¹⁹Arsad R. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

²⁰ Fota bersama Peneliti, Kepala Madrasah (Bpk. Arsad R., S.Pd., M.Pd.) dan siswi Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di depan taman halaman Kantor Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom-Papua.

Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua sehingga kepala madrasah langsung melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* pada madrasah tersebut, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Saya sebagai kepala madrasah sangat merespon rencana kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua ini sehingga kami mengajak bicara/berdialog guru, komite madrasah dan tim pelaksana atau Pembina UKS tentang Maksud, tujuan dan manfaat penerapan PHBS di madrasah, membahas rencana kebijakan tentang penerapan PHBS di madrasah. Meminta masukan tentang penerapan PHBS di madrasah, antisipasi kendala sekaligus alternatif solusi. Menetapkan penanggung jawab PHBS di madrasah dan mekanisme pengawasannya. Membahas cara sosialisasi yang efektif bagi peserta didik, warga madrasah dan masyarakat madrasah. Sampai kami membentuk kelompok kerja penyusunan kebijakan PHBS di madrasah.²¹

Setelah disepakati kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua maka dilakukan pelatihan PHBS dokter kecil dan pangeran sehat bertempat di MIN Arso III Kab. Keerom).

Peralatan penolong (*first aid kit*), obat dan bahan (untuk membersihkan tangan: sabun, alkohol) untuk mencuci luka : (dettol, povidon iodone) untuk menyadarkan (minyak angin, parfum) salap untuk gigitan serangga), Alat: (sarung tangan, pinset, kapas, kassa, plester, gunting dan pembalut), Pingsan: (pingsan, hilanya kesadaran sementara karena otak kekurangan O₂, kecelakaan, lapar, terkejut/kaget,

²¹Arsad R. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

dehidrasi, amenia, dll), gejala awal pingsan: (pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, napas tidak teratur, muka pucat, mata tampak melebar, lemas, keringatan dingin), penanganan korban pingsan: (baringkan korban dalam pisis terlentang, tinggikan kaki melebihi badan, longgarkan pakaian yang mengikat dan hilangkan barang yang menghambat pernapasan, beri udara segar), perawatan luka: (penolong harus mencuci tangan, jangan menyentuh luka darah secara langsung, pakailah sarung tangan, bersihkan luka dengan air/pembersih luka, berikan obat antiseptik atau betanol), luka tersayat: luka bakar: (segera didinginkan luka dengan air mengalir, keringkan luka pelan-pelan, oleskan obat luka bakar hindari mengoleskan mentega, kecap, pasta gigi, melepas dengan paksa pakaian yang melekat pada badan), mimisan: (perdarahan karena pecah pembuluh darah hidung, pertolongan duduk dikursi, posisi kepala menunduk, menjepit hidung selama 5-10 menit untuk menghentikan perdarahan, bernapas lewat mulut, berikan kompres es di daerah hidung), memar: (penyebab: terbentur, terkilir, pertolongan: korban diposisikan agar lebih nyaman, istirahatkan daerah yang cedera, kompres dengan es yang dihubungkan kain, tinggikan bagian yang cedera), alergi: (reksi tubuh yang lebih sensitif dari kondisi normal terhadap makanan, benda asing yang masuk kedalam tubuh, penyebab: makanan, gigitan serangga, gejala: kemerahan pada kulit, gatal, bengkak sekitar mata, sesak napas, pertolongan: tenangkan korban, berikan kompres pada tempat gatal, berikan obat anti alergi).

Wawancara dengan Hersy Sabatini sebagai pencetus ide sekolah sehat berbasis PHBS.

Benar, saya yang menawarkan kerjasama ini, saya memilih MIN untuk dijadikan sebagai sekolah

percontohan program sekolah sehat berbasis PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) saya amati dan melihat sekolah sangat maju dan jujur bahwa MIN bisa diajak kerja sama dalam program yang saya impikan ini, terbukti kepala dan guru-guru MIN sangat respon program ini.²²

Langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana wawancara lanjut dengan Hersy Sabatini sebagai berikut:

Untuk merealisasikan program PHBS, langkah (1) melakukan kesepakatan dengan stakeholdes, yakni: melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan, melakukan koordinasi dengan stakeholder yakni, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengenai sekolah sehat berbasis PHBS, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. (2) membentuk Tim kerja sehat berbasis PHBS, yakni: mengidentifikasi sumberdaya tim sesuai dengan pembagian tugas dan prannya, melakukan rapat pembentukan tim kerja sehat berbasis PHBS, membuat SK tim kerja, menentukan satu sekolah sebagai pilot project. (3) tersedianya papan control kesehatan, yakni: melakukan koordinasi dengan narasumber, melakukan persiapan sosialisasi sekolah sehat berbasis PHBS, melakukan seosialisasi PBHS, melakukan persiapan pembuatan papan kontrol kesehatan, melakukan pembuatan papan control kesehatan. (4) terbentuknya papan perangkat PHBS yakni: melakukan koordinasi dengan narasumber, melakukan persiapan dokter kecil dan jenderal sehat, melakukan kegiatan dokter kecil dan jenderal sehat, penyerahan sertifikat dokter kecil. (5) melakukan koordinasi dengan narasumber, melakukan FGD melalui kelompok kerja kepala sekolah, melakukan

²²Hersy Sabatini, pencetus ide sekolah sehat berbasis PHBS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

kesepakatan bersama kepala-kepala sekolah, (6) terlaksananya sekolah sehat masyarakat yakni: melakukan persiapan louncing sekolah sehat, melakukan pembacaan deklarasi sekolah sehat, melakukan louncing sekolah sehat, melakukan evaluasi. Saya sebagai pegawai awalnya pegawai Dinas Kesehatan ditempatkan dipuskesmas Arso III, berdekatan dengan MIN. sekarang dipindahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kab. Keerom. Dan untuk merealisasikan program PHBS maka saya mengajak teman-teman kerja di lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan khususnya bidang pemenuhan hak anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Keerom.²³



²³Hersy Sabatini, pencetus ide sekolah sehat berbasis PHBS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), *Wawancara*, Keerom, 3 Nopember 2019.

²⁴ Hersy Sabatini, bersama Bupati Kab. Keerom, dalam hal Bupati memberikan apresiasi serta dukungan atas nama pemerintah kab. Keerom terhadap program pencaangan madrasah ibtidaiyah negeri Keerom berbasis madrasah berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), siapa Hersy Sabatini, beliau adalah pemerhati kesehatan anak dan inisiator sekolah/madrasah berbasis PHBS, beliau juga sebagai staf aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan khususnya bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Keerom-Papua.

Wawancara selanjutnya dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Juli Ratnaningrum Andari sebagai berikut:

Saya sangat mendukung Program perubahan sekolah sehat berbasis PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) karena merupakan salah satu indikator menuju Kab. layak anak. Harapannya kegiatan ini bisa terrealisasi dan diterapkan di semua sekolah agar tercapainya presentasi peningkatan sekolah ramah anak.²⁵



Dokumen. 7 ²⁶

Wawancara penulis bersama dengan Bertha Sapan Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan: Bidang Pemenuhan hak anak sebagai berikut:

Program sekolah berbasis PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) menuju Sekolah Ramah Anak (SRA),

²⁵Juli Ratnaningrum Andari, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

²⁶Peneliti bersama Ibu Ratnaningrum Andari, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Keerom-Papua. Ibu Ratnaningrum Andari, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada stafnya sebagai inisiator program PHBS pada sekolah. Menurutnya program ini bagian dari indikator menuju Kabupaten layak anak. Ratnaningrum Andari juga sebagai penggagas sekolah ramah anak pada kab. Keerom-Papua, menurutnya sebelum menuju sekolah ramah anak terlebih dahulu sekolah wajib menerapkan program sekolah berbasis perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terlebih dahulu.

program ini sejalan dengan program dinas pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak dimana anak harus dilindungi, sekolah yang tidak ada kekerasan terhadap anak dan sebaliknya, anak tumbuh dengan sehat tentu belajar dengan baik sesuai yang kita harapkan, sehingga saya sangat mendukung dan terlibat juga untuk membantu Ibu Hersi, agar program ini terlaksana, segarah bentuk tim kerja, koordinasikan kepada kepala dinas dan instansi terkaitnya.²⁷

Wawancara, Kepala Kampung Happyarr Smart Waramori)

Saya mendukung kegiatan ini melalui keterlibatan dalam memberi sosialisasi di MIN keerom tentang sekolah sehat berbasis PHBS. Saran saya, kegiatan ini perlu ditindaklanjuti untuk mewujudkan sekolah sehat dengan melibatkan dan memperdayakan banyak pihak untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.²⁸

Lanjut wawancara dengan Supratman Guru Olahraga (penanggung jawab UKS MIN)

Mulanya Ibu Hersy Sabatini bermusyawarah dengan pihak madrasah tentang program PHBS, kami sangat merespon program ini dan segera ditindaklanjuti dan kami ingin kerjsama semua pihak terkait program ini sangat diharapkan. Selanjutnya oleh kepala madrasah menunjuk saya sebagai penanggung jawab program ini>. Kami siap karena madrasah memiliki ruang UKS yang memadai, ketika ruang UKS lihat keberadaannya

²⁷Bertha Sapan, Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan: Bidang Pemenuhan Hak Anak, *Wawancara*, Keerom, 29 Nopember 2019.

²⁸Happyarr Smart Waramori, Kepala Kampung, *Wawancara*, Keerom, 29 Nopember 2019.

oleh Ibu Hersy sebagai pencetus program, ibunya sangat senang sekali.²⁹

Lanjutan wawancara dengan Supratman sebagai berikut:

Untuk merealisasikan kegiatan ini bersama ibu hersy maka dipilih dua jenis kegiatan pertama membentuk dokter kecil dan kedua membentuk jenderal sehat, kegiatan ini melibatkan anak-anak diambil 2 orang anak dari tiap tiap ruangan ada 10 ruangan. Berjumlah 20 anak. Kemudian dilakukan palatihan oleh ibu Hersy bersama tim, melibatkan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas kesehatan khususnya puskesmas Arso III di Kab. Keerom.³⁰

Lanjut kata Supratman dalam wawancara dikatakan:

Dokter kecil dan jenderal sehat tugasnya di antaranya: sala satu kegiatan UKS dan setiap madrasah yang melaksanakan UKS harus mempunyai dokter kecil, dokter kecil adalah murid kelas 4,5,dan 6, berbadan sehat, bersih dan rapi, prestasi belajar baik, rajin berbudi pekerti baik, dan suka menolong dan mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, lulus mengikuti penataran dan dilantik oleh pejabat berwenang (dokter) Tugas dokter kecil dan jenderal sehat adalah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menggerakkan teman-teman untuk menerapkan PHBS di madrasah, menjaga kesehatan lingkungan di madrasah dan di rumah, membantu

²⁹Supratman Guru Olah Raga/Penanggung jawab UKS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), *Wawancara*, Keerom, 13 Nopember 2019.

³⁰Supratman Guru Olah Raga/Penanggung jawab UKS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), *Wawancara*, Keerom, 13 Nopember 2019.

guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan di madrasah, terbentuk dan terlaksana sampai sekarang.³¹



Dokumen.8 ³²

Wawancara dengan Sumarni sebagai berikut:

Betul ada kegiatan PHBS di MIN, peserta didik menggerakkan, membimbing teman melaksanakan: pengamatan, kebersihan kesehatan pribadi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, penyuluhan kesehatan, membantu mendistribusi obat cacing, vitamin dan lain (P3K), pertolongan pertama

³¹Supratman Guru Olah Raga/Penanggung jawab UKS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), *Wawancara*, Keerom, 13 Nopember 2019.

³²Peneliti bersama, Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah (Bpk. Supratman) Supratman adalah penanggungjawab UKS menurutnya terbentuknya dokter kecil dan jenderal sehat dengan tugas dan fungsi diantaranya; melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menggerakkan teman-temannya untuk menerapkan PHBS di madrasah, menjaga Kesehatan lingkungan di madrasah dan rumah, membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan Kesehatan di madrasah.

pada penyakit (P3P) serta pengenalan dini tanda-tanda penyakit.³³



Dokumen. 9. Pencanangan Madrasah berbasis PHBS.³⁴

Adapun kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik sebagai berikut:

Dalam kegiatan PHBS kami selalu diminta untuk membersihkan rambut secara teratur dan menyisirnya

³³Sumarni, Guru Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

³⁴Pencanangan Madrasah Berbasis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh Bupati Kab. Keerom Bersama dengan dinas terkait diantaranya. Dinas Pemberdayaan Perenpuan dan perlindungan Anak Ka. Keerom, Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup kab. Keerom. Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo serta Kementerian Agama Kab. Kab. Keerom. Provinsi Papua.

sampai rapih supaya tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berketu. Memeriksa kebersihan dan kerapihan rambut dilakukan oleh dokter kecil di madrasah ini karena di sini ada dokter kecil, biasa juga guru UKS yang memeriksa kami biasa rambut ini diperiksa satu kali satu pekan.³⁵



Dokumen. 10 Pelatihan PHBS. ³⁶

Wawancara selanjutnya dengan dokter kecil sebagai berikut:

Saya sebagai dokter kecil selalu menganjurkan teman-teman memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Bahkan saya sebagai dokter kecil membantu memotong kuku teman-teman secara teratur dan membersihkannya sehingga tidak hitam/kotor. Memeriksa kuku secara rutin minimal seminggu sekali.³⁷

Wawancara selanjutnya kepada guru bahwa dalam kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-

³⁵Peserta Didik Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

³⁶Kegiatan pelatihan dokter kecil dan jenderal sehat. Menurut Hersy Sabatini, dalam pelaksanaannya bertujuan memberikan pemahaman awal kepada siswa tentang apa dan bagaimana dokter kecil dan jenderal sehat serta tugas dan fungsinya.

³⁷Dokter Kecil Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Papua peserta didik diajarkan mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun:

Peserta didik diajarkan dan mempraktikkan langsung mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar/sesudah buang air kecil, sesudah beraktivitas, dan atau setiap kali tangan kotor dengan memakai sabun dan air bersih yang mengalir. Air bersih yang mengalir akan membuang kuman-kuman yang ada pada tangan yang kotor, sedangkan sabun selain membersihkan kotoran juga dapat membunuh kuman yang ada di tangan. Diharapkan tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman serta dapat mencegah terjadinya penularan penyakit seperti: diare, disentri, kolera, tipus, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan flu burung.³⁸

Wawancara selanjutnya kepada kepala madrasah bahwa dalam kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua Membuang Sampah ke Tempat Sampah yang Terpilah

Peserta didik, guru, dan warga madrasah dibimbing membuang sampah ke tempat sampah yang tersedia. Di madrasah ini tersedia tempat sampah yang terpilah antara sampah organik, non-organik, dan sampah bahan berbahaya. Sampah selain kotor dan tidak sedap dipandang juga mengandung berbagai kuman penyakit. Membiasakan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia akan sangat membantu Peserta didik, guru, dan warga madrasah terhindar dari berbagai kuman penyakit.³⁹

Wawancara selanjutnya kepada guru bahwa dalam kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada

³⁸Sumarni, Guru Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

³⁹La Hardi, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua yaitu diajarkan dan dipraktikkan mengkonsumsi jajanan sehat dan bersih di kantin:

Peserta didik dianjurkan mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin/warung madrasah atau bekal yang dibawa dari rumah. Madrasah ini telah menyediakan warung madrasah sehat dengan makanan yang mengandung gizi seimbang dan bervariasi, sehingga membuat tubuh sehat dan kuat, angka absensi anak madrasah menurun, dan proses belajar berjalan dengan baik.⁴⁰

Wawancara selanjutnya kepada guru bahwa dalam kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan:

Peserta didik di madrasah ini selalu ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan setiap bulan agar diketahui tingkat pertumbuhannya. Hasil penimbangan dan pengukuran dibandingkan dengan standar berat badan dan tinggi badan sehingga diketahui apakah pertumbuhan peserta didik normal atau tidak normal.⁴¹

Berdasarkan uraian wawancara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) Kab. Keerom-Papua berjalan dengan lancar sehingga tercipta madrasah yang bersih dan sehat sehingga peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan madrasah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit sehingga semangat proses pembelajaran berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Citra madrasah sebagai

⁴⁰Binti Hasanah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

⁴¹Supratman Guru Olah Raga/Penanggung jawab UKS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

institusi pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua. Meningkatkan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan dan menjadi percontohan madrasah sehat bagi daerah lain.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan di luar jam pelajaran madrasah yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di madrasah. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler didasari atas tujuan dari pada kurikulum madrasah.

Melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Isi program ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua memuat kegiatan-kegiatan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian, seperti kepramukaan, Usaha Kesehatan Madrasah (UKM), olahraga, palang merah, kesenian, dan kegiatan keagamaan.

Berikut uraian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua:

1) Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada peningkatan kualitas peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua melalui bimbingan peserta didik dalam upaya membina kreativitas peserta didik agar prestasi peserta didik semakin meningkat. Kegiatan ekstrakurikuler untuk memperluas pengetahuan peserta didik dalam rangka mengenal keterkaitan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan

bakat dan kreativitas serta membina meningkatkan akhlak mulia peserta didik.

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang dilakukan oleh guru pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua di samping dilaksanakan oleh para peserta didik di lingkungan madrasah juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya dan itu di luar jam pelajaran madrasah termasuk pada hari libur, seperti hari ahad, Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), sebagai berikut:

Untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran di kelas, dan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas peserta didik, sekaligus sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan para peserta didik di madrasah ini, banyak di antara mereka yang memanfaatkan waktu luangnya di luar jam pelajaran, seperti pada sore hari, hari ahad, dan hari libur lainnya untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran, dengan tujuan agar kualitas peserta didik semakin meningkat. Kenyataannya banyak peserta didik yang sangat antusias yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan rata-rata mereka yang berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Kegiatan ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat sekitar, termasuk dalam hal pendanaan, karena dalam peraturan pemerintah itu tidak ada pelanggaran selama bukan iuran atau kewajiban bagi orang tua peserta didik, dana itu diberikan sesuai dengan keihklasan dan kemampuan.⁴²

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) sebagai bentuk pembinaan dan pelatihan kepada peserta didik agar terarah dan memberi manfaat terhadap bakat dan kreativitas

⁴²Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

peserta didik yang pada intinya meningkatkan kualitas peserta didik. Peranan dan keterlibatan para pembina dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah guru memiliki skil tertentu dan masyarakat yang memiliki keterampilan ikut berperan serta dan ini sangat penting, sehingga segala kegiatan peserta didik pada madrasah tersebut memberikan manfaat terhadap kegiatan intrakurikuler.

Masyarakat sekitar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) berpartisipasi dalam program ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh madrasah tersebut. Dalam keterangannya guru Pembina kegiatan ekstrakurikuler mengatakan bahwa:

Tingkat kesadaran masyarakat sebagai orang tua dirasakan cukup tinggi dalam berpartisipasi pada kegiatan ekstrakuler di madrasah ini. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler termasuk cukup tinggi, karena mereka selalu melaksanakan pengawasan dan merealisasikan tugas dan memproses peserta didik yang melanggar tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan di madrasah ini, bahkan keikutsertaan mereka dalam menyukseskan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah ini dirasakan sangat bermanfaat.⁴³

Program ekstrakurikuler disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan, dan pembiasaan peserta didik agar memiliki kemampuan dasar penunjang khususnya dalam upaya meningkatkan akhlak mulia peserta didik.

Kegiatan yang dimaksud dalam wawancara diuraikan oleh wakil kepala madrasah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), sebagai berikut:

Kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) di madrasah ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu ekskul olahraga,

⁴³Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

seni, Penalaran, BTQ, dan Cinta Bangsa dan Tanah Air atau lebih sering disingkat sebagai *CBTA*. Pembagian ini didasarkan pada beberapa hal yaitu seksi yang mengurus kegiatan tersebut. Bila pada ekskul olahraga, maka seksi olahraga OSIS merupakan pengurusnya. Hal ini berlaku untuk ekskul jenis lainnya. Semua kegiatan itu pihak madrasah mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya, dan Alhamdulillah masyarakat sekitar antusias dalam berpartisipasi baik berupa dukungan moril, tenaga, dan dana.⁴⁴

Sementara pelaksanaan kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler pilihan dilaksanakan sore hari, meliputi kegiatan Drumband, Qiroati, Kaligrafi dan Khod, Pramuka dan Rebana. Prestasi formal dari kegiatan rutin tersebut belum begitu banyak karena tujuan utama kegiatan memang bukan prestasi formal melainkan hanya penerapan tuntutan konsep pendidikan seumur hidup. Meskipun demikian prestasi yang lebih dari sekedar formal seringkali dilihat masyarakat secara langsung, misalnya menyaksikan anak-anaknya menunjukkan kebolehan sebagai parade Drumband pada Upacara Kemerdekaan, tampil menunjukkan kekompakannya menghibur masyarakat pada acara keagamaan dengan Rebana atau Qiroati. Prestasi yang tak kalah membanggakan orang tua adalah ketika mendapati putra-putrinya mahir membaca Quran dan tulisan Indonesia pada usia lebih dini. Prestasi unik juga sering mendapat pengakuan dari orang tua peserta didik dan guru, yaitu adanya beberapa anak yang tertinggal kemampuan akademisnya namun ternyata trampil memainkan alat musik dalam team.⁴⁵

⁴⁴Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

⁴⁵Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang disesuaikan dengan kegiatan kurikuler. Tahfidz mendukung mayoritas pelajaran agama yang banyak menuntut hafalan. Iqro' mendukung semua kegiatan baca-tulis anak yang berhuruf latin, dan Iqro' BTA mendukung semua kegiatan baca-tulis yang berhuruf Arab. Jadi, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, anak lebih siap mengikuti kegiatan kurikuler.⁴⁶

Sebelum diterapkan ekstra wajib ini banyak peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) yang belum lancar membaca hingga kelas 5 bahkan beberapa di antaranya sulit membaca arab meskipun telah lulus. Setelah kegiatan ini diterapkan, sekarang semua peserta didik lancar membaca Arab maupun Indonesia di kelas rendah , artinya lebih siap belajar di kelas tinggi. Kesiapan anak ini terlihat dari hasil ujian madrasah atau madrasah yang setiap tahun rata-ratanya meningkat. Peningkatan prestasi tersebut tentunya dampak dari peningkatan prestasi peserta didik secara umum. Dengan kata lain, kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), berdampak baik terhadap prestasi akademis peserta didik.⁴⁷

Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik berpartisipasi dalam program ekstrakurikuler karena kepentingan memperoleh pengetahuan baru dan alasan pengembangan diri. Hal ini tampak pada ekstra wajib yang ternyata keterlibatan peserta didik utama muncul karena kepentingan intrinsik, yaitu mengejar targetnya menyelesaikan materi kegiatan. Kegiatan ekstrakurikuler memberi pengalaman bagi perkembangan interpersonal yang positif yaitu terbentuknya

⁴⁶Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

⁴⁷Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

konsep diri dan konsep sosial yang juga positif sehingga mampu mendorong anak memperbaiki kehidupannya.

Dampak pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) tersebut membantu peserta didik untuk meningkatkan prestasinya. Peserta didik yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler secara aktif mempunyai nilai akademis yang lebih baik dan kegiatan ekstrakurikuler member kontribusi bagi perkembangan peserta didik sehingga sukses di kehidupan dewasa.

Penulis melakukan observasi berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), sebagai berikut: di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) menetapkan buku materi atau acuan, dan sistem penilaian atau evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Buku panduan ekstra Baca Tulis Indonesia menggunakan buku Anak Islam Suka Membaca karya Nurani Musta'in mulai jilid 1 sampai 5, Baca Tulis Arab menggunakan buku Iqro' karya KH. As'ad Humam jilid 1 sampai 6, Komputer dengan langkah-langkah belajar Microsoft Word yang ditulis oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) sendiri.⁴⁸

Selanjutnya pada tanggal 16 penulis melanjutkan observasi kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) sebagai berikut: baik Iqro, takhfid dan komputer dilaksanakan secara individual dengan kartu prestasi yang mencantumkan jenis kegiatan, jenis kemampuan, halaman materi yang diuji, hari dan tanggal ujian, penguji dan tanda tangannya, serta hasil ujian yaitu keterangan lulus atau mengulang. Dalam ujian, peserta didik menyiapkan sendiri buku panduan dan kartu prestasi serta memdalam materi sendiri atau minta bantuan teman.

Jika dinyatakan mengulang, peserta didik medalami sendiri materi perbaikan lalu maju kembali untuk minta diuji. Jika dinyatakan lulus, maka peserta didik mempelajari

⁴⁸Observasi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

materi lanjut sendiri atau minta bantuan teman yang levelnya lebih tinggi, sementara pembimbing hanya melayani, tidak dituntut membuat persiapan atau rencana. Dalam kegiatan tersebut beberapa remaja yang ikut berpartisipasi sehingga keterlibatan remaja pada kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh positif terhadap perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan bagi terbangunnya harga diri. Kemandirian peserta didik adalah cermin karakter yang positif.⁴⁹

Memperhatikan penjelasan wawancara, dokumen, dan observasi tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara berkesinambungan, dan masyarakat ikut berpartisipasi, berarti kegiatan ekstra tersebut sangat efektif dan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

Dalam pembinaan intelektual dan kematangan dalam berpikir peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) diberi kebebasan dan peluang kepada peserta didik juga kepada para tenaga pendidiknya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui kegiatan-kegiatan mengikuti kajian keislaman tanpa mengabaikan proses pembelajaran intrakurikuler.

Dorongan untuk memasuki organisasi-organisasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) tersebut menjadi lebih kuat ketika terdapat beberapa anggota mereka berkualitas yang kemudian menonjol dan cukup terkemuka baik dalam lingkungan madrasah maupun di luar setelah mereka menyelesaikan studinya pada lembaga pendidikan ini. Adanya kegiatan ekstrakurikuler tersebut menambah wawasan pemahaman serta dapat membentuk pola pikir peserta didik menuju pada kedewasaannya dalam berpikir sehingga prestasinya semakin meningkat.

Melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom

⁴⁹Observasi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

(Arso III) baik dari segi tenaga dan dana maka madrasah lebih leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikan sesuai prioritas kebutuhan dan tanggap terhadap lingkungan setempat, meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, selain itu juga memberi kebebasan madrasah dalam merancang berbagai kebijakan sesuai visi, misi, dan tujuannya.

2. Partisipasi dalam Pengawasan Kegiatan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kab. Keerom-Papua

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua dengan artian dalam ikut membantu mengawasi kegiatan pendidikan.

Berdasarkan hasil studi partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua telah dilakukan oleh beberapa wali peserta didik karena dan tidak semua masyarakat ikut melakukannya karena bagi sebagian masyarakat yang bukan merupakan wali peserta didik hanya ikut mengawasi jalannya pembelajaran di madrasah yaitu ketika terjadi ketidaktepatan terhadap pelaksanaan pendidikan masyarakat berhak memberikan kritikan dan masukan terhadap madrasah

Meskipun menurut pengakuan beberapa masyarakat di antaranya:

Ketika melihat suatu ketidaktepatan dalam pelaksanaan pembelajaran masyarakat tidak menyampaikan secara langsung dengan pihak madrasah tetapi disampaikan melalui komite atau

bahkan ada sebagian dari mereka yang memilih untuk mengkritik hanya di belakang saja.⁵⁰

Berbeda dengan masyarakat yang merupakan wali peserta didik di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua yang mengatakan:

Saya pernah datang ke madrasah untuk kepentingan berkonsultasi kepada guru seputar masalah anak, beberapa kasus yang dilaporkan yaitu tidak mau memotong rambut yang panjang, nilai rapot menurun, berkelahi dengan teman baik di rumah atau di madrasah.⁵¹

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan standar pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua. Yang ikut adalah orang tua peserta didik dengan memberikan kritikan untuk proses belajar mengajar wali peserta didik lebih berperan dibandingkan dengan masyarakat yang bukan merupakan wali peserta didik pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua.

Hal ini membenarkan bahwa orang tua di lingkungan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua menganggap guru lebih mempunyai potensi dalam memberikan arahan kepada anaknya dibandingkan dirinya sendiri, antusias terhadap keberadaan madrasah di desa mereka masih tinggi sehingga guru mempunyai kedudukan guru dipandang tinggi di masyarakat.

Dapat dilihat meskipun dalam uraian tersebut kasus yang dilaporkan tergolong ringan tetapi kasus semacam ini merupakan masalah yang harus di atasi karena jika dibiarkan dapat memberi pengaruh buruk pada masa depan

⁵⁰ Tokoh Masyarakat di Lingkungan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III).

⁵¹Orang Tua Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Arso III.

mereka. Berkelahi merupakan bentuk kurang baiknya hubungan sosial antara anak tersebut dengan temannya sedangkan kerapian juga diperlukan demi tercapainya aturan yang telah ditetapkan oleh pihak madrasah, tidak kalah penting yaitu menyangkut dengan nilai karena nilai rapot dapat menentukan kepentingan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Terbentuknya suatu pendidikan yang seimbang dengan masyarakat diperlukan kerja sama antara madrasah dengan masyarakat sebagai contoh yaitu memulai hal dari yang terkecil seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Masyarakat sudah mau membantu kelangsungan proses belajar mengajar.

Kaitannya dengan pengembangan standar pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua yang merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai mitra kerja dengan keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas membentuk warga masyarakat dan warga negara seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional. Madrasah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Madrasah mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaannya, dan sebaliknya madrasah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan hubungan edukatif di pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua, partisipasi masyarakat banyak melalui komite madrasah yang wadah bagi para wali peserta didik dan masyarakat menyampaikan aspirasinya serta menjadi wadah mempublikasi keadaan pendidikan yang ada pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua.

Sudah menjadi tugas pihak madrasah untuk menampung aspirasi serta masukan dari pihak wali peserta

didik dan masyarakat serta mempublikasi keadaan pendidikan dan pengajaran di madrasah dan bersinergi demi sebuah kerja sama di antara madrasah dan masyarakat.

Berikut petikan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) yang menyatakan:

Kaitannya dengan Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua Iya, kami menampung masukan dari pihak masyarakat, serta mengenai dalam Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua yang menurut kami pantas untuk disampaikan ya kami sampaikan kepada masyarakat.⁵²

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) di perkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri III sebagai berikut:

Iya, madrasah memberikan publikasi kepada masyarakat misalnya pada saat rapat komite dengan wali peserta didik serta dalam kegiatannya madrasah melibatkan masyarakat, Kaitannya dengan Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua terutama masyarakat sekitar madrasah dilibatkan dalam acara-acara tertentu yang nantinya masyarakat akan melihat sendiri bagaimana keadaan pendidikan di madrasah.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukan bahwasanya hubungan madrasah dengan masyarakat di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua yaitu membuat publikasi Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Kab. Keerom-Papua

⁵²Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

⁵³Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Arso III

sehingga dapat diketahui bahwa pihak madrasah terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan madrasah itu dibicarakan melalui rapat yang melibatkan masyarakat serta pihak madrasah juga telah mengupayakan membuat publikasi tentang keadaan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di madrasah dan menginformasikan prestasi serta ciri khasnya.

Hubungan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua dengan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam pengembangan standar pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua. Untuk membina hubungan baik dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas menunjukkan, bahwa pihak Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua pihak madrasah membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada, diketahui pula bahwa Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua telah membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada serta terjalin hubungan yang harmonis antara pihak madrasah dengan masyarakat.

Sedangkan untuk masalah pertemuan rutin dengan masyarakat pihak Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua belum melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa hubungan madrasah dengan masyarakat hanya sekedar hubungan pihak wali peserta didik dan pihak madrasah saja. Belum pada hubungan kerja sama guna mengembangkan madrasah atau kerja sama yang saling menguntungkan antara keduanya.

Berdasarkan hasil analisis penulis melihat bahwa keberhasilan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua dalam Pengembangan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di dikarenakan semakin baiknya koordinasi antara anggota panitia, karena di dalamnya

mereka belajar untuk mengambil keputusan, melakukan pengorganisasian dan koordinasi, melakukan kontrol serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis penulis melihat pula kelebihan lainnya adalah adanya penyebaran wewenang sehingga wewenang tidak disalahgunakan melalui penugasan. Di samping itu, karena panitia biasanya terdiri dari beberapa orang, kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan juga semakin mudah. Panitia juga bisa digunakan oleh manajer untuk meminimalisir dampak gagasan atau saran yang berkonsekuensi negatif melalui penerapan kebijakan secara bijaksana.

Untuk bisa melaksanakan kegiatan yang bernuansa sosial seperti yang dikemukakan di atas, madrasah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan semua kegiatan dan harapannya. Kebebasan berkreasi ini jelas menuntut kelancaran komunikasi di dalam lingkungan madrasah serta suasana kondusif. Setelah setiap orang mempunyai kejelasan peran dan tanggung jawab, maka tibalah saatnya pelaksanaan atau implementasi kegiatan.

Hasil analisis penulis melihat adanya komunikasi madrasah dengan masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang dilakukan madrasah dengan masyarakat tersebut bertujuan membentuk citra positif madrasah di mata masyarakat sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dan bekerja sama dengan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Setelah masyarakat memahami program pendidikan yang dilaksanakan madrasah, diharapkan masyarakat memberikan umpan balik kepada madrasah berupa kritik, saran, ide-ide, serta kebutuhan mereka di bidang pendidikan. Manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ditentukan oleh lancarnya komunikasi internal madrasah.

Kebebasan guru dan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat menyebabkan mereka merasa telah dan merasa sebagai bagian yang dibutuhkan di dalam madrasah. Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut membuat

setiap kreasi yang mereka buat terasa dihargai dan didukung oleh pihak madrasah. Kebebasan berkreasi tersebut pada akhirnya membutuhkan kehadiran masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelajaran pendidikan. Untuk menghadirkan masyarakat, hubungan masyarakat dengan masyarakat adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dengan peran manajemen hubungan masyarakat yang baik, kehadiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih mudah dikoordinir sesuai dengan kebutuhan madrasah.

Pengendalian di sini dimaksudkan untuk menjaga kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan dilakukan pada tiap tiap kegiatan sesuai dengan jenis dan bentuk kegiatan, yang paling diperlukan adalah pengendalian terhadap proses komunikasi dengan mempersiapkan komunikator, dan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Proyeksi ke depan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua sangat memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan Standar Pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Kab. Keerom-Papua karena berdasarkan hasil analisis penulis menunjukkan adanya HUMAS Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, HUMAS Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, HUMAS Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua juga mengetahui dengan jelas kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap madrasah. Dengan perkataan lain, antara madrasah dan masyarakat dibina suatu hubungan yang harmonis.

HUMAS Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang

HUMAS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua sehingga HUMAS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua melakukan proses komunikasi antara madrasah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam peningkatan dan pengembangan madrasah. Humas ini merupakan usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara madrasah, personel madrasah dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sekitar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua dalam berbagai aspek mulai dari menjadi pembina kegiatan ekstrakurikuler, menjadi penyumbang dana, penyumbang sarana, material bangunan, dan sejumlah bentuk partisipasi lainnya, ini akan lebih menjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan antara madrasah dan masyarakat dengan melalui pengelolaan yang baik, yaitu dalam berkomunikasi, madrasah bisa memahami kondisi masyarakat, madrasah memberikan pelayanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Prospek ke depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua sangat ditunjang dengan kegiatan pihak madrasah untuk melakukan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan madrasah, Peningkatan pemahaman madrasah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap madrasah, peningkatan usaha orang tua peserta didik dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua peserta didik dalam pendidikan di madrasah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di madrasah dalam era pembangunan, pertanggungjawaban madrasah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada madrasah, dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam

memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program madrasah.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua

Suksesnya pembelajaran di madrasah didukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di madrasah secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang ada di madrasah tersebut perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di madrasah.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan. Begitu pentingnya sarana prasarana pendidikan sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tidak itu saja, kelengkapan sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu daya tarik bagi calon peserta didik.

Untuk mencapai hasil tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di madrasah, mulai dari jenis peralatan yang dibutuhkan sampai pada bagaimana melakukan pengadaan dan pendistribusian, perlengkapan serta pengawasan, dan penggunaan juga pemeliharannya agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan sesuai peruntukannya dengan maksimal.

Sarana dan prasarana pendidikan di madrasah tidak dikelola dengan pengetahuan yang cukup sehingga sering terjadi ketidaktepatan dalam pengelolaan. Ketidaktepatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menyangkut cara pengadaan, penanggung jawab dan pengelola, pemeliharaan dan perawatan, serta penghapusan. Itulah sebabnya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam

melaksanakan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua.

Masyarakat merupakan partner madrasah dalam melaksanakan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua, karena madrasah merupakan bagian integral dari masyarakat. Kerjasama antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan operasional, baik moral maupun finansial. Hubungan madrasah dengan masyarakat sebenarnya sudah disentralisasikan, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Persoalannya sebagaimana madrasah dapat lebih mengoptimalkan serta meningkatkan intensitas dan ekstensitas hubungannya dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua khususnya yang berkaitan dengan pengembangan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua.

1. Pengembangan Sarana Utama dan Prasarana/Alat Pembelajaran

Sarana dan prasarana pendidikan di madrasah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. *Kedua*, prasarana madrasah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Ruang kantor, kantin madrasah, tanah dan jalan menuju madrasah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan madrasah, ruang guru, ruang kepala madrasah dan tempat parkir.

a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suprianto tokoh masyarakat Islam, sebagai berikut:

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom lahir berawal dari keinginan tokoh-tokoh Agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Keerom akan adanya pendidikan Islam yang representatif. Pada awalnya MIN Keerom bukanlah Madrasah Ibtidaiyah, melainkan TPA yang bertempat di SMA Pembangunan 5 YAPIS. Yang dikepalai oleh Bapak H. Muhtar Hadi. Sementara bangunannya merupakan swadaya masyarakat dari Kampung Jaifuri. Yang terdiri dari 1 ruang kantor dan 2 ruang kelas. Kemudian dipindahkan dengan menggunakan tanah fasilitas umum (Desa) dimana masyarakat bermusyawara melalui LMD/ BAMUSKAM, tempat inilah para tokoh lintas agama bermusyawarah untuk membagikan tanah fasilitas umum tersebut kepada masing masing agama untuk dijadikan fasilitas umum keagamaan. Lebih lanjut Suprianto mengatakan di antara tokoh tersebut adalah Islam H. Mukhtar hadi, (alm), H. suprianto, H. Misran, dan tokoh Kristen, bapak. Yaum Majelis, bapak Pujo Katolik. Masing-masing mendapat 1 h tanah. Khusus Islam tanah tersebut disepakati para okohnya untuk dibangun Madrasah Ibtidaiyah (MI) pembangunan madrasah MI terdiri dari tiga (3) lokal dengan ukuran 8 x 7 m₂, ada juga ruang guru dan TU, serta ruang kepala madrasah, pada tahun 1993-1994 selanjutnya madrasah tersebut oleh pengurus dialistatuskan kelembagaanya menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jaifuri Arso III pada tahun 1995., awal berdirinya adalah swadaya masyarakat.⁵⁴

Wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) sebagai berikut:

⁵⁴Suprianto, Tokoh Masyarakat Islam Kab. Keroom, Arso Tiga dan juga sebagai tokoh perintis (di antara para tokoh perintis adalah; H. Mukhtar Hadi, (alm), H. Suprianto, dan H. Misran) Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

Melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Keerom tentang program adiwiyata, yang merupakan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Departemen Pendidikan Nasional, bertujuan menciptakan kondisi yang baik bagi MIN untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga MIN (guru, murid & warga sekitarnya) sehingga di kemudian hari warga MIN dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan. Sementara pengadaan lahan, kelas, dan ruang pimpinan itu ada dari masyarakat⁵⁵

Lebih lanjut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Keerom, mengatakan bahwa:

Prinsip dasar Adiwiyata di antaranya partisipatif, yang diharapkan komunitas madrasah (masyarakat, dan warga madrasah) terlibat dalam manajemen madrasah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, & evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran. Lebih lanjut La Hardi menjelaskan bahwa program Adiwiyata ini, dibagi dalam 21 Pokja. Di antaranya pokja Penghijauan, pokja *green house*, pokja daur ulang, pokja kolam ikan, pokja bank sampah, pokja, apotik hidup, pokja kompos, pokja slogan, pokja penataan taman, pokja dokumentasi tentang lingkungan, pokja kantin, pokja toilet, pokja pembibitan, pokja kesehatan, pokja kebun madrasah, pokja mading lingkungan hidup, pokja budaya lingkungan, pokja hari-hari lingkungan hidup, pokja ekstra kurikuler dan pokja keamanan, serta tim monev. Sebagian besar terlaksana dari tiap-tiap pokja ini adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam membantu memberikan pendidikan kepada para

⁵⁵Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

peserta didik madrasah dan guru sesuai dengan keahlian masing-masing.⁵⁶

Selain itu, peran serta masyarakat berupa dana dan tenaga bahkan pemikiran, hal ini dapat dikatakan berhasil sesuai hasil observasi penulis melalui material timbunan dan pemerataan halaman madrasah sebagai ruang terbuka bagi aktivitas belajar para peserta didik selain pemerataan halaman utama madrasah, ada juga sumbangan dari masyarakat berupa pemagaran pagar pintu masuk utama madrasah. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak kepala madrasah.

Peran serta atau partisipasi masyarakat (orang tua peserta didik bahkan masyarakat luas dapat memberikan perhatian besar terhadap madrasah) wujud bantuan masyarakat dalam hal bantuan material berupa timbunan, semen dan tenaga serta pemikiran dalam pemerataan dan atau penyelesaian halaman madrasah diantaranya juga ruang terbuka yang permanen serta akomodatif, digunakan untuk aktivitas upacara bendera, pembelajaran olahraga, serta tempat bermain peserta didik, di samping itu juga ada orang tua peserta didik yang menyumbang bahkan terlibat secara langsung untuk membuat pemagaran permanen dan minimalis pada pintu masuk utama madrasah.⁵⁷

Dari percakapan tersebut terlihat bahwa MIN Jaifuri Arso III, mempunyai masyarakat (orang tua peserta didik) yang sangat peduli terhadap pendidikan anaknya. Melalui program Adiwiyata, peran masyarakat lebih besar. Pokja daur ulang misalnya, melalui tangan terampil masyarakat (Ibu Luh Manik) bersama guru dan peserta didik yang bertanggung jawab dalam kelompok kerja (pokja) tersebut,

⁵⁶Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

⁵⁷Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom.

mampu menghasilkan berbagai macam bentuk kerajinan tangan yang bernilai ekonomis melalui bahan-bahan bekas.



Dokumen.11. Ruang Pokja Daur Ulang ⁵⁸

Di samping ada juga pokja *green house* dan pokja kompos, masyarakat (orang tua peserta didik) dengan suka rela membangun sebuah *green house* (pondok belajar), dimana pondok belajar tersebut dibangun di atas tanah berukuran 6x10 meter. Pondok itu dihiasi dengan berbagai taman dan bunga yang bermanfaat, begitupun pupuk kompos yang berasal dari hasil olahan pokja kompos (Bapak. Robingun). Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sumarni (guru) sekaligus penanggungjawab pokja daur ulang.

Keterlibatan/peran serta masyarakat (orang tua peserta didik) dalam hal ini pokja daur ulang, pokja *green house* serta pokja kompos telah membuahkan hasil yang signifikan, pokja daur ulang melalui Ibu Luh Manik (masyarakat), Ibu sumarni (guru) serta peserta didik yang bergabung dalam pokja tersebut, telah berhasil memanfaatkan sampah yang di daur ulang

⁵⁸ Sumarni, Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Arso III, sebagai penanggung jawab pokja daur ulang. Menuturkan bahwa karya daur ulang hasil karya bersama antara guru, masyarakat dan anak-anak yang bersumber dari bahan bekas pakai (sampah) di daur ulang menjadi sebuah karya inovatif yang memiliki nilai ekonomis, karya hasil cipta bersama ini sudah beberapa kali di ikutsertakan dalam pameran produk inovasi di tingkat Provinsi baik pameran yang diselenggarakan tingkat Provinsi Papua maupun pada tingkat Nasional.

sehingga menghasilkan berbagai macam kerajinan yang memiliki nilai ekonomis, di samping ada pokja *green house* dan pokja kompos, dimana keterlibatan para orang tua murid perkelas (I s .d VI) berkotong royong membangun *green house* (pondok belajar) pondok tersebut di bekali dengan taman serta bungan yang bermanfaat melalui wadah atau cawan yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk dipandang, serta diberi pupuk kompos yang bersumber dari hasil karya masyarakat (Bpk. Robingun), guru, dan peserta didik melalui pokja kompos. Pondok belajar ini berfungsi sebagai sarana praktek mata pelajaran tertentu bagi para guru dan para peserta didik madrasah.⁵⁹



Dokumen: 12. Ruang pokja daur ulang.⁶⁰

Untuk memastikan sarana utama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III) penulis melakukan wawancara dengan kepala Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), sebagai berikut:

⁵⁹Sumarni, (guru) Penanggung Jawab Pokja Daur Ulang, Program Adiwiyata pada MIN Keroom.

⁶⁰Suparman, Penanggung Jawab Adiwidata, Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Arso III, senada dengan penanggung jawab pokja daur ulang. Menuturkan bahwa karya daur ulang hasil karya bersama masyarakat dan anak-anak yang bersumber dari bahan bekas pakai (sampah) di daur ulang menjadi karya inovatif yang cantik, memiliki nilai ekonomis, karya hasil cipta bersama ini beberapa kali di ikutsertakan dalam pameran produk inovasi di tingkat Provinsi baik pameran yang diselenggarakan tingkat Provinsi Papua maupun pada tingkat Nasional.

Pertama sarana hasil dari partisipasi masyarakat yaitu Tanah madrasah di sini adalah tanah hibah masyarakat dengan luas 1000 m², tiga ruang belajar ukuran 8 x 7 m = 56 m, 15 x 56 = 840 m juga mushallah sepenuhnya swadaya masyarakat ukuran 6 x 6 = 12 M., halaman madrasah (ruang terbuka) Lapangan fovy Lapangan futsal 25 x 45 m 12 green house 1 bantuan masyarakat 8 x 10 m 13. *Kedua* sarana dari pemerintah yaitu 12 ruangan belajar dari pemerintah, satu ruangan kepala madrasah dari pemerintah dengan ukuran 8 x 7 = 56 M begitu juga ruangan guru dari pemerintah dengan ukuran 8 x 16 = 126 M, Juga ada kanting dari pemerintah ukuran 3 x 3 = 9 M, 8 Ruang Tata Usaha (TU) ukuran 6x 8 = 48 M, Mading 1 ukuran 6 x3 = 18 M, MCK ukuran 2 x 1, 5 m ruang keleri (ruangan daur ulang ukuran 7 x 8 m, UKS 8 x7 m kolam ikan/2 4x5 m apotik hidup 3 x4 m, pembibitan 4 x5 m, ruang satpan pemerintah 4 x 3 m, honay 3 x 3 m, Multi Media (aula) 6 x 15 m, lab computer 8 x 7 m Lab IPA 8 x 7 m, Ruang perpustakaan 8 x 7 m.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan adanya partisipasi masyarakat namun belum maksimal dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Arso III) di Kab. Keerom-Papua yang berkaitan dengan sarana utama, karena partisipasi masyarakat hanya ada pada pengadaan mushollah dan kantin madrasah, *green house*, pemerataan halaman Madrasah, pemagaran dan pembuatan kolam Madrasah.

Berikut hasil dokumen observasi tentang lokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom Arso III.⁶²

⁶¹ Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III).

⁶² Observasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom Arso III, *Dokumentasi*. MIN Keerom adalah Madrasah Ibtidaiyyah Negeri dibawa naungan kementerian Agama RI., secara operasional MIN dibawah satker Kementerian Agama Kab. Keerom-Papua. MIN didirikan diatas tanah seluar 1000 m² serta memiliki kecukupan dari aspek sarana dan prasarana yang memadai.



Gambar: 13. Foto MIN Keerom Arso III tampak dari arah depan.

2. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Salah satu jenis pendidikan di tingkat madrasah ibtidaiyyah, adalah pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang penting, karena membantu mengembangkan peserta didik sebagai individu dan makhluk sosial agar tumbuh dan berkembang secara wajar. Ini dikarenakan pelaksanaan dalam pendidikan jasmani mengutamakan aktivitas jasmani khususnya olahraga dan kebiasaan hidup sehat. Proses transfer ilmu pengetahuan tersebut memerlukan suatu alat atau media, sehingga mempermudah dalam proses pentransferan ilmu pengetahuan. Media atau alat dalam pendidikan di dunia olahraga dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana (sarpras). Sarpras dalam proses pendidikan jasmani harus tersedia di madrasah guna untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang ada di madrasah. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya peserta didik menguasai materi pembelajaran.

Pembelajaran pendidikan jasmani kurang maksimal karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mengingat hampir cabang olahraga dan Pendidikan Jasmani memerlukan sarana dan prasarana yang beraneka ragam.

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam pembelajaran pendidikan jasmani adalah sangat vital artinya bahwa pembelajaran pendidikan jasmani harus menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan termasuk mengontrol cara pakainya. Sarana dan prasarana tersebut haruslah ada dalam setiap pembelajaran pendidikan jasmani. Sarana dan prasarana juga harus memenuhi syarat agar tercipta proses pembelajaran pendidikan jasmani secara efektif.

Fasilitas olahraga dalam arti luas adalah kelengkapan-kelengkapan kapan yang harus dipenuhi oleh suatu madrasah untuk keperluan pelajaran-pelajaran olahraga pendidikan. Fasilitas-fasilitas luar adalah lapangan bolavoli, lapangan bolabasket, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis dan lain sebagainya.

Sedangkan fasilitas dalam ruang adalah bangsal tertutup dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan sekalipun dalam keadaan hujan atau cuaca buruk. Dalam pengertian fasilitas termasuk pula kolam renang. Pemenuhan fasilitas bangsal senam, ruang bela diri dan lebih-lebih kolam renang namun belum ada disiapkan pada madrasah tersebut.



Gambar: 14. Fasilitas ruang terbuka madrasah.⁶³

⁶³Kepala Sekolah MIN, menuturkan bahwa ruang terbuka di depan halanan madrasah yang dimiliki MIN Arso III, adalah merupakan fasilitas berkat Kerjasama dengan masyarakat dimana anak-anak dapat mengekspresikan berbagai bakat dan kemampuan dalam bidang intra dan

Selanjutnya dalam uraian tentang fasilitas hanya dibatasi dalam arti lapangan hijau atau lapangan olahraga, di mana dengan adanya lapangan ini anak-anak bebas lari-lari, bermain, bertanding dan sebagainya. Sarana pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang sifatnya tidak permanen, dapat dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: bola, raket, pemukul, tongkat, balok, dan raket tenis meja. Sarana atau alat sangat penting dalam memberikan motivasi peserta didik untuk bergerak aktif, sehingga peserta didik sanggup melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh dan akhirnya tujuan aktivitas dapat tercapai.

Alat-alat olahraga dalam hal ini diartikan pemenuhan kebutuhan alat-alat berupa bola kasti atau bola rounders, bola besar nomer tiga, bolavoli, kayu pemukul kasti dan kayu pemukul rounders, bolabasket dan lain-lain. Kalau alat olahraga tersebut sukar dipenuhi dalam waktu singkat, guru dapat memilih jenis alat yang dipandang lebih sesuai dengan sarana yang dimiliki.

Pada dasarnya pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab menyiapkan fasilitas pendidikan. Namun dalam realitasnya pemerintah terbatas dalam memberikan bantuan, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk memastikan kalau ada partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua di bidang olahraga maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Menurut saya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang memenuhi dengan kondisi yang baik maka akan memberikan banyak keuntungan,

ekstra kurikuler, bahkan ruang terbuka ini pun digunakan untuk kegiatan penting misalnya peringatan hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari besar nasional yang melibatkan unsur pemerintah maupun masyarakat.

yaitu: (1) Membantu terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan lancer; (2) Peserta didik akan termotivasi dengan keadaan sarana dan prasarana yang lengkap dan baik, maka peserta didik akan beraktivitas dengan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani; (3) Membantu guru pendidikan jasmani dalam kelancaran kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani bagi peserta didik, sehingga akan terjadi keefektifan pada proses kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Tapi terus terang di madrasah ini keadaan sarprasnya masih belum cukup memenuhi untuk kebutuhan pembelajaran pendidikan jasmani bagi peserta didik. Tetapi sarana dan prasarana ada dari pemerintah dan sebahagian dari masyarakat, saya bersyukur karena masyarakat telah berpartisipasi dalam menyediakan alat olahraga.⁶⁴

Hasil wawancara denga guru olahraga Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III), mengatakan bahwa:

Alhamdulillah sarana dan prasarana olahraga di madrasah ini sudah memadai dan semua ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani sudah ada yang berasal dari pemerintah dan dari sumbangan masyarakat itu bukti bahwa masyarakat antusias dalam berpartisipasi soal olahraga di madrasah ini⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sarana dan prasarana olahraga di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua tergambar bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga, di madrasah negeri telah memiliki cukup peralatan olahraga dan maksimal.

⁶⁴Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III),

⁶⁵Guru Olah Raga Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Keberadaan sarana prasarana olahraga pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua merupakan sarana yang mendukung fasilitas, dengan adanya perkakas yang memadai maka proses pembelajaran penjas akan sangat ideal. Hasil keberadaan sarana prasarana olahraga pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua yang kurang mengindikasikan bahwa keberadaan sarana prasarana olahraga pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua yang ada belum memadai, dan masih banyak juga yang perlu dibenahi.

Berdasarkan hasil analisis penulis pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua menunjukkan adanya partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih bersifat pada sarana dan prasarana serta dana sedangkan dalam hal pengambilan keputusan, gagasan maupun tenaga masih terbatas. Masyarakat dapat memberikan ide dan gagasan yang membangun dalam pendidikan di madrasah demi majunya sebuah pendidikan. Peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga madrasah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bersangkutan akan mempunyai rasa memiliki terhadap madrasah sehingga akan bertanggung jawab dan dedikasi mereka untuk madrasah.

Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah menciptakan keterbukaan dan kerjasama yang kuat yaitu terlihat pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua adanya hubungan kerja sama antara madrasah dan masyarakat.

Hasil analisis proyeksi ke depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua sangat memungkinkan untuk berkembang karena pada Madrasah Ibtidaiyah negeri dengan masyarakat sekitar membangun hubungan edukatif,

yaitu hubungan kerjasama antara madrasah dan masyarakat dalam hal mendidik peserta didik, antara guru di madrasah dan orang tua dalam keluarga. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru pada Madrasah dan orang tua peserta didik sebagai anggota komite madrasah, di samping itu juga dilakukan dengan anjingsana oleh guru-guru ke rumah orang tua peserta didik di luar waktu pelajaran.

Hasil analisis proyeksi ke depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua sangat memungkinkan untuk berkembang karena pada Madrasah membangun hubungan kultural, terbukti karena adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat yang menanamkan sikap toleransi, sehingga dalam pengadaan bantuan madrasah bukan hanya yang muslim memberi bantuan tetapi juga masyarakat non muslim.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Standar Pembiayaan pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua

Keberadaan masyarakat Kab. Keerom-Papua dalam menjalankan perannya untuk memajukan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua, khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua ternyata mengalami beberapa kendala baik dari segi intern maupun ekstern yang mengakibatkan lambatnya kemajuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua.

Untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua sebagai lembaga pendidikan yang dikelola kementerian agama, maka penulis melakukan wawancara, analisis dokumen dan observasi.

Dalam upaya partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua ternyata masyarakat memiliki kendala intern yang dialami oleh sebagian masyarakat yaitu di bidang ekonomi, menurut beberapa penuturan dalam wawancara dengan informan sebagai berikut, adanya kerjasama yang harmonis antara madrasah dan masyarakat, maka tujuan pendidikan akan dapat tercapai sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan madrasah,.

Wawancara selanjutnya dengan ketua komite Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III),

Saya sebagai ketua komite di madrasah ini menggali dana dari wali peserta didik melalui kegiatan Komite Madrasah tanpa paksaan dan tidak mengikat. Dana dari wali peserta didik dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang pelatihnya diambil dari masyarakat setempat, seperti: pramuka, les bahasa Inggris, BTQ dan PMR. Namun dalam pelaksanaan belum berjalan dengan lancar. Sebagai contoh ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan apabila madrasah mempunyai dana yang cukup untuk memberi honor pelatih, tapi apabila tidak mempunyai dana maka kegiatan itu akan terhenti, dan ekstrakurikuler cuma dilaksanakan apabila ada porseni atau perpisahan (serah terima peserta didik yang telah lulus) setelah itu tidak ada kelanjutannya karena madrasah tidak mampu membayar pelatihnya. Dana yang dihimpun dari wali peserta didik tidak mencukupi untuk menutup seluruh kegiatan madrasah, apabila kegiatan itu dilaksanakan secara terus menerus.⁶⁶

Dari uraian tersebut ditemukan kenyataan bahwa antara bantuan masyarakat dengan kebutuhan madrasah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan madrasah.

⁶⁶Komite Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III)

Keadaan demikian tidak akan terjadi apabila dukung masyarakat terhadap perbaikan mutu madrasah dibina dan dikembangkan secara terus menerus, melalui berbagai unsur.

Unsur tersebut selain partisipasi masyarakat juga ketenagaan, keuangan, kurikulum, sarana dan prasarana. Setelah unsur pendidikan tersebut dirumuskan diperlukan strategi lain yaitu pelaksanaan di madrasah. Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan - permasalahan pada Madrasah dipandang pentingnya untuk meneliti, bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama madrasah dengan masyarakat atau semua warga madrasah, agar perbaikan sistem kerjasama segera dapat dilakukan.

Di samping dari pemerintah dan dari orang tua peserta didik, biaya pendidikan dapat pula diperoleh dari sumbangan masyarakat secara perorangan maupun sumbangan yang melalui organisasi yang ada di dalam maupun luar negeri. Sumbangan biaya pendidikan dari masyarakat dalam bentuk barang peralatan dan jasa yang sifatnya tidak mengikat. Sumbangan ini sulit untuk di data, dan selalu kurang diperhitungkan dalam perencanaan biaya pendidikan.

Sumber dana dari masyarakat pada Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan pada Madrasah, yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana ini sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan madrasah, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pada Madrasah di Kab. Keerom-Papua.

Masalah yang dihadapi Madrasah Ibtidaiyyah di Kab. Keerom-Papua menurut kepala madrasah Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III), sebagai berikut:

Sumber dana dari orang tua peserta didik untuk sekarang kendalanya adalah persepsi masyarakat tentang pendidikan gratis, karena madrasah termasuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kata mereka sumber dana dari orang tua peserta didik sudah banyak yang tidak digunakan lagi karena ada kebijakan madrasah gratis ditingkat pemerintahan pusat dan daerah. Hal itu banyak factor baik dari tingkat pendidikan, ekonomi dan pengalaman masyarakat.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program pendidikan gratis di Madrasah sebagai berikut:

1. Faktor pengetahuan masyarakat

Kondisi masyarakat di lingkungan Madrasah Kab. Keerom-Papua sebagian besar berpendidikan, dan ada juga sebagian kecil masyarakat yang tidak berpendidikan dikarenakan faktor ekonomi lemah, bahkan tidak jarang masyarakat kurang memahami maksud pembebasan biaya pendidikan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kab. Keerom-Papua:

Beliau mengatakan program pendidikan gratis ini sudah di sosialisasikan kepada masyarakat, namun dalam penyampaian kepada masyarakat disini tidak terlalu formal atau tegas, karena kebanyakan masyarakat tidak bisa menerima jika diperlakukan sedemikian, sehingga dalam penyampaian kurang begitu jelas yang mengakibatkan penggratisan biaya pendidikan kerap kali disalah artikan oleh masyarakat khususnya wali peserta didik, sehingga perhatian orang tua terhadap pendidikan berkurang atau lepas

⁶⁷Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Keerom (Arso III)

tangan dari tanggung jawab dan jika ada masalah melimpahkan tanggung jawab kepada pihak madrasah.⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, menurutnya kurangnya perhatian masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada karena pemahaman orang tua begitu rendah, sehingga bentuk kerja sama pihak pelaksana pendidikan dan orang tua terasa sangat jauh, sehubungan orang tua tidak mau peduli terhadap pendidikan anaknya malah menyerahkan rasa tanggung jawab kepada pihak madrasah, namun ada sebagian yang sudah mengerti.

2. Faktor tingkat pendidikan masyarakat

Kondisi masyarakat di lingkungan Madrasah sebagian besar berpendidikan, Pengalaman masa lampau pada seseorang akan sangat mempengaruhi persepsinya terhadap suatu rangsangan yang akan datang dalam lingkungannya. Tidak bermadrasah dikarenakan tidak adanya biaya, hal ini diketahui dari argumen masyarakat yang mengatakan mereka tidak bisa bersekolah karna memang tidak ada biaya untuk bersekolah pada waktu itu dan sekarang dengan adanya program pendidikan gartis dari pemerintah tentu merupakan satu keberuntungan.

Program pendidikan gratis ini telah disosialisasikan oleh aparat setempat kepada masyarakat tetapi penyampaianya secara kekeluargaan saja sehingga dalam penyampaian kurang begitu jelas yang mengakibatkan penggeratisan biaya pendidikan kerap kali disalah artikan namun sebagian masyarakat sudah mengerti. Pengetahuan masyarakat terhadap program pendidikan gratis akan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program pendidikan gartis.

Kebijakan pendidikan gratis ini pada prakteknya justru menyulitkan madrasah khususnya swasta untuk berkembang karena sebagian masyarakat salah persepsi.

⁶⁸Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keerom (Arso III)

Akibat dari kebijakan ini, mau tidak mau ada beberapa inisiatif satuan pendidikan kewalahan dalam hal pendidikan dalam upaya pengembangan madrasah.

Hasil analisis penulis, bahwa proaktifnya masyarakat dalam pengembangan pendidikan pada madrasah bidang pembiayaan didukung oleh adanya peran komite madrasah pada Kabupaten Keerom Papua sebagai mediator membuat perumusan kegiatan mediasi antara madrasah dengan pemerintah, elemen masyarakat, wali peserta didik serta dunia industri. Rumusan mediasi tersebut kemudian dibahas bersama madrasah untuk disusun ke dalam suatu proposal. Proposal yang diajukan meliputi: 1) pengajuan kegiatan; 2) permintaan nara sumber kegiatan; 3) pengajuan bantuan sarana prasarana; 4) pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan madrasah.

Komite madrasah Ibtidaiyah Negeri pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua sebagai penghubung telah membuktikan adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses hubungan masyarakat dalam rangka berpartisipasi mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Peran komite madrasah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program madrasah kepada masyarakat.

Komite madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Keerom Provinsi Papua juga berperan memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam menampung pengaduan, keluhan dari masyarakat terhadap kinerja madrasah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada madrasah agar memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program Kebijakan.

Komite madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Keerom Provinsi Papua sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan seperti melakukan

kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu seperti: (1) membina dan hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan di sekitar madrasah; (2) mengadakan penjagaan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain diluar madrasah untuk memajukan mutu pembelajaran di madrasah. (b) menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat dalam bentuk: (1) menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar madrasah; (2) menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar madrasah.

Sangat jelas kalau komite madrasah melakukan dukungan dan berpartisipasi dalam mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Komite madrasah sebagai badan pengontrol kegiatan madrasah meliputi pengawasan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan pengawasan merupakan hal yang esensial dalam bidang manajemen. Pengawasan yang ketat dan terkendali membuat madrasah lebih berhati-hati. Kegiatan madrasah yang selalu mendapatkan pengawasan akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan pengawasan.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa komite madrasah sebagai mediator dalam kaitannya dengan dukungan dan berpartisipasi dalam mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua melalui kerelaan masyarakat dalam memberikan bantuan untuk pendidikan dengan melakukan organisasi dengan berbagai pihak terkait dalam pendidikan.

Pelaksanaan dukungan dan berpartisipasi dalam mengembangkan madrasah memiliki tujuan antara lain memberikan informasi tentang tujuan-tujuan, program-program serta kebutuhan-kebutuhan madrasah kepada masyarakat. Di samping itu juga memberikan penerangan kepada madrasah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada madrasah.

Hal tersebut menunjukkan komite mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan madrasah dan diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan pengendalian mutu pendidikan. Komite madrasah diposisikan sebagai salah satu stakeholder yang penting di samping pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite madrasah benar menjadi partner kerja dengan madrasah, yang secara bersama mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat, serta memberi masukan kepada madrasah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah berkembang sehingga terwujud berpartisipasi dalam mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa komite madrasah sebagai partner kerja madrasah, turut membantu agar masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua selain itu komite madrasah juga memberi pertimbangan, kebijakan dan menyalurkan ide dan berbagai kebutuhan pendidikan serta menampung dan menganalisa aspirasi dan memberi rekomendasi kepada madrasah dalam rangka mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Komite madrasah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat baik yang terdiri dari: perorangan, kelompok, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta orang tua peserta didik untuk

bersama-sama madrasah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabilitas dalam rangka mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Dalam upayanya memenuhi layanan belajar yang memuaskan, maka aspirasi masyarakat melalui komite madrasah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja madrasah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan, dan program-program prioritas madrasah. Dengan cara demikian, setiap madrasah akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang direfleksikan dalam rumusan visi, misi, program prioritas dan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengembangkan madrasah pada Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Komite Madrasah Ibtidaiyah telah menjalankan fungsinya, sebagai badan pertimbangan, memberikan pertimbangan pada madrasah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua.

Komite Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua memberikan dukungan terhadap perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua

Bahkan komite Madrasah membina hubungan dan kerja sama dengan masyarakat. Peran ini antara lain mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan.

Komite Madrasah membantu madrasah mensosialisasikan program madrasah kepada masyarakat sehingga terjadi umpan balik bagi keberhasilan pelaksanaan

pendidikan pada madrasah. Selain itu, peran ini dapat dilakukan oleh Komite Madrasah sebagai mediator dalam pelaksanaan program madrasah, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah dapat akuntabel kepada masyarakat.

Komite Madrasah rutin mengadakan rapat atau pertemuan dengan kepala madrasah, dewan guru dan orang tua atau masyarakat; mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke madrasah; meminta penjelasan kepada Madrasah tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua.

Proyeksi pembiayaan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua berdasarkan hasil analisis penulis dapat berkembang karena Madrasah menerapkan prinsip transparansi. Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan kegiatannya saja, akan tetapi Madrasah melakukan penyajian laporan yang jelas untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Segala hal yang menyangkut tentang pendapatan dan pengeluaran anggaran biaya dijelaskan secara mendetail lewat laporan yang dibuat. Hal ini dimaksudkan untuk tersalurnya anggaran yang diterima pada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak.

Adanya asas transparansi biaya pada pembiayaan pada Madrasah sangat mendukung keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan madrasah melalui pembiayaan. Hal tersebut pula mengantisipasi segala anggapan yang negative dari berbagai pihak.

Pengeluaran dan pemasukan pada Madrasah dijelaskan dalam pembukuan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Sehingga tidak muncul anggapan yang negatif dari berbagai pihak dikarenakan transparansi dalam pertanggungjawaban segala anggaran yang telah digunakan oleh Madrasah.

Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya ditanggulangi dengan kepala tata usaha. Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan mempunyai dampak kemajuan dalam bidang pendidikan. Baik dalam bentuk pengeluaran berupa uang maupun barang mempunyai dampak signifikan dalam pembangunan bidang pendidikan.

Dalam hal menarik, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi biaya yang ada, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Dibuktikan dengan bukti fisik yang berbentuk laporan keuangan yang jelas, dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan.

Segala pengeluaran yang dilakukan dalam biaya pendidikan dimuat dalam Rancangan Anggaran Pembiayaan Madrasah (RAPBM). Segala pengeluaran yang dilakukan oleh Madrasah baik berupa uang maupun barang jelas runtutannya tertulis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM).

Selain hal di atas, hasil analisis penulis melihat partisipasi masyarakat ke depan semakin meningkat karena pada Madrasah adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam mengelola pembiayaan, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran, adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Dalam realitas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kab. Keerom-Papua segala biaya yang telah diperoleh dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, segala pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan proses pendidikan yang terdapat pada Madrasah yang dalam hal ini sesuai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah dibuat sejak awal.

BAB IV

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN SEKOLAH BERMUTU

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pengelolaan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kab. Keerom-Papua meliputi (1) masyarakat ikut serta dalam perencanaan kegiatan pendidikan Madrasah melalui komite madrasah, khususnya dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja madrasah. (2) pelaksanaan kegiatan pendidikan madrasah disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk kepribadian (seperti kepramukaan, usaha kesehatan madrasah (UKS) melalui kegiatan (PHBS), olahraga, kegiatan drumben, kesenian, kegiatan keagamaan, (PHBI) qiroati, kaligrafi, baca tulis al-Qur'an), termasuk ada kegiatan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) serta program adiwiyata pada Madrasah merupakan upaya untuk memberdayakan siswa guru dan masyarakat lingkungan madrasah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan madrasah sehat; (3) pengawasan kegiatan pendidikan madrasah disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan madrasah yang ikut hanya komite madrasah.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua disimpulkan bahwa masyarakat antusias berpartisipasi dalam membangun sarana utama (ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek ketrampilan), dan parasarana penunjang Pendidikan (ruang kantor, kantin, tanah, toilet, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala madrasah, tempat ibadah), atas dasar kesadaran masyarakat, rasa tanggung jawab dalam pengembangan madrasah sebagai bentuk kegiatan sosial sehingga yang

ikut berpartisipasi bukan hanya umat Islam tetapi termasuk masyarakat yang beragama Nasrani dan Hindu, serta kontribusi masyarakat adat berupa pemberian tanah untuk pembangunan madrasah. Dasar pemikiran dalam berpartisipasi bahwa masyarakat dan individu memiliki ikatan solidaritas yaitu atas dasar persamaan sebagai sesama masyarakat, bukan atas persamaan agama tetapi persamaan prinsip hidup gotong royong sehingga melahirkan tanggung jawab bersama khususnya dalam pengembangan pendidikan di madrasah.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan pada Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua telah terlaksana melalui ikatan alumni, dan partisipasi komite madrasah yang bersifat insidental jika diperlukan sesuai dengan kegiatan tertentu saja.

Berdasarkan hasil studi ini, maka berikut ini dikemukakan implikasi studi yang diharapkan mendapat perhatian dan tanggapan yang serius oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua, sebagai berikut:

1. Pihak Madrasah

Pihak madrasah sebaiknya melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens kepada masyarakat terkait dengan pentingnya program partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua karena dalam studi ini peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan masih belum maksimal perlu ditingkatkan dan diperdayakan lagi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan standar pembiayaan. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana yang berkaitan dengan keagamaan, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan oleh karena itu untuk memperbaikinya perlu dilakukan suatu upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan

peran serta masyarakat melalui manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah.

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua dengan para guru dan masyarakat dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, fungsional, dan diagonal. Koordinasi dapat juga dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi dilakukan secara terus menerus sebagai upaya konsolidasi untuk memperkuat kelembagaan dalam mencapai tujuan. Tidak hanya itu, pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dalam konteks tatakrma profesional dapat meningkatkan hubungan baik antara pimpinan madrasah dengan para guru dan staf, dan pihak madrasah dengan komite madrasah.

Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang di dalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain. Banyak hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang bermutu, mulai dari menggunakan jasa pelayanan yang tersedia sampai keikutsertaannya dalam pengambilan

keputusan. Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu madrasah mencakup seluruh stake holder (orang tua, masyarakat dan komite madrasah).

Pihak madrasah sebaiknya menjadikan orang tua peserta didik sebagai mitra madrasah yang dapat berperan serta dalam pembelajaran, perencanaan/ pengembangan maupun dalam pengelolaan kelas yang dapat meningkatkan suatu mutu pendidikan madrasah. Bukan hanya sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan pada Madrasah. Karena dalam hasil studi ini masih banyak orang tua hanya memasukkan anak ke madrasah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak madrasah.

Pihak madrasah sebaiknya meminta komite madrasah dan orang tua murid tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang pentingnya program partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua atau hal-hal penting lainnya untuk kemajuan bersama.

Hubungan antara madrasah dan masyarakat pada hakekatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan peserta didik di madrasah. Secara umum orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan dan lain-lain antara madrasah dengan orang di luar madrasah, adalah kegiatan hubungan madrasah dengan masyarakat.

Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. *Integrity*

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan madrasah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. Biasanya sering terjadi madrasah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah madrasah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid.

Oleh sebab itu madrasah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap madrasah, atau dengan kata lain transparansi madrasah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang madrasah.

b. *Continuity*

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan madrasah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan madrasah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester, hanya dilakukan oleh madrasah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan madrasah untuk datang ke madrasah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakili kepada orang lain untuk menghadiri undangan madrasah. Apabila ini terkondisi, maka madrasah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat.

Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan madrasah, permasalahan-permasalahan madrasah bahkan permasalahan belajar peserta didik selalu muncul dan berkembang setiap saat, karena itu maka diperlukan penjelasan informasi yang terus menerus dari madrasah untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya.

c. *Simplicity*

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan madrasah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi (madrasah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat setempat). Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa; informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah, oleh sebab itu penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat.

d. *Coverage*

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya:

- 1) Lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan madrasah dimana anaknya belajar. Oleh sebab itu informasi kemajuan madrasah, masalah yang dihadapi madrasah serta prestasi yang

dapat dicapai madrasah harus dinformasikan kepada masyarakat.

- 2) Akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang obyektif.
- 3) *Up to date*, berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi madrasah terakhir. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian sejauh mana madrasah dapat mencapai misi dan visi yang disusunnya.

e. *Constructiveness*

Program hubungan madrasah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti madrasah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang madrasah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi madrasah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada madrasah sesuai dengan permasalahan madrasah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut madrasah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus menerus kepada sasaran masyarakat tertentu.

Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu, termasuk dalam hal ini memberitahukan kelemahan-kelemahan madrasah dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Penjelasan yang konstruktif akan menarik bagi masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat tanpa prasangka tertentu, hal ini akan mengarahkan mereka untuk berbuat sesuatu sesuai dengan

keinginan madrasah. Untuk itu informasi yang ramah, obyektif berdasarkan data-data yang ada pada madrasah.

f. *Adaptability*

Program hubungan madrasah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (*culture*) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin madrasah mengadakan kunjungan (*home visit*) pada pagi hari. Pengertian-pengertian yang benar dan valid tentang opini serta faktor-faktor yang mendukung akan dapat menumbuhkan kemauan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi madrasah.

2. Masyarakat

Sebaiknya Komite Madrasah menjalankan tugas dan fungsinya dalam program partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua yaitu Komite Madrasah sebagai *Advisory agency* (pemberi pertimbangan), *Supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *Controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan Mediator, penghubung, atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Sebaiknya dimaksimalkan tugas utama komite madrasah ialah membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di madrasah, komite madrasah membantu madrasah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen madrasah, kelembagaan madrasah, sarana dan prasarana madrasah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan

peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra madrasah.

Sebagai lembaga yang melakukan kegiatan komunikasi dengan publik tidak dapat dilakukan oleh pimpinan sendiri. Hubungan Masyarakat dengan masyarakat kian dirasa penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Keerom-Papua selalu menjalin kontak dengan pihak luar madrasah, mulai dari orang tua peserta didik, komite madrasah, tokoh masyarakat alumni, pemerintah, madrasah-madrasah lain dan elemen masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhishek Sharma, The Comparative Influences Of Transformational Leadership And Leader Member Exchange On Organizational Outcome, Personal Outcome And Employee Satisfaction, International Journal of Education <https://www.myschool.edu.au>. diakses, 14/9/2019.
- al-Abra>sy, Muhammad Athiyah. *Ru>h} al-Tarbiyyah wa al-Ta'li>m*. Kairo: Da>r al-'Arabiyyah Isa al-Ba>b al-H{alab, t.th.
- al-Ahwa>niy, Ahmad Fu'ad. *al-Tarbiyah fi> al-Islam*. Mesir: Da>r al-Ma'a>rif, t.th.
- Alvarez, Carmen. "La Mejora de la Participación de la Comunidad en la Escuela Con Grupos Interactivos", *Revista Complutense de Educación*, vol. 28 no. 3 (November 2017). http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n3.49857. (Diakses 28 November 2019).
- Amrullah, Zainal Aqib Ahmad. *Ensiklopedia Pendidikan & Psikologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Anggoro, Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi IV*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018.
- Aswasulasikin. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendidikan di Sekolah Dasar: Studi Fenomenologi Masyarakat Desa Jerowaru Lombok

- Timur NTB". *Disertasi*. Yogyakarta: UNY Yogyakarta, 2015.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. *Aims and Objective of Islamic Education*. Jeddah: King Abd. al-Aziz, 1999.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, Cet. XII; Bandung: Diponegoro, 2012.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasi*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Coser et all. *Introduction to Sociology*. Cet. VIII; Florida: Harcourt Brace Javanovich, Inc, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Echols, John dan Hassan Shadili. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Gramedia, 2000.
- Fajar, Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Fattah, Nanang. *Sistem Manajemen Mutu Pendidikan: Dalam Konteks Penerapan MBS*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- . *Landasan Manajemen Perkantoran*. Cet. XVIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Good, Carter V. *Dictionary of Education*. Cet. VII; New York: Mc. Graw Hill Book Company, Inc, 2001.
- Haddade, Hasyim. "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah: Studi Kasus pada Yayasan Keagamaan di Kabupaten Soppeng". *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Halim, Abd Rahman. "Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat (Studi terhadap Perspektif Pembinaan Madrasah

- Swasta di Sulawesi Selatan)". *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- "Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan", *Jurnal Lentera Pendidikan*, vol. 11 no. 1 (Juni 2008). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/download/3765/3439. (Diakses 19 November 2018).
- Halpin. *The Principal's Leadership Behavior*, International Journal of Organizational Behavior (<http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/676/1/jurnal>, diakses, 14/9/2019).
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Malang: UMM Press, 2005.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Haqqi, Ahmad Mu'az. *al-Arba'u>na Hadi>}an fi> al-Akhla>q Ma'a Syarh}iha>*, Terj., Abu Azka dengan judul: *Syarah 40 Hadis tentang Akhlak*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Hersey, Paul. *Manajemen Perilaku Organisasi; Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Terjemahan*. Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2017.
- Imron, Arifin. *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs, dan Multi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma, 2000.
- Iriantara, Yosol. *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

- J. Smith. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Jala>l, Abd. al-Fatta>h. *al-Tarbawiy fi> al-Isla>m*. Cet. XV; Kairo: Markas al-Duwali li al-Ta'li>m, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- Kurniadin, Didin & Imam Machali. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media: 2013.
- Kusumastuti, Frida. *Dasar-dasar Humas*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- LAL, Anshori. *Tranformasi Pendidikan Islam*, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Ma'lu>f, Luwis. *al-Munjid fi> al-Lugah wa A'la>m*. Cet. XXVII; Bairu>t: Da>r al-Masyriq, 1997.
- Mansoben, J.R. "Antropologi Klasik dan Kontemporer". Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Budaya dan Agama di UNCEN, Jayapura, 3 Maret 2017.
- Manzu>r, Jama>l al-Di>n Ibn. *Lisa>n al-'Arab*. Mesir: Da>r al-Mishriyyah, t.th.
- Miarso, Yusufhadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

- Mukhtar dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Mulyasa, E. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Bandung: Departemen Pendidikan Agama RI., 2003.
- . *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- . *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- . *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Murni, Wahid. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Malang: UM Press, 2008.
- Nasir, Muhammad. dkk. "Effectiveness of Community Participation in Public Sector Schools of Khyber Pakhtunkhwa", *Dialogue*, vol. 12 no. 4 (Oktober-Desember 2017).
- Nasution, Zulkarnain. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*. Cet. XIII; Jakarta: PT. Gunung Agung, 2016.
- Nirmal Acharya, *The Impact Of Transformational Leadership On Motivation And Performance Of The Followers, Elk Asia Pacific Journal Of Leadership And Inovasi Manajement*.
<https://www.journals.com/leadership-and-innovation>), diakses, 13/9/2019.

- Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002
- Panigrahi, Manas Ranjan. "School Effectiveness at Primary Levels of Education in Relation to Community Participation", *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, vol. 4 no. 2 (April 2013). <http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/17.panigrahi.pdf>. (Diakses 28 November 2019).
- Pantjastuti, Sri Renani. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Malang: Erlangga, 2007.
- Rahardjo, Mudjia. *Sosiologi Pedesaan (Studi Perubahan Sosial)*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Rahmat, Abdul. *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Relationship of Democratic Leadership Style with High School Teacher Motivation
<http://www.fcps.edu/DHR/employees/evaluations/handbooks/teacher.pdf>. diakses, 15/9/2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan*.

- . *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- . *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.*
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Tafsir al-Manar*, Juz VII; Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Salim, *The Relationship between the Principals' Leadership, Work Motivation, and Interpersonal Communication and the Performance of High School Math Teachers' International Journal of Education* diakses, 13/9/2019.
- Salindeho. *Peranan Tindak Lanjut dalam Manajemen*. Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sallis. *Total Quality Management in Education*, alih bahasa Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCISOD, 2016.
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Setiawan, M. Nur Kholis. "Daya Saing Pendidikan Islam" *Majalah Pendidikan Islam Kementerian Agama*, 2015.

- Shaleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi*, Cet. II; Jakarta: PT Gema Windu Pancaperkasa, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 12, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung: ALFABETA, 2008.
- Suhardan, Dadang. Dkk. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sule, Ernie Tisnawati. *Pengantar Manajemen*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2015.
- Suryasubroto, B. *Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*. Cet. II; Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001.
- Suwito dan Fauzan. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Suyanto. *Dialog Intraktif Tentang Pendidikan: Dari Konseptual Menggelitik Sampai yang Ringan dan Ringan Sekali*. Cet. I; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008.
- Tafsir Ibnu Katsir, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Cet. IX; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'ih, 2016.
- Tampubolon, Daulat P. *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-21*, Cet. XI; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Terry, George R. *Guide to Managemen*, diterjemahkan oleh J. Smith D. F.M dengan judul *Prinsip-prinsip Manajemen*. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Thaha, M. Chabib. *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Daftar Pustaka

Tilaar, H.A.R, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Webster's. *New World Dictionary*. Cet. XI; New York: The World Publishing Coy, 2002.

Yin, Robert K. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dr. H. Talabudin Umkabu, M.Pd., lahir dari pasangan Ahmad Umkabu dan Khadija Bugis pada tanggal 20 Agustus 1974 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN 9 Lilinta pada tahun 1989, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMP Negeri 2 Rofey Sorong, dan lulus pada tahun 1992.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMKN 3 Jayapura dan lulus pada tahun 1995. Setelah itu, melanjutkan pendidikan pada Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Al-Fatah Jayapura dan tamat dengan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Ag.) pada tahun 2000. Pada tahun 2006 menikah dengan Ratna Fakhita dan dikaruniai empat orang anak yaitu pertama Mufida Aziza Zahra Umkabu lahir di Bogor pada tanggal 1 Juni 2007, kedua Syifah Aridhatun Nisa Umkabu lahir di Banten pada tanggal 28 Juni 2008, ketiga Abiyan Syaif Abdullah Umkabu lahir di Jayapura pada tanggal 27 Desember 2010, dan yang keempat Khadeeja Zalfa Huriyah Umkabu yang lahir di Jayapura pada tanggal 18 Oktober 2018. Selanjutnya menempuh pendidikan ke jenjang S2 Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada tahun 2009. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 di Pascasarjana UIN Alauddin

Makassar Program Studi Dirasat Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan dan memperoleh gelar (Dr) bidang konsentrasi pendidikan dan keguruan pada tahun 2020.

Pengalaman bekerja, Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 bekerja sebagai dosen honorer di Jurusan Tarbiya Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Al-Fatah Jayapura. dan pada tahun 2004 sampai sekarang bekerja sebagai dosen tetap PNS di Fakultas Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua. Selain sebagai tenaga pengajar, pernah menjabat Ketua Program studi PGMI STAIN AL-Fatah Jayapura tahun 2004 samapi tahun 2005. Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Al-Fatah Jayapura tahun 2005 sampai tahun 2007, Wakil ketua III bidang kemahasiswaan dan kerjasama STAIN Al-Fatah Jayapura tahun 2011 sampai tahun 2017, Selanjutnya menjabat sebagai wakil rektor tiga (III) bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua dari tahun 2018 sampai sekarang.

Karya yang dihasilkan: Buku berjudul: (1) Manajemen Mutu Madrasah (teori dan praktik pengelolaan pendidikan bermutu yang menghasilkan siswa berkarakter) Cetakan Pertama tahun 2013. (2) Konsep Penyusunan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter. Cetakan Pertama Tahun 2013. (3) Manajemen Mutu Madrasah (teori dan praktik pengelolaan pendidikan bermutu yang menghasilkan siswa berkarakter) Edisi: Revisi Cetakan Pertama Tahun 2015. (4) Jurnal Ilmiah Jabal Himah: Vol.4, No 8 Juli 2011. ISSN: 1978-9653. Judul: Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan., hlm. 185-201.